



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN ELIT DAN BASIS SOSIAL PARTAI DEMOKRAT
DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010**

TESIS

JUMARI

NIM: 0806435088

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM SOSIOLOGI

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN ELIT DAN BASIS SOSIAL PARTAI DEMOKRAT
DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam ilmu Sosiologi**

JUMARI

NIM: 0806435088

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM SOSIOLOGI

DEPOK

JUNI 2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



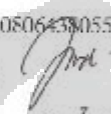
Depok, 6 Juni 2012

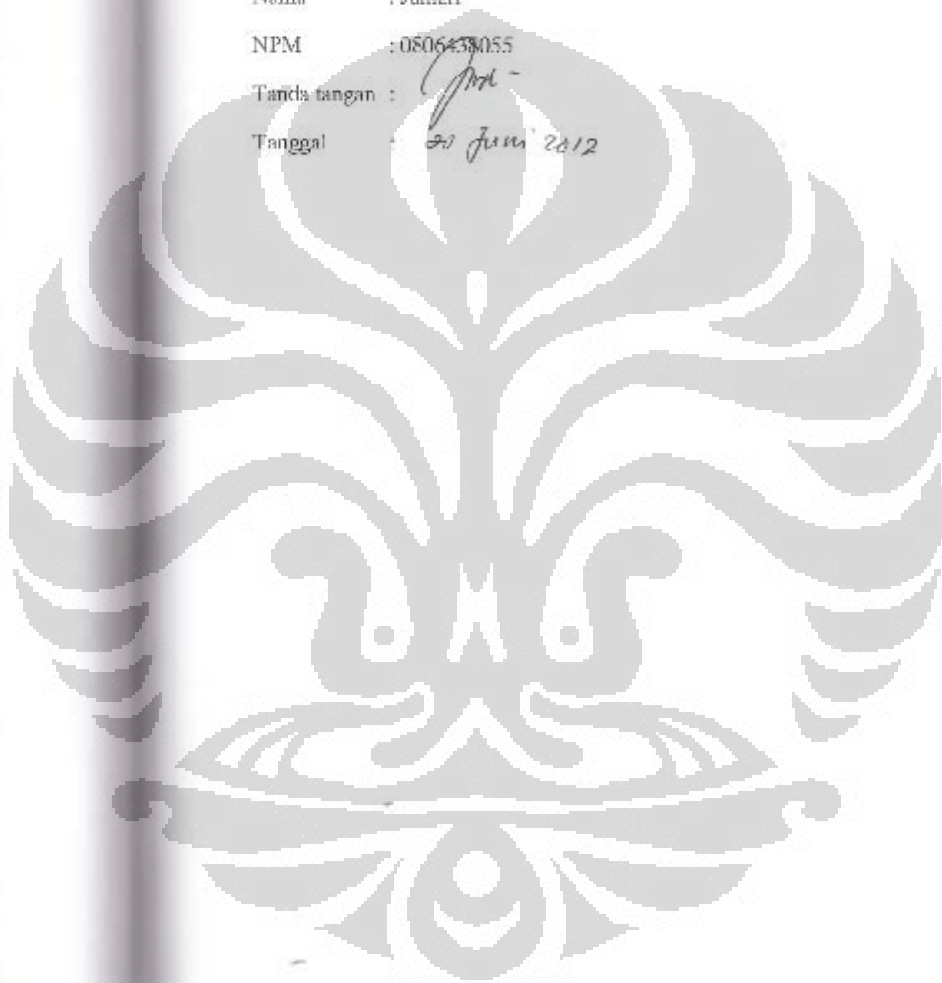
Jumari
(Jumari)

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jumari
NPM : 0806433055
Tanda tangan : 
Tanggal : 20 Juni 2012



Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Jumari
NPM : 0806438055
Program Studi : Sosiologi
Judul Tesis : Peran Elit Dan Basis Sosial Partai Demokrat
Dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Lugina Setyowati, Ph.D

Sekretaris Sidang : Lidya Triana, M.Si

Pembimbing : Iwan Gardono Sudjarmiko, Ph.D

Penguji Ahli : Ganda Upaya, MA

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juni 2012

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumari
NPM : 0806438055
Program studi : Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peran Elit dan Basis Sosial Partai Demokrat Dalam Pemilukada Kota Depok
Tahun 2010”

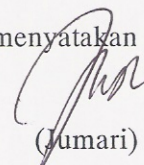
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juni 2012

Yang menyatakan


(Jumari)

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Iwan Gardono Sudjatmiko, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Ganda Upaya, MA, selaku dosen pembimbing akademik sekaligus penguji ahli, yang telah memberikan sumbangan saran dan waktu yang begitu berharga sebagai masukan bagi pembuatan dan penyelesaian tesis ini dengan baik.
3. Ibu Lugina Setyawati, Ph.D, selaku ketua program pasca sarjana sosiologi yang telah meluangkan waktunya untuk membaca dan memberi masukan yang berharga dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Lidya Triana, M.Si, selaku sekretaris program pasca sarjana sosiologi yang telah memberikan masukannya.
5. Mbak Rini dan Pak Santosa yang rajin memberikan alarm untuk segera menyelesaikan tesis, juga mas Agus yang selalu siap membantu.
6. Teman-teman angkatan 2008, Mbak Bhekti terima kasih atas bantuan kerangkanya.
7. Istri tercinta Etty Tri Widyastuti, yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan masternya, juga anak-anak terkasih, Abang, Kakak, Adik.
8. Semua keluarga besar Ngawi, Kaliwingko dan Karangturi (Klaten) terima kasih atas doa dan semangatnya.
9. Ustadz Zuber Safawi, atas kemudahannya selama ini dan geng 405, terima kasih
10. Semua saudara, sahabat dan teman yang telah memberikan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap hanya Allah-lah yang berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

ABSTRAK

Nama : Jumari
Program Studi : Sosiologi
Judul : Peran Elit Dan Basis Sosial Partai Demokrat Dalam Pemilu
Kota Depok Tahun 2010

Elit dan basis sosial merupakan dua elemen penting dalam partai politik, namun memiliki “nasib” yang berbeda. Demokrasi yang seharusnya mampu menyetarakan peran keduanya dalam arena kontestasi (pemilu dan pilukada) tak sepenuhnya berhasil. “Jebakan” demokrasi prosedural yang dilakukan oleh para elit partai semakin menenggelamkan peran basis sosial dalam kancah pemilu dan pilukada daripada memperkuat demokrasi yang substantif.

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pilukada Kota Depok tahun 2010. Penelitian ini akhirnya menemukan bahwa elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pilukada Kota Depok tahun 2010 memiliki peran yang saling berlawanan. Hal ini dikarenakan adanya konflik yang tidak terselesaikan atas calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Elit telah memutuskan mendukung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto dalam pilukada, sementara basis sosial menginginkan Partai Demokrat mengusung kadernya sendiri, yaitu Agung Witjaksono, ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok saat itu. Koalisi yang dibangun oleh elit partai dan sang calon akhirnya harus berhadapan dengan koalisi yang dibangun oleh basis sosial Partai Demokrat yang ada diranting, yaitu “relawan bintang mercy tiga”. Selanjutnya yang terjadi adalah koalisi basis sosial Partai Demokrat *versus* koalisi elit partai.

Kata kunci : demokrasi, kontestasi, partisipasi, elit, basis sosial

ABSTRACT

Name : Jumari

Study Program: Sociology

Title : The Role of Elites and Social Basis of Democrat Party in Depok Regional Head Election in 2010

Elites and social basis are the two important elements in political parties but they have different “fate”. Democracy should be able to give both roles in the constetation arena equally. The constetation arena are general election and regional head election. In fact it is not totally successful. “The trap” of procedural democracy that political party’s elites have carried out has sinked the role of social basis election than has strengthened substantive democracy.

By applying qualitative methods, the research focuses on the role of elites and social basis of Democrat Party in the Depok Regional Head Election in 2010. It found finally that the elites and social basis of Democracy Party in the Depok Regional Head Election in 2010 have contradictive roles. It relates to the unsolved conflicts that Democrat Party had proposed. The elites had made decision of supporting Badrul Kamal and Agus Suprianto in the regional head election while the social basis required Democrat Party to support its own cadre, i.e. Agung Witjaksono, the Depok City Democrat Party Branch Leadership Board. The coalition that the party’s elites and the candidates had decided had to face to face to its social basis in the branch level, i.e. “the three-mercy-star volunteers”. Moreover, there was the coalition of the party’s social basis versus that of its elites.

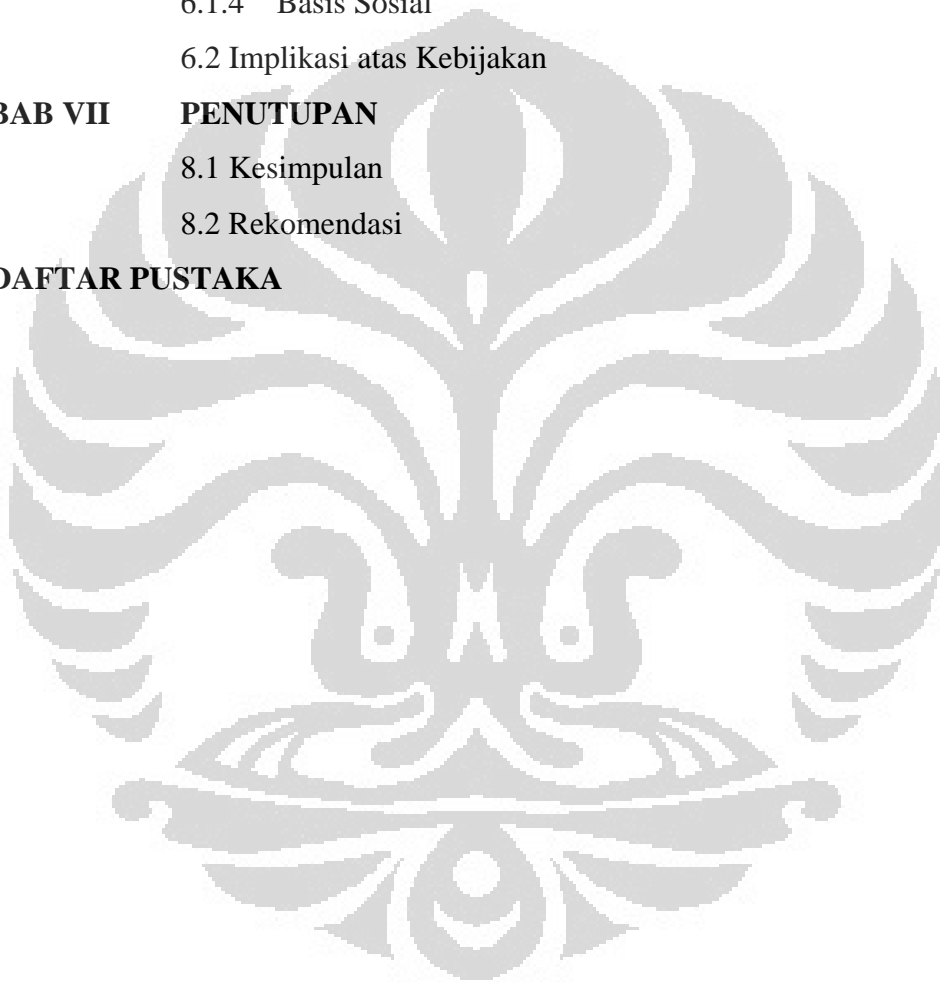
Keywords : democracy, contestation, participation, elites, social basis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Pembatasan Masalah	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kerangka Teoritis	18
2.2.1 Teori Elit	18
2.2.2 Teori Koalisi	25
2.2.3 Teori Partisipasi	29
2.2.4 Konsep Basis Sosial	33
2.3 Kerangka Alur Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian dan Posisi Peneliti	43
3.2 Informan	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46

3.4 Teknik Analisa Data	49
3.5 Strategi Validitas Data	50
3.6 Keterbatasan Peneliti	50
BAB IV	KOTA DEPOK DALAM BINGKAI SOSIAL DAN POLITIK
4.1 Profil Kota Depok	52
4.2 Kondisi Geografis dan Demografis	55
4.2.1 Kondisi Geografis	55
4.2.2 Kondisi Demografis	56
4.3 Kondisi Ketenaga Kerjaan	58
4.4 Kondisi Pendidikan	59
4.5 Kondisi Keberagamaan	59
4.6 Struktur Masyarakat Kota Depok	61
4.7 Dinamika Politik Kota Depok	63
BAB V	KONTESTASI ELIT DAN BASIS SOSIAL PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK
5.1 Gambaran Umum Partai Demokrat	67
5.2 Pemilukada Kota Depok Dan Dinamikanya	70
5.3 Peran Elit Dan Basis Sosial Partai Demokrat Dalam Proses Penentuan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	77
5.3.1 Hubungan Elit Daerah dan Elit Pusat Partai Demokrat	77
5.3.2 Hubungan Elit dan Basis Sosial Partai Demokrat	83
5.3.3 Resistensi Pembantu Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Dalam Pemilukada Kota Depok	90
5.4 Partai Demokrat dan koalisi dalam pemilukada Kota Depok	113
5.5 Strategi Elit Dan Basis Sosial Partai Demokrat Dalam Memenangkan Pemilukada Kota Depok.	119

BAB VI	ANALISA TEORITIK PERAN ELIT DAN BASIS SOSIAL PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010	
	7.1 Implikasi Teoritik	122
	6.1.1 Teori Koalisi	122
	6.1.2 Teori Partisipasi	129
	6.1.3 Teori Elit	132
	6.1.4 Basis Sosial	134
	6.2 Implikasi atas Kebijakan	136
BAB VII	PENUTUPAN	
	8.1 Kesimpulan	138
	8.2 Rekomendasi	141
DAFTAR PUSTAKA		142

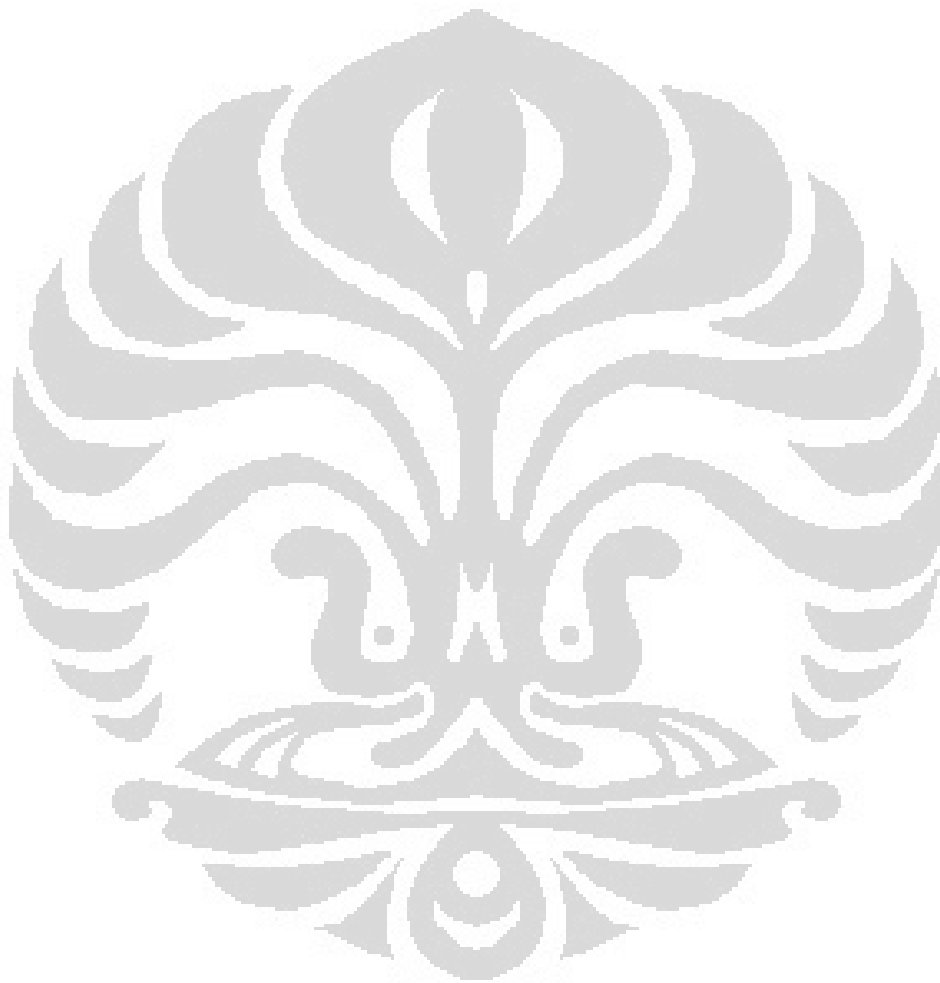


Daftar Tabel

1. Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu 2009 Partai-partai Koalisi.....	5
2. Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu 2009 Partai-partai Non Koalisi.....	6
3. Suara Golput Sepanjang Pemilu Di Indonesia.....	36
4. Daftar informan.....	45
5. Jumlah kecamatan, kelurahan, RW, RT Kota Depok tahun 2010.....	55
6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	57
7. Presentase penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di kota Depok 2010.....	58
8. Persentase penduduk 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki dan jenis kelamin di Kota Depok , 2010.....	59
9. Penduduk menurut agama yang dianut di Kota Depok tahun 2010.....	60
10. Banyaknya tempat ibadah menurut jenis agama di Kota Depok tahun 2010.....	61
11. Perolehan suara dan kursi pemilu di Kota Depok Tahun 1999-2009.....	63
12. Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik di Kota Depok Tahun 2009.....	72
13. Perolehan Suara Sepuluh (10) Partai Politik Per-Kecamatan Kota Depok Pada pemilu tahun2009.....	99
14. Perolehan Suara Per-Kecamatan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto Pada Pemilu Tahun 2009.....	101
15. Tabel Perolehan Suara Per-Kecamatan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad Pada Pemilu Tahun 2009.....	103
16. Perbandingan perolehan suara per-kecamatan calon pasangan Badrul Kamal & Agus Supriyanto dan Calon pasangan Nur Mahmudi Ismail & Idris Abdul Shomad pada pemilu 2009 dan pemilukada 2010.....	110
17. Perolehan Suara Per-Kecamatan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Dalam Pemilukada Tahun 2010.....	112

Daftar Bagan :

1. Kerangka alur berpikir.....42



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem politik, bisa dikatakan demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Menurut definisi ini, demokrasi mengandung dua dimensi yaitu, kontes (kontestasi) dan partisipasi, yang menurut Robert Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau poliarki. (Samuel P. Huntington, 1995, h. 5-6).

Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye pemilihan. Sehingga, secara jelas Huntington (1995) dengan mengikuti tradisi Schumpeterian mensyaratkan sistem pemerintahan yang demokratis harus memenuhi tiga syarat pokok, yaitu :

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu dan atau kelompok (terutama parpol) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan.
2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilu secara reguler dan adil, tak satupun kelompok dikecualikan.
3. Kebebasan sipil dan politik (berbicara, pers, berserikat) yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Tujuan pemilihan umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.

Salah satu fungsi utama pemilu dalam negara demokrasi tidak lain adalah untuk menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional. Kepemimpinan nasional yang dimaksud disini menyangkut juga kepemimpinan kolektif yang direfleksikan dalam diri para wakil rakyat. Oleh sebab itu, dalam bentuk dan jenis sistem pemerintahan apapun, pemilu menduduki posisi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut.

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan, negara manapun sering menjadikan pemilihan umum sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Pemilihan umum secara langsung bagi calon anggota legislatif dan partai politik, diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik, menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, baik pusat maupun lokal, memperkuat dan meningkatkan seleksi calon anggota legislatif karena makin terbukanya peluang bagi calon tersebut yang berasal dari bawah atau daerah. Kecenderungan tidak sehat yang berlangsung selama ini adalah elit politik nasional hanya berasal dari dan beredar di Jakarta saja, sehingga hampir tidak ada peluang bagi para elit politik daerah untuk mengembangkan kariernya menjadi elit politik nasional, sehingga terkesan tidak mempunyai banyak pilihan ketika memutuskan siapa yang pantas menjadi elit politik nasional.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, akan lebih meningkatkan kualitas partisipasi rakyat di satu pihak dan keterwakilan elit di lain pihak, karena masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang di anggap pantas dan layak yang akan menjadi calon anggota legislatif dan partai politik untuk membawa aspirasi masyarakatnya, baik di pusat maupun di daerah. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan sederajat. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaan merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu.

Partai politik¹ merupakan pilar utama dalam demokrasi. Sebab, tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung secara demokratis tanpa adanya partai politik. Dewasa ini, partai politik berperan sebagai suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu; memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing dan memunculkan kepemimpinan politik menjadi suatu keharusan (Ichlasul Amal (ed), 1988). Partai politik telah menjadi gambaran umum dalam kehidupan politik sekarang. Partai politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.

Namun, pada era multipartai seperti sekarang ini, politik kepartaian di Indonesia memperlihatkan satu fenomena yang tampak bertolak belakang, dimana partai-partai politik bersaing sengit untuk memperebutkan suara, namun sekaligus bekerjasama. Menjelang pemilu 2009 lalu, dengan mudah kita melihat betapa partai-partai politik itu saling bersaing keras dalam pemilu legislatif maupun presiden. Mereka menikmati kebebasan untuk menarik simpati para pemilih, dan pemilih tidak lagi di intimidasi dalam menentukan pilihannya (Kuskrido Ambardi, 2009).

Sehingga, lebih jauh, Kuskrido Ambardi (2009) berkesimpulan bahwa sejak era reformasi, partai-partai di Indonesia telah menganut sistem kepartaian yang mirip kartel. Ada lima ciri yang di sampaikan yaitu : *pertama*, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; *kedua*, sikap permisif dalam pembentukan koalisi; *ketiga*, tidak adanya oposisi; *keempat*, hasil-

¹ Pengertian partai politik menurut UU no 2 tahun 2011 tentang partai politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengertian partai politik sebagaimana ditulis dalam *The Hand Book of Political Sociology* (2005), Weber (1978:939) mendefinisikan Partai politik adalah kelompok perlawanan yang berjuang untuk pengendalian politik dalam tubuh perusahaan (pemerintah). Neumann, (1956:395) mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi masyarakat yang aktif dan bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain atau orang yang memiliki pandangan yang beragam. Schlesinger (1968:428), partai politik adalah sebuah "politik organisasi yang aktif dan efektif terlibat dalam kompetisi untuk pemilu". Sartori (1976:64), mendefinisikan partai politik adalah "setiap kelompok politik yang ikut pemilu dan mampu menempatkan calonnya dalam pemilu itu untuk jabatan publik".

hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; *kelima*, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Untuk poin ke lima Kuskrido menambahkan bahwa hal itu berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Dalam politik, istilah tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi mungkin ada benarnya. Ketika memasuki proses pembentukan pemerintahan, persaingan politik tersebut tampak berhenti. Seolah mereka mengabaikan hasil-hasil pemilu yang baru saja berlalu dalam membentuk pemerintahan yang inklusif dengan melibatkan semua pihak. Dengan mengambil nama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (Kuskrido Ambardi, 2009, 2), koalisi itu secara nasional terbentuk dan kemudian terlembagakan dalam wadah yang diberi nama Setgab (Sekretariat gabungan)².

Dalam beberapa kali pemilu pasca reformasi, istilah koalisi dan oposisi menjadi tren dalam perbincangan politik kita. Dalam konteks nasional, partai pemenang pemilu biasanya akan mengajak partai-partai lain untuk berkoalisi

² *Setgab merupakan wadah bagi partai-partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono yang terdiri dari Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS dan Partai Golkar untuk “mengkompromikan” kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama oleh pemerintah. Setgab dibentuk pada 7 Mei 2009 lalu di rumah Presiden SBY Puri Cikeas, Bogor. Sedangkan tugas serta tujuan di bentuknya Setgab adalah pertama, untuk memperkukuh koalisi dan mengamankan pemerintahan SBY hingga 2014. Kedua, membahas dan menyepakati isu dan agenda strategis yang akan dilaksanakan bersama oleh seluruh partai koalisi, terfokus pada upaya membina demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pola koordinasi dalam Setgab adalah bahwa rapat tertinggi dipimpin oleh ketua Setgab (presiden) untuk membahas gagasan strategis, kemudian rapat kebijakan dipimpin oleh ketua umum partai secara bergiliran dan dihadiri oleh ketua fraksi DPR, pimpinan partai dan menteri, serta rapat operasional yang dipimpin oleh Sekretaris Setgab. Sedangkan beberapa kesepakatan yang sudah dibuat oleh Setgab adalah pertama, mengangkat Aburizal Bakrie sebagai ketua harian Setgab, (pasca gonjangan hak angket mafia pajak di DPR, struktur setgab mengalami perubahan ketua harian ditiadakan diganti wakil ketua dan tetap di pegang oleh Abu Rizal Bakrie). Kedua, enam parpol pendukung koalisi sepakat tidak menggunakan hak menyatakan pendapat dalam menyelesaikan skandal Bank Century. Ketiga, menanggapi isu “reshuffle” kabinet dan pertentangan usulan hak angket mafia pajak di parlemen, parpol pendukung koalisi sepakat tidak berkonflik untuk urusan internal setgab. Keempat, pimpinan rapat digilir para ketua umum partai. Kelima, SBY memimpin rapat setiap tiga bulan sekali.*

membangun pemerintahan bersama. Sekretariat gabungan (Setgab), dibentuk sebagai respon atas format koalisi periode pertama pemerintahan SBY-JK (2004-2009). Partai-partai yang tergabung dalam setgab bersepakat memperkuat dan mengefektifkan koalisi sehingga pemerintah dapat makin banyak berbuat untuk kepentingan rakyat. Selain itu, mereka bersepakat membina koalisi komprehensif, baik di pemerintahan maupun diparlemen, tanpa kehilangan identitas dan eksistensi politik masing-masing³. Walaupun dalam perkembangan terkini, Setgab tak mampu berjalan sebagaimana format ideal pada awal pertama kali dibuat, menguatnya indikasi bahwa dalam tubuh Setgab berusaha saling mendominasi satu sama lain hingga akhirnya meledaklah saat pembentukan hak angket mafia pajak di DPR beberapa waktu lalu.

Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi, karena koalisi yang dibangun Setgab, hanyalah koalisi pragmatis, hanya hitung-hitungan jumlah suara atau jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik, koalisi yang dibuat tidak berbasis pada platform dan persamaan ideologi serta didukung oleh basis sosial yang kuat dari masing-masing partai politik. Koalisi dibangun hanya untuk menyelamatkan pemerintahan SBY sampai 2014, dengan “imbalan” kursi menteri atau jabatan eksekutif lain yang ditawarkan bagi partai-partai yang tergabung dalam koalisi (Setgab). Berikut tabel komposisi perolehan suara dan kursi partai-partai yang tergabung dalam Setgab.

Tabel 1:

Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu 2009 Partai-partai Koalisi

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Dalam %	Jumlah Kursi DPR
1	Partai Demokrat	21.703.137	20,85	148 kursi
2	Partai Golkar	15.037.757	14,45	106 kursi
3	PKS	8.206.955	7,88	57 kursi
4	PAN	6.254.580	6,01	46 kursi
5	PPP	5.533.214	5,32	38 kursi
6	PKB	5.146.122	4,94	28 kursi
Jumlah		61.881.765	59,49%	423 kursi

Sumber : KPU

³ www.batavia.co.id, diakses tanggal 25 Maret 2011, pukul 14.35

Sementara itu, oposisi yang digalang PDIP pasca tidak terpilihnya Megawati Soekarno Putri pada pilpres 2004, kemudian ditegaskan kembali pasca kekalahan kedua pada pilpres 2009 lalu, meski masih perlu perdebatkan dan dikaji lebih mendalam. Apakah oposisi yang dilakukan PDIP murni sebagai upaya *checks and balances* bagi pemerintahan SBY, atau karena “sakit hati” setelah Megawati Soekarno Putri secara “tragis” dikalahkan dua kali berturut-turut dalam pilpres tahun 2004 dan pilpres tahun 2009 oleh SBY yang nota bene adalah bekas “anak buahnya” dalam kabinet gotong royong pada tahun 1999-2004. Sementara itu perolehan suara dan jumlah kursi partai yang tidak tergabung dalam koalisi (setgab) sebagai berikut.

Tabel 2 :

Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu 2009 Partai-partai Non Koalisi

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Dalam %	Kursi di DPR
1	PDIP	14.572.223	14,01	106
2	Partai Gerindra	4.664.213	4,48	26
3	Partai Hanura	3.918.531	3,37	17
Jumlah		23.154.967	21,86%	149

Sumber : KPU

Menurut Kuskrindo Ambardi (2009) ada tiga tafsir mengapa PDIP menjadi partai opsi dalam pemerintahan SBY, *pertama* karena faktor psikologis semata, dimana tidak harmoninya hubungan pribadi antara SBY dan Megawati pada tahun 2003 saat SBY menjabat sebagai Menkopolkam. Tafsir *kedua* karena berakhirnya koalisi kebangsaan⁴. Tiga partai besar saat itu, PDIP, PPP dan Golkar yang menjadi tulang punggung dalam koalisi tampak sudah pecah sebelum terbentuknya kabinet Indonesia bersatu. Dimana PPP dan Golkar membonceng kendaraan baru yang dibawa SBY. Tafsir yang *ketiga*, keputusan PDIP untuk

⁴ Saat pemilihan pimpinan MPR/ DPR pasca pemilu tahun 2004, terjadi dua koalisi besar dalam parlemen yaitu koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan. Koalisi kerakyatan di motori oleh PKS, Demokrat, PAN dan partai-partai kecil lainnya. Sedangkan Koalisi kebangsaan di motori oleh tiga partai besar, Golkar, PDIP dan PPP.

tidak bergabung dengan pemerintahan SBY karena kemauan para pemimpinnya untuk memelihara gagasan tentang oposisi.

Selanjutnya, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) menjadi arena kontestasi berikutnya bagi partai-partai politik setelah pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Dari beberapa pemilukada yang sudah dilakukan, pragmatisme partai-partai politik dalam mengusung masing-masing calonnya sangat kasat mata. Ditingkat nasional beroposisi, ditingkat daerah bisa saja berbeda, berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah. Secara umum, peran elit partai politik begitu dominan. Partai politik tidak lagi menjadikan ideologi dan basis sosialnya sebagai bahan pertimbangan utama dalam melakukan koalisi. Yang dikejar hanyalah kemenangan atas calon yang diusungnya. Padahal, basis sosial partai politik merupakan elemen terpenting bagi partai politik. Fenomena ini menunjukkan betapa ada kesenjangan antara kepentingan yang diperjuangkan pada tataran nasional dengan tingkat lokal.

Sehingga konflik seolah menjadi pemandangan yang biasa dalam penyelenggaraan pemilukada. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Susanti (2001) dalam tesisnya, bahwa konflik yang terjadi dalam pemilihan bupati Banjarnegara tahun 2001 disebabkan adanya friksi di internal partai (PDIP) serta campur tangan dari para pemodal (elit) atas calon yang diusung oleh partai. Sehingga independensi partai digantung oleh para pemodalnya sehingga mengesampingkan peran basis sosialnya.

Begitu juga seperti yang dituturkan oleh Roy Tumpal Pakpahan (2005) dalam tesisnya yang meneliti tentang konflik antara elit pusat dan daerah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung periode 2003-2008. Dimana konflik terjadi disebabkan karena perbedaan calon yang diusung dalam pemilukada antara pusat dan daerah serta terjadinya konflik diinternal partai (PDIP) daerah provinsi Lampung dalam menentukan calon, dimana elit pusat tidak mengakomodir aspirasi dari daerah.

2. Permasalahan

Pemilihan umum kepala daerah (selanjutnya ditulis pemilukada), berdasarkan data depdagri sepanjang tahun 2010 lalu, telah dilaksanakan

sebanyak 222 kali, yang terdiri dari tujuh pemilihan umum kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 180 pemilukada untuk memilih bupati dan wakil bupati, dan 35 pemilukada untuk memilih wali kota dan wakil walikota)⁵.

Setelah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada 2010, pemilukada merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan secara langsung atas presiden dan wakil presiden serta kepala-kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah maka kini, sekurang-kurangnya secara prosedural, kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui pemilukada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD.

Kendati demikian, berbagai kecenderungan proses dan hasil pemilukada, tetap merupakan bahan kajian yang menarik. Kecenderungan proses pencalonan dan koalisi antar partai dalam mengajukan kandidat atau pasangan calon adalah salah satu fenomena paling menarik di balik penyelenggaraan pemilukada di lebih dari 222 daerah di Indonesia. Daya tarik itu tidak hanya terletak pada kecenderungan yang berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional, melainkan juga pada saat perekrutan calon kepala daerah dan “pola” koalisi antar partai yang cenderung berbeda dengan hasil pemilu legislatif. Partai-partai yang secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain bahkan bisa saling berkoalisi dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pemilukada.

Aspirasi rakyat, basis sosial partai belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Regulasi pemilukada mengatur bahwa proses penyaringan bakal calon oleh partai atau gabungan partai politik dilakukan secara “demokratis dan transparan”. Dalam penjelasan aturan tersebut ditegaskan bahwa selain sesuai dengan mekanisme internal partai atau gabungan partai, yang dimaksud dengan proses pencalonan yang “demokratis dan transparan” adalah

⁵ <http://wartapedia.com/politik/pilkada/2583-pemilukada--tahun-2010-pilkada-di-222-daerah-lancar.html>

terbukanya proses tersebut dari “akses publik”. Namun demikian dalam realitasnya, hampir semua proses pencalonan pemilukada yang telah berlangsung selama ini mengabaikan urgensi akses publik dan keterlibatan basis sosial partai.

Pada umumnya masyarakat di daerah pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai atau gabungan partai politik. Sejumlah tokoh masyarakat di daerah bahkan sama sekali tidak tahu, mengapa suatu partai tertentu memilih untuk mencalonkan tokoh tertentu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sebagaimana kecenderungan yang terjadi dalam pemilu legislatif 2009, masyarakat pada umumnya merasa di *fait accompli* oleh partai atau gabungan partai dalam proses pencalonan pasangan kandidat dalam pemilukada.

Dampak lebih jauh dari kecenderungan pencalonan seperti ini adalah berlangsungnya proses seleksi calon yang elitis. Hak politik masyarakat atau basis sosial partai politik untuk turut berpartisipasi dalam proses pencalonan diabaikan karena segenap prosesnya cenderung berlangsung tertutup dan elitis. Hampir tidak ada akses bagi masyarakat untuk sekadar mengetahui, mengapa partai atau gabungan partai tertentu cenderung mencalonkan tokoh tertentu ketimbang yang lain.

Menurut Sri Budi Eko Wardani (2005), berkaca pada kasus-kasus koalisi yang pernah terjadi ditataran nasional, hingga saat ini, koalisi partai politik dalam pemilukada memiliki beberapa kekhasan yang patut dicatat. Pertama, secara kuantitas, formasi koalisi dalam pemilukada bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya pemilihan yang dihadapi partai politik. Kedua, kebutuhan pemetaan tersebut memungkinkan dewan pimpinan pusat partai politik untuk memberikan kebebasan relatif kepada pengurus daerahnya dalam memutuskan pembentukan koalisi untuk mengajukan calon kepala daerah. Ketiga, kecenderungan pola koalisi partai politik dalam pemilukada sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan.

Pemilukada Kota Depok tahun 2010 menghasilkan fenomena yang menarik untuk dikaji. Partai Demokrat, sebagai partai pemenang pada pemilu tahun 2009 di Kota Depok justru tidak mengajukan calon dari internal partai (kader). Partai Demokrat berkoalisi dengan partai-partai besar lainnya yaitu

Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS dan PDP, dengan menguasai 34 kursi DPRD justru mengusung pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto. Seharusnya koalisi besar ini dengan mudah bisa memenangkan pemilu, namun kenyataannya tidak. Koalisi besar yang galang oleh pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto tidak berjalan dengan sukses. Adanya konflik internal partai-partai pendukung koalisi menjadikan koalisi yang dibangun justru rapuh dan pada akhirnya calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto dikalahkan oleh calon *incumbent* yang diusung oleh PKS dan PAN. Padahal, secara hitungan perolehan kursi di DPRD kedua partai ini hanya mendapatkan 16 kursi, jauh dibawah calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto.

Bagaimana peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dan partai-partai koalisi lainnya dalam pemilu Kota Depok, sehingga menyebabkan calon pasangan yang diusungnya kalah. Fenomena elit dan basis sosial partai politik dalam pemilu menjadi menarik, bagaimana peran dan interaksi antara keduanya dalam penentuan calon kepala daerah dan koalisi saat pengusung calon dalam pemilu Kota Depok.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan permasalahan di atas, pertanyaan utama yang ingin di jawab dari penelitian ini adalah “*Bagaimana peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilu Kota Depok tahun 2010?*” yang kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam proses penentuan calon walikota dan wakil walikota?
2. Bagaimana elit Partai Demokrat membangun koalisi dengan partai lain?
3. Bagaimana strategi elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu Kota Depok?

4. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan bagaimana peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam proses penentuan calon walikota dan wakil walikota

2. Menggambarkan bagaimana elit Partai Demokrat membangun koalisi dengan partai lain.
4. Menggambarkan bagaimana strategi elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu Kota Depok

5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini :

1. Penelitian ini akan menambah pemahaman peneliti dan sekaligus sebagai informasi akademis terkait dengan hubungan yang terjadi antara elit partai dan basis sosialnya. Karena selama ini peran basis sosial partai politik dalam kebijakan-kebijakan strategis partai sering “terabaikan”.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan khususnya para elit partai dalam melakukan komunikasi dengan basis sosialnya.
3. Selanjutnya, dalam bidang sosiologi politik, studi ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi dan kerangka pemikiran untuk studi-studi berikutnya yang akan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu sosiologi secara umum. Dan bagi partai-partai politik, diharapkan studi ini dapat memberikan gambaran, pemetaan serta saran dalam menentukan arah kebijakan partai kedepan.

6. Pembatasan Masalah

Dinamika partai politik berkembang begitu cepat. Pemilu kemarin menjadi partai pemenang, belum tentu pada pemilu berikutnya. Volatilitas⁶ menjadi tren baru bagi para pemilih (konstituen). Ada beragam sebab mengapa volatilitas muncul. Bisa karena konflik internal partai, karena kepentingan konstituen terabaikan atau karena sebab yang lainnya. Volatilitas bisa menjadi semacam hukuman bagi partai politik dari konstituen (basis sosial partai).

⁶ Volatilitas adalah pergeseran kesetiaan pemilih dari satu partai ke partai yang lain. Istilah volatilitas dikembangkan oleh Scott Mainwaring. Indra Ismawan, *Money Politics : Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999) hal, 24.

Oleh karena itu studi ini ingin menganalisa dan mengetahui lebih jauh bagaimana peran antara elit partai demokrat dengan basis sosialnya dalam penentuan koalisi maupun calon yang akan diusung dalam Pemilu Kota Depok tahun 2010.

7. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam beberapa bab yang mencakup beberapa pembahasan yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan pembatasan masalah.

Bab II yaitu tinjauan pustaka yang memuat kajian terdahulu, kerangka teoritis dan alur berpikir.

Bab III yaitu metodologi yang memuat pendekatan penelitian dan posisi peneliti, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu Kota Depok dalam bingkai sosial, ekonomi dan politik yang memuat profil Kota Depok, struktur masyarakat Kota Depok, dinamika sosial, ekonomi dan politik Kota Depok.

Bab V yaitu kontestasi elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilu Kota Depok yang memuat gambaran umum Partai Demokrat, pemilu Kota Depok dan dinamikanya, peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam proses penentuan calon walikota dan wakil walikota, Partai Demokrat dan koalisi dalam pemilu Kota Depok, strategi elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu Kota Depok.

Bab VI yaitu analisa teoritik peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilu kota Depok tahun 2010.

Bab VII yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian yang penulis anggap relevan atau mendekati dengan topik yang akan penulis kaji. *Pertama*, tesis dari Yohanis Tandisosang tentang Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012), Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional UI 2008. *Kedua*, tesis dari Sri Budi Eko Wardani tentang Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung : Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006, Ilmu Politik FISIP UI 2007. *Ketiga*, tesis dari Yuliani Widianingsih tentang Proses Penguatan Demokrasi Lokal : Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Pasca Reformasi, Sosiologi FISIP UI 2007. *Keempat*, tesis dari George Towar iqbal Tawakkal tentang Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih, Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Demak 2009, Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Pertama, tesis dari Yohanis Tandisosang tentang *Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)*. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan pemilukada selama ini menurutnya telah mengalami beberapa penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan yaitu dengan makin kencangnya politik oligarki. Dimana kepentingan partai, bahkan kepentingan segelintir elit partai seringkali memanipulasi kepentingan rakyat. Hal ini, lanjutnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, demokratis, luber dan jurdil yang merupakan wujud dari semangat pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi ditingkat daerah. Dan salah satu tahap yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilukada menurutnya adalah proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik. Pertanyaan yang diajukannya adalah *pertama*, sejauhmana partai politik yang merupakan pintu satu-satunya dalam pengajuan calon telah membuka ruang bagi aspirasi calon dari luar partai politik?

Karena ketentuan perundang-undangan mengharuskan partai membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. *Kedua*, apakah partai politik akan menjamin terlaksanannya mekanisme yang demokratis dan transparan, melaksanakan konvensi penjaringan bakal calon yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. *Ketiga*, sejauhmana partai politik memperhatikan pendapat dan masyarakat dalam proses penetapan calon.

Sampel dari penelitiannya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Golongan Karya (Golkar). Bagaimana partai-partai ini melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Dengan menggunakan konsep dari Gabriel Almond dan Bingham Powell tentang prosedur rekrutmen politik diperoleh hasil bahwa secara umum, partai-partai politik cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka daripada model rekrutmen tertutup. Dimana sistem seleksi melibatkan semua unsur partai misalnya melalui konvensi atau yang lainnya dan lebih memperhatikan kinerja bakal calon yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman jabatan maupun pengalaman organisasi. Namun, lanjutnya hal itu belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat misalnya masih terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai *track record* bakal calon seperti agama, suku, putra daerah dan factor latar belakang social ekonomi calon. Lebih lanjut, urainya, bahwa factor-faktor yang berpengaruh cukup kuat dan signifikan dalam rekrutmen bakal calon adalah factor kinerja, dukungan dan ikatan primordial. Artinya, factor-faktor tersebut menjadi aspek yang sangat peting bagi partai dalam menetapkan calonnya. Kinerja calon yang meliputi kecakapan yang ditunjang dengan tingkat pendidikan, keahlian, pengalaman dan kepribadian. Disamping kuatnya dukungan dari elemen-elemen masyarakat terhadap calon tertentu. Dan terakhir adalah kuatnya sentimen primordial dengan calon dengan tujuan agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat pemilih.

Kedua, tesis dari Sri Budi Eko Wardani tentang *Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung : Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006, Ilmu Politik FISIP UI 2007*. Dalam tesisnya, Sri Budi

mencoba mengurai tentang kecenderungan partai-partai politik berkoalisi dalam pilkada. Menurutnya, koalisi dalam pilkada memiliki kekhasan tersendiri, *pertama*, secara kuantitas, formasi koalisi dalam pilkada bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya pemilihan yang dihadapi partai politik. *Kedua*, kebutuhan pemetaan tersebut memungkinkan dewan pimpinan pusat partai politik untuk memberikan kebebasan relatif kepada pengurus daerahnya dalam memutuskan pembentukan koalisi untuk mengajukan calon kepala daerah. *Ketiga*, kecenderungan pola koalisi partai politik dalam pilkada sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan.

Dengan meneliti pilkada Gubernur Banten, Sri Budi mengajukan tiga pertanyaan pokok yaitu, pola-pola koalisi apa saja yang terbentuk dalam pilkada langsung, bagaimana proses pembentukan koalisi partai politik untuk mengukung pasangan calon kepala daerah Banten dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan koalisi dalam pilkada Banten. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Sri Budi menggunakan tiga kerangka teori yaitu teori koalisi politik dari William Riker yaitu teori *Minimal Winning Coalitions*, yang menekankan prinsip ukuran dalam membangun koalisi dan Robert Axelrod yang menekankan prinsip kedekatan preferensi kebijakan (*Minimal Connected Winning*). *Kedua*, teori pilihan rasional untuk melihat kontestasi pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para aktor untuk berkoalisi. *Ketiga*, teori oligarki dari Robert Michels. Teori oligarki digunakan untuk melihat pengaruh struktur partai dalam mempengaruhi pembentukan koalisi partai.

Ada lima faktor yang diuji dalam tesis Sri Budi untuk melihat pengaruhnya dalam pilkada Banten. *Pertama*, pengaruh kekuatan politik di DPRD, *kedua*, pertimbangan platform partai dalam pembentukan koalisi, apakah bersifat ideologis atau pragmatis, *ketiga*, mekanisme penjangkaran oleh internal partai, *keempat*, bagaimana peran dewan pengurus pusat (DPP) dalam penentuan calon dan *kelima*, peran figur bakal calon kepala daerah. Kesimpulan dari lima faktor yang diuji tersebut adalah kekuatan politik di DPRD terhadap pilkada Banten memiliki pengaruh sedang. Berikutnya, pertimbangan platform dalam berkoalisi memiliki pengaruh yang rendah, karena pada dasarnya partai dapat

membangun koalisi dengan partai manapun tergantung pemaksimalan kepentingan yang dapat diraih. Mekanisme penjangkaran oleh partai, dan peran dewan pengurus pusat (DPP) dalam penentuan calon serta peran figur bakal calon, ketiganya memiliki pengaruh yang cukup tinggi.

Ketiga, tesis dari Yuliani Widianingsih tentang *Proses Penguatan Demokrasi Lokal : Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Pasca Reformasi*. Tesis Yuliani di latarbelakangi oleh pengalaman Kota Depok dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca reformasi, baik yang diselenggarakan melalui perwakilan (dipilih oleh DPRD Kota Depok) maupun secara langsung (pemilihan langsung oleh rakyat). Dari kedua pengalaman tersebut menurutnya terlihat bahwa proses penguatan demokrasi belum memberi kekuasaan kepada rakyat dan cenderung banyak mengalami hambatan terutama dari perilaku para elit partai politik yang belum memperlihatkan perubahan secara signifikan, dimana pelibatan rakyat sebagai basis sosial partai politik belum secara penuh di dalam proses sirkulasi kekuasaan para pemimpinnya.

Yulianingsih mengajukan tiga pertanyaan atas tesisnya, *pertama*, bagaimana proses penguatan demokrasi berlangsung di Kota Depok di dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca reformasi, *kedua*, bagaimana peran DPRD, KPUD dan partai-partai politik maupun aktivis LSM dalam proses pemilihan kepala daerah baik melalui perwakilan maupun secara langsung dan *ketiga*, bagaimana strategi dan konsolidasi partai-partai dalam pemilihan kepala daerah baik melalui perwakilan maupun secara langsung. Dengan menggunakan konsep demokrasi, teori elit, teori partisipasi politik, teori konflik, dan konsep civil society, Yulianingsih mencari jawaban atas tiga pertanyaan pokok itu.

Dari hasil penelitiannya, memperlihatkan implikasi teori yang menunjukkan bahwa teori J. Schumpeter mengenai proses demokrasi terbukti dapat memberi sumbangan pada kasus pemilihan kepala daerah Kota Depok dimana proses penguatan demokrasi yang merupakan alat perjuangan kompetitif bagi individu untuk sampai pada keputusan politik. Hasil penelitiannya juga membuktikan teori Samuel P. Huntington bahwa partisipasi politik yang ditunjukkan oleh rakyat, sebagai basis social partai politik, kelompok, maupun institusi, dapat mempengaruhi seleksi pemilihan. Hal ini menurutnya, dapat dilihat melalui peran

DPRD, KPUD, Pemda maupun LSM di dalam proses pemilihan. Namun, lanjutnya, dalam beberapa kasus, tidak semua implikasi teori ini bisa dibuktikan. Dalam beberapa kasus menjawab pertanyaan penelitian terbukti peran DPRD, partai-partai politik, pemerintah daerah maupun rakyat, sebagai basis social partai politik memperlihatkan bahwa kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi seleksi pemilihan pejabat walikota masih diwarnai oleh aksi-aksi *money politics*. Hal ini, lanjut Yulianingsih semakin membuktikan bahwa didalam demokrasi lokal uang masih sangat berperan. Tindakan aktor maupun perilaku elit masih didominasi oleh konflik kepentingan sehingga membuat konstituen, basis social partai politik merasa kurang percaya terhadap partai, lembaga yang seharusnya bisa menjadi saluran politik rakyat. Dengan demikian, menurutnya, asumsi Huntington mengenai konsep partisipasi belum bisa menjelaskan kegiatan *money politic*.

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan strategi dan konsolidasi partai-partai politik didalam menjaring calon kepala daerah, nampaknya teori tersebut tidak memadai untuk menjelaskan model koalisi yang dibangun oleh partai-partai dalam menjaring calon kepala daerah. Lebih lanjut, Yulianingsih menemukan bahwa kekuatan figur masih menjadi model yang dominan dalam kemenangan calon kepala daerah.

Keempat, tesis dari George Towar iqbal Tawakkal tentang *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih, Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Demak 2009*. Penelitian George Towar dilatar belakangi oleh penerapan sistem pemilu 2009 yang berbeda dengan sistem pemilu yang telah dipakai pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Menurutnya, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sistem pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka, dengan penentuan kandidat peraih kursi yang telah diperoleh partainya, berdasar suara terbanyak. Sedangkan pada Pemilu-pemilu sebelumnya, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional yang berdasar nomor urut kandidat. Perubahan sistem pemilu Indonesia dari sistem proporsional menjadi sistem proporsional terbuka, lanjutnya, membawa perubahan perilaku para aktor dan memunculkan fenomena-fenomena baru yang

tidak dijumpai pada Pemilu-pemilu sebelumnya, terkait dengan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh para aktor.

Partai yang dijadikan sampel adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Temuan dari hasil penelitiannya adalah *pertama*, dari sisi dinamika partai politik sebelum tahapan kampanye pemilu, partai mengalami permasalahan konsolidasi internal. Partai berorientasi pada nomor urut dan berorientasi pada suara terbanyak. Beberapa partai memiliki mesin partai yang lengkap tetapi lebih banyak partai yang belum, serta sikap partai yang beragam dalam keterlibatan mobilisasi. *Kedua*, dari sisi calon legislatif yang berasal dari partai yang berorientasi nomor urut, dituntut untuk merubah strateginya. Calon legislatif dituntut untuk mobilisasi mandiri, sehingga, calon legislatif lebih memanfaatkan faktor di luar partai. *Ketiga*, dari sisi harmonisasi antara partai dan calon legislatif, tidak terjadi kerjasama yang baik dalam mobilisasi pemilih, partai cenderung lepas tangan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada calon legislatif. *Keempat*, bentuk-bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh calon legislatif secara mandiri. Bentuk mobilisasi terbagi menjadi dua kriteria, yakni berdasarkan hubungan emosional, dan bantuan-bantuan. Dari berbagai data yang kemudian dianalisa secara menyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa partai politik telah gagal melaksanakan peran organisasi politik.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk melihat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori elit, teori koalisi dan teori partisipasi dan konsep basis sosial. Teori dan konsep ini dipakai karena cukup relevan dan dianggap bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pilukada di Kota Depok 2010.

2.2.1 Teori Elit

Vilfredo Pareto (1848-1923) menggunakan kata elit untuk menjelaskan adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial (T.B. Bottomore, 1996). Pareto percaya bahwa dalam setiap

masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Lebih jauh, Pareto dalam Bottomore (1996) membagi kelas elit kedalam dua kelas yaitu *pertama*, elit yang memerintah (*governing elite*) yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. *Kedua*, elit yang tak memerintah (*non-governing elite*). Jadi menurutnya, dalam masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang di bagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.

Tak jauh berbeda dengan Pareto, Gaetano Mosca (1858-1941) memberikan gagasannya tentang elit bahwa dalam semua masyarakat selalu muncul dua kelas, yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang menguasai jumlahnya lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keistimewaan. Sedangkan kelas yang dikuasai jumlahnya lebih banyak, diperintah dan dikendalikan oleh kelas yang memerintah dengan cara yang pada masa sekarang ini kurang lebih legal diktatorial dan kejam (T.B. Bottomore, 1996). Mosca percaya, bahwa yang membedakan karakteristik elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kepercayaan dan orang-orang diluar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh penguasa baru. Kemudian, Bottomore (1996) menegaskan bahwa baik Pareto maupun Mosca, keduanya memusatkan kajiannya pada elit dalam artian kelompok-kelompok orang yang secara langsung menggunakan atau berada dalam posisi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan politik.

Skema konseptual yang telah diwariskan oleh Pareto dan Mosca mencakup gagasan-gagasan umum bahwa dalam setiap masyarakat ada dan

harus ada suatu minoritas yang menguasai anggota masyarakat yang lain. Minoritas itu adalah kelas politik atau elit yang memerintah yang terdiri dari mereka yang menduki jabatan-jabatan komando politik dan secara lebih tersamar, mereka yang dapat langsung mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Dalam perspektif Pareto maupun Mosca, elit menunjuk kepada suatu kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan mewakili sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat (Yusron, 2009).

Merujuk pada pengertian Pareto dan Mosca, dalam konteks politik, sebagaimana diuraikan oleh H.D. Lasswell dalam kajiannya pada *Hoover Institute* tentang elit politik, menurutnya elit politik terdiri dari para pemegang kekuasaan suatu lembaga politik (T.B. Bottomore, 1996). Merekalah kelompok kecil yang memegang peranan dan berpengaruh dalam penentuan kebijakan-kebijakan strategis partai.

Saat orde baru berkuasa, elit utama negeri ini adalah militer. Militer diberi peran dan kewenangan yang sangat besar dibidang sosial, politik dan ekonomi demi mempertahankan kekuasaan rezim orde baru. Militer ada diman-mana, dipemerintahan, diparlemen, dibadan-badan usaha milik negara, maupun di partai politik yang berkuasa saat itu, Golkar. Karena peran dan kewenangannya yang besar, militer dapat melakukan tindakan apa saja, tanpa takut melanggar hukum, sehingga banyak masyarakat sipil yang menjadi korbannya. Meskipun ada elit dari partai lain yaitu PDI dan PPP, namun elit kedua partai ini tidak memiliki peran. Karena PDI dan PPP ada, hanya sebagai “pajangan” atau pelengkap Golkar dalam pemilu, sehingga legitimasi kemenangan Golkar menjadi relatif lebih kuat. Sebab saat orde baru, pemenang pemilu sudah dapat dipastikan yaitu Golkar.

Setelah kekuasaan Soeharto dengan orde barunya jatuh, peran dan kekuasaan militer diperkecil dan digeser oleh kekuatan sipil. Militer didorong kembali kebarak. Sedikit demi sedikit peran politiknya dikurangi, bahkan sekarang hak politik militer sudah dicabut. Kewenangan utamanya sekarang adalah dibidang pertahanan, yaitu mempertahankan eksistensi negara dari gangguan, ancaman dan serangan negara lain⁷. Bukan dibidang sosial dan

⁷ Lihat UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

politik seperti dulu. Militer dilarang berpolitik praktis, konsekuensinya militer harus keluar dari parlemen, dominasi kekuasaan dalam lembaga eksekutif dikurangi, bahkan ditiadakan, tidak seperti dulu dimana jabatan Bupati, walikota, gubernur dan menteri di kuasai oleh mereka.

Kini, setelah militer, elit utama negeri ini adalah para elit (pemimpin) partai politik yang tentunya memiliki latar belakang yang lebih beragam. Reformasi yang menghasilkan kebebasan (demokrasi) memberi peran besar bagi partai politik untuk mengajukan calon pemimpin-pemimpin negeri ini melalui pemilu maupun pilukada. Kini elit-elit partai politik ada dimana-mana, dipemerintahan dan diparlemen. Hampir semua jabatan dipemerintahan, baik itu walikota, bupati, gubernur maupun menteri dipegang oleh kader partai.

Elit politik sering kali memainkan peran yang amat menentukan. Pernyataan elit politik bisa membius emosi dan pikiran konstituennya. Elit politik juga mampu menggerakkan kehidupan demokrasi pemerintahan. Selain itu elit politik juga mampu melakukan intervensi-intervensi terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Elit partai politik merupakan kelas penentu yang memiliki kemampuan tertentu dalam melakukan penggalangan massa untuk menjadi pendukung suatu partai politik.

Sistem demokrasi yang memberi peran besar bagi partai politik memang tidak salah, karena dinegara-negara maju dan sejahtera, partai politiklah yang silih berganti memerintah. Partai politik dijadikan wadah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa, seperti itulah mekanismenya. Seharusnya, kekuasaan dan wewenang yang besar itu, harus diikuti dengan tanggung jawab yang menyertainya, sehingga peran partai politik dipercayai oleh masyarakat.

Pemilu pertama setelah rezim Soeharto, melahirkan elit-elit baru dalam pentas politik nasional, lahirnya elit politik baru atau para wakil rakyat diharapkan akan mampu membawa kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya, selain itu para wakil rakyat ini menjadi representasi dari partai politik. Yang lebih jauh sebenarnya merupakan representasi rakyat yang ada di lembaga perwakilan rakyat. Hadirnya elit baru ini dimungkinkan karena

salah satu dari fungsi partai politik, yakni rekrutmen politik. Dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi atau mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.

Namun, dibalik kewenangan partai politik sebagai *agent* pensuplai calon-calon pemimpin negeri ini, seringkali elit partai terjebak dalam oligarki. Elit terlalu dominan dalam menentukan arah partai dan pengambilan kebijakan strategis partai. Baik ditingkat pusat (DPP), tingkat wilayah (DPW), maupun tingkat daerah (DPD). Hal ini tercermin misalnya dalam penentuan-penentuan calon legislatif (caleg) dalam pemilu 2009 lalu maupun dalam penentuan atau rekrutmen calon kepala daerah.

Pertarungan memperebutkan kursi parlemen melalui pemilu 2009 lalu tidak semata berdimensi kemampuan individual calon dan peranan tokoh yang tampil di daerah pemilihan bersangkutan, tetapi juga berhadapan dengan peranan elit partai dalam menentukan figur-figur yang akan ditawarkan kepada pemilih. Dengan pola kepartaian yang diikat oleh ketentuan skala nasional secara rentang organisasi, maka peranan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam menjalin komunikasi menjadi menentukan terhadap daftar calon legislator (caleg) yang nantinya disusun dan diajukan ke KPU/KPUD ataupun calon kepala daerah yang akan dicalonkan oleh partai tersebut dalam pemilukada.

Seharusnya desentralisasi partai dalam seleksi calon untuk mengisi jabatan organisasi partai itu sendiri dan pemerintahan secara luas, lebih dapat mengatasi kemungkinan terjadinya konflik internal di tubuh partai bersangkutan dibandingkan model sentralisasi. Pengurus pusat partai (elit partai) tidak dapat begitu saja sewenang-wenang untuk memveto usulan dari daerah, dan harus berdasarkan masukan yang disampaikan dari bawah. Hal ini sekaligus menjadi penting bagi proses demokratisasi bagi kehidupan partai tersebut.

Penyampaian pengumuman partai kepada publik baik saat awal rekrutmen, seleksi, mulai masuk tahap daftar calon sementara (DCS) hingga tahap penetapan daftar calon tetap (DCT), adalah tidak terlepas dari peranan elit di tingkat DPP, DPW dan DPD bersangkutan. Di beberapa partai, tentunya dapat ditemui mekanisme formal berdasarkan usulan pihak ranting dan cabang masing-masing, sebelum akhirnya ditetapkan oleh keputusan pengurus yang lebih hirarkhis secara organisasi.

Hal ini memang tidak bisa kita pungkiri. Berdasarkan pemahaman teori elit bahwa dalam kehidupan demokrasi sekalipun disetiap negara dan organisasi, selalu terdapat kelompok minoritas yang membuat kebijakan. Pareto membagi kelas dalam dua bagian, yaitu elit dan non elit yang melampaui jauh daripada sekedar pandangan determinisme ekonomi ala Karl Marx. Gagasan Pareto tentang elit dan non elit beranjak dari kemungkinan terjadinya suatu perubahan dikalangan elit (*elite circulation*)⁸. Hal yang pasti adalah kelas elit mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kehidupan suatu negara dan bahkan di lingkup organisasi yang menaunginya sekalipun. Pengaruh ini tidak saja disebabkan oleh *resources* yang berbeda dari elit dibandingkan non elit, tetapi juga terhadap apa yang dianggap perlu dilakukan oleh kelompok besar massa itu sendiri dan ditingkat negara sekalipun, yaitu terkait dengan cara-cara yang akan dilakukannya, Meskipun Mosca menyatakan, keharusan adanya dukungan massa bagi elit agar dapat *establish* dalam memerintah, tetapi tampaknya peranan yang sangat menentukan dari elit tetap penting diperhatikan secara cermat.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pemilukada sebagai praktik demokrasi ditingkat lokal dikuasai oleh sekelompok elit pragmatis. Dampaknya, pemilukada dan demokrasi di Indonesia terjebak dalam oligarki yang dipresentasikan oleh partai politik, negara, dan pasar. Pengaruh oligarki terindikasi dari sejumlah fenomena dalam pemilukada, yaitu proses pemilukada kerap dimanfaatkan para elit partai, pemilukada banyak

⁸ Vilfredo Pareto (1966) dalam Bab 8 berjudul "Theories of Class: From Pluralist Elite to Rulling Class and Mass, Ronald H Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for Paradigm*, Westview Press, Boulder, Colorado, 1981, h. 349.

dipengaruhi oleh kekuatan uang para kandidat, dan muncul kekuatan elit primordial.

Pemilukada langsung oleh para elit politik lokal ditafsirkan sebagai proses rekrutmen politik atas tokoh terbaik di daerah. Maka sangat wajar jika proses pemilukada tersebut sarat dengan berbagai ragam dan upaya untuk memenuhi kepentingannya. Fakta dilapangan ternyata tidak sedikit para elit politik lokal yang memaksimalkan keinginan mereka dengan berbagai cara, bahkan tidak segan untuk “menghalalkan” cara dengan harapan pihak lain seperti partai politik, mengerti dan memahami akan kehendaknya. Tak heran jika waktu rekrutmen calon, para elit melakukan upaya-upaya kekerasan atau bahkan melakukan “suap” dan pemalsuan dokumen.

Proses pelembagaan oligarki elit juga membuat kuasa elit berada di atas konstitusi partai. Jarak antara elit partai dengan para konstituennya sebagai basis sosial partai menjadi sangat lebar. Konstituen atau basis sosial partai dalam posisi yang tidak berdaya berhadapan dengan elit partai. Sistem kaderisasi pun tidak bisa berjalan dengan maksimal, karena proses rekrutmen politik berpijak pada jaringan politik yang bersifat personal. Sehingga hal itu merusak penjenjangan atau mekanisme kaderisasi yang sudah dibuat oleh partai politik selama ini.

Elit partai politik adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Elit partai politik juga merupakan kelompok kecil yang menentukan arah kehidupan negara. Besarnya tuntutan terhadap peranan elit untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai ideal demokrasi dalam masyarakat menjadi kenyataan empiris terutama dalam negara yang menganut demokrasi dan dengan kultur partai politik yang kuat seperti Indonesia, adalah suatu kewajiban bagi partai politik untuk dapat memilih dan menempatkan kadernya secara selektif. Oleh sebab itu mekanisme rekrutmen elit menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses pembentukan pemerintahan yang aspiratif.

Menurut M Alfian Alfian dalam *Pilkada ditengah konflik horizontal* (A.A. Oka Mahendra, 2005) mencermati arus pemilukada pada juni 2005,

kaitannya dengan eksistensi dan kewenangan parpol tercatat beberapa hal berikut. *Pertama*, parpol belum betul-betul berpegang pada prinsip objektivitas dalam menyodorkan kandidat. Unsur oligarki politik dan aroma politik uang masih semerbak. *Kedua*, secara umum parpol-parpol kelihatan mengalami kesulitan untuk menyambung atau menyamakan frekuensi atas visi-misi mereka sebagai parpol, dengan aspirasi atau apa yang dimaui rakyat. *Ketiga*, kecilnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada.

Bisa dikatakan, partai politik yang ada di Indonesia hingga saat ini masih dikendalikan oleh sekelompok elit partai yang memiliki kewenangan serta hak istimewa untuk membuat atau memutuskan kebijakan-kebijakan strategis bagi kelangsungan partai politik. Elit masih menjadi penentu dan motor penggerak bagi agenda-agenda politik partai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori elit yang telah diuraikan diatas, baik menurut Pareto maupun Mosca, digunakan sebagai pijakan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan elit Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010.

2.2.2 Teori Koalisi

Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multipartai.

Menurut William Riker, dalam bukunya *The Theory of Political Coalitions* (1962) menjelaskan tentang koalisi partai melalui teorinya *Minimal Winning Coalitions* (disingkat MWC). Dimana menurutnya, pemerintahan sebaiknya dibentuk dengan koalisi yang menjamin kemenangan minimum. Beberapa asumsi dasar MWC adalah :

1. Partai politik berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka. Misalnya dalam sistem parlementer, kekuasaan berarti partisipasi dalam kabinet, dan kekuasaan secara maksimum bisa diartikan dengan memegang posisi sebanyak mungkin dalam kabinet. Maka koalisi antar partai diperlukan untuk

memaksimalkan kekuasaan, baik dalam kabinet maupun parlemen. Dalam pemilukada Kota Depok, setelah partai demokrat mendapatkan kursi terbanyak di DPRD serta mampu mendudukan kadernya menjadi ketua DPRD, partai demokrat berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaannya dengan mendudukan kadernya menjadi walikota dan wakil walikota.

2. Mekanisme MWC adalah diperlukannya jumlah kursi tertentu untuk mencapai kemenangan yang minimal (cukup $50\% + 1$) diparlemen.
3. MWC cukup memerlukan koalisi dua atau lebih partai yang dapat mengontrol kursi di parlemen, tetapi “minimal” dalam arti mereka tidak memasukan partai-partai yang dianggap “tidak perlu” untuk mencapai kemenangan. Dimana koalisi ini cukup menguasai mayoritas minimal kursi parlemen dengan mengeluarkan partai-partai yang memiliki kursi kecil.

Penggambaran cara kerja MWC di DPRD Kota Depok dijabarkan sebagai berikut. Di DPRD Kota Depok ada sembilan partai dengan jumlah kursi 50. Partai Demokrat 15 kursi, PKS 11 kursi, Partai Golkar 7 kursi, PDIP 5 kursi, PAN 5 kursi, Partai Gerindar 3 kursi, PPP 2 kursi, PKB 1 kursi, dan PDS 1 kursi. Dalam koalisi MWC dapat terjadi antara Partai Demokrat dan PKS dengan jumlah total kursi kedua partai itu adalah $15 + 11 = 26$ kursi dari 50 kursi DPRD Kota Depok. Koalisi kedua partai tersebut sudah cukup untuk digunakan mengontrol DPRD, dan tidak perlu melibatkan partai lain untuk menambah koalisi. Demikianlah yang dimaksud Riker dalam teori MWC.

Walaupun kemudian menjadi perdebatan menarik dikalangan pengamat saat itu, karena pemerintahan parlemen di Eropa sejak Perang Dunia II justru sebagian besar menggunakan pendekatan yang *oversized* daripada minimal. Partai-partai cenderung ingin meraih kemenangan mayoritas daripada sekedar kemenangan yang minimal, sebagaimana koalisi yang dibangun oleh SBY dan Partai Demokrat saat ini dengan melibatkan hampir mayoritas partai yang lolos *parliamentary threshold*.

Namun kemudian Arend Lijphart berusaha untuk menjawab persoalan yang muncul dengan melakukan penelitian tentang demokrasi di 21 negara. Menurut Lijphart, kelemahan teori MWC yang menekankan prinsip ukuran adalah sulit memprediksi bentuk-bentuk koalisi karena perbandingan kursi yang dimiliki partai cenderung berimbang. Jika ada satu partai yang mampu menang secara mayoritas maka koalisi minimal dapat diprediksi, namun jika tidak ada satu partai yang menang secara mayoritas maka jika menggunakan teori MWC akan diprediksi lebih dari satu koalisi

Berikutnya muncul beberapa kritik atas teori MWC yang hanya menekankan pada jumlah kursi semata. Ada empat alasan mengapa teori tersebut dikritik, pertama, teori MWC cenderung mengabaikan preferensi kebijakan partai. Kedua, bagaimana menentukan keanggotaan koalisi. Ketiga, loyalitas anggota koalisi. Jika penggagas koalisi tidak yakin dengan anggota koalisinya, maka koalisi yang dibentuk lebih hanya sekedar MWC yaitu dengan menggunakan oversized coalitions yaitu koalisi dengan ukuran yang lebih dari hanya sekedar kemenangan minimal. Keempat, dalam proses politik sangat mungkin kabinet dapat “menang” dengan dukungan suara yang tidak mayoritas.

Kritik atas teori MWC memunculkan banyak versi teori tentang koalisi politik, diantaranya adalah *Minimum Connected Winning* (MCW) dari Robert Axelrod (1970)⁹. Asumsi Axelrod sangat berbeda dengan Riker, tetapi lebih dekat dengan penjelasan Lijphart. Menurut Axelrod, koalisi dibentuk secara “connected” yaitu partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan *partner* yang tidak penting¹⁰. Partai-partai terlebih dahulu akan mencoba bergabung dengan partai-partai yang memiliki banyak kesamaan dengan mereka, jika diperlukan baru menambah dengan partai-partai lain hingga koalisi mayoritas terbentuk. Tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi diantara anggota koalisi disaat memerintah. Karena membentuk koalisi atas dasar

⁹ Craig Volden & Clifford J. Carrubba, *The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies*, dalam *American Journal of Science*, vol. 48, No.3, Juli 2004

¹⁰ Lijphart, Arend. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*. New Haven : Yale University Press, 1984, hal 10

kesamaan tujuan kebijakan lebih penting dan stabil dari pada atas dasar jumlah kursi semata. Jika Riker dengan koalisi “*minnimal winning*” menekankan bahwa partai politik bersifat memaksimalkan kekuasaan, maka Axelrod dengan koalisi “*minimum connected*” menekankan partai politik sebagai pihak yang berusaha mewujudkan kebijakan sesuai dengan kepentingan partai. Untuk memperoleh gambaran yang maksimal, terlepas dari kontroversi yang ada, peneliti akan menggunakan kedua teori tersebut untuk meneropong permasalahan koalisi yang ada dalam pemilukada Kota Depok yaitu teori *Minimal Winning Coalitions* (MWC) dari William Riker dan *Minimum Connected Winning* (MCW) dari Robert Axelrod.

Pemilukada melibatkan banyak tangan. Mulai dari pemerintah, DPRD, Partai politik, KPUD dan birokrasi (A.A. Oka Mahendra, 2005, h, 3). Namun yang menarik, koalisi yang dibuat ditingkat daerah (pemilukada) berbeda dengan koalisi yang dibuat ditingkat nasional. Kesan “transaksi” dalam dukung-mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat kentara. Oleh karena itu, bagi segolongan tokoh politik, tidak terlalu penting apa ideologi partai. Yang penting, apa yang dapat diberikan partai untuk kepentingannya. Wajar jika kemudian dalam pemilukada, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, rakyat tidak terlalu mengandalkan tokoh-tokoh pilihan partai, tetapi lebih mengandalkan nuraninya untuk memilih tokoh yang dianggapnya bisa menjawab kebutuhan rakyat (A.A. Oka Mahendra, 2005, hal, 9)

Koalisi yang dibangun juga kian warna-warni, hal ini menegaskan kembali bahwa klaim politik aliran mulai rontok. Faksi yang dibangun bukan jenis faksionalisme ideologis, tapi faksionalisme pragmatis. Asal kesamaan kepentingan jangka pendek dan saling dapat untung menjadi tuntutan utama dalam tawar-menawar politik (A.A. Oka Mahendra, 2005). Koalisi ini hanya terjadi pada waktu pencalonan dan pemilihan. Setelah itu masyarakat ditinggalkan.

Berbicara soal pemilukada tidak terlepas dari persoalan *money politics*. Persoalannya sederhana, masyarakat membutuhkan dana untuk menyambung hidup. Mereka tidak peduli siapa yang memberi dan apa

ideologinya. Bagi pasangan calon, tentu mereka sangat paham akan kebutuhan masyarakatnya. Kedua belah pihak saling memanfaatkan. Sehingga komersialisasi partai sebagai kendaraan politik calon tak terhindarkan lagi, hal ini menyebabkan parpol didaerah lebih berpihak pada calon yang memiliki banyak uang daripada calon yang memiliki popularitas diakar rumput. Rekrutmen calon kepala daerah lebih terkesan calonlah yang membutuhkan “kendaraan” partai politik, bukan partai politik yang punya kepentingan mencari kader-kader yang aksebilitas dan kredibilitas mumpuni untuk dicalonkan. Sehingga yang dikhawatirkan terjadinya praktek jual beli “kendaraan” partai oleh kandidat tak terelakkan lagi.

Pada penelitian ini, teori koalisi, baik dari Riker maupun Axelrod digunakan untuk menganalisa bagaimana elit Partai Demokrat membangun koalisi untuk memaksimalkan kekuasaanya dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 dengan partai-partai lain untuk mengusung pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Suprianto.

2.2.3 Teori Partisipasi

Partisipasi politik menurut Keith Faulks (2010) adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Lebih jauh, Faulks mengurai bahwa keterlibatan tersebut meliputi pembuatan keputusan maupun oposisi atau menurut bahasa penulis keterlibatan dalam koalisi maupun oposisi dengan pemegang kebijakan (pemerintah). Faulks menambahkan bahwa partisipasi merupakan proses aktif seseorang ketika menjadi anggota sebuah partai politik atau kelompok penekan (*pressure groups*) namun tidak harus memainkan peran aktif dalam organisasi.

Sedangkan menurut Samuel Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* membuat batasan tentang partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi tersebut bisa bersifat perorangan atau kolektif, terorganisir atau

spontan, organisasi mapan atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Damsar, 2010, 183).

Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Science*, mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Meriam Budiarjo, 1994, 18)

Sementara itu, Norman H Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science*, mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang dimulai oleh mereka (Meriam Budiarjo, 1994, 183). Lebih luas, Michael Rush dan Philip Althoff dalam buku *Sosiologi Politik* (2003), memberi pengertian bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan dalam aktivitas politik. (Damsar, 2010, 180).

Pemilihan adalah salah satu instrumen politik paling penting bagi masyarakat untuk mengontrol pemerintah. Melalui mekanisme pemilihan, mereka yang telah dewasa dapat mengekspresikan kepentingannya melalui berbagai isu yang bergulir dan memilih para pemimpin mereka secara langsung maupun tidak.

Partisipasi politik rakyat menjadi elemen yang sangat penting dalam proses demokrasi. Tanpa partisipasi politik aktif rakyat, proses pemilu ataupun pemilukada hanya menjadi prosedur demokrasi saja. Selain itu, minimnya partisipasi politik rakyat, hasil pemilu ataupun pemilukada menjadi lemah atau kehilangan legitimasinya. Ada beragam cara untuk mendorong partisipasi politik rakyat agar senantiasa maksimal; antara lain¹¹, *pertama*; memperkuat kembali peran dan fungsi partai politik, peran dan fungsi partai politik antara lain sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan,

¹¹ Idhar, S.psi, pengantar pada seminar “Peran Partai Politik dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat” yang diselenggarakan LSM “Sinar Rakyat Indonesia” dan Depdagri, pada Senin 17 Mei 2010; di Surabaya. Alumni Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Direktur PUSDEK (Pusat Studi untuk Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial), makalah tidak diterbitkan.

pengendalian konflik, dan kontrol politik. Selain itu partai politik memiliki struktur sampai pada tingkat yang paling bawah hingga pada tingkat RW, struktur ini akan efektif sebagai sarana pendidikan politik warga. Partai politik juga menjadi alat yang legal untuk melakukan pendidikan politik, peran-peran ini bila dilakukan secara maksimal akan menggantikan peran LSM dalam melakukan pendidikan politik rakyat.

Kedua; memperkuat keterwakilan atau representasi wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat. Partai harus lebih selektif dengan mempertimbangkan banyak aspek untuk menentukan caleg yang akan diajukan pada pemilihan, baik menjadi caleg ataupun calon kepala daerah, baik kapasitas atau kemampuan secara personal juga rekam jejaknya, selain itu aspek representasi ini juga memasukkan unsur kedekatan caleg atau calon kepala daerah dengan masyarakat, ada kedekatan antara kandidat yang akan diusung dengan kerja-kerja pendampingan pada masyarakat.

Russel Dalton (1996) dalam Sosiologi Politik Pengantar Kritis (Keith Faulks, 1999) menyatakan, tentang dampak kecenderungan perubahan sosial secara umum terhadap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat: (1) Warga negara yang semakin berwawasan dan kritis (2) Menurunnya kepercayaan terhadap efektifitas lembaga dan elit politik (3) Menurunnya loyalitas kepada partai politik tradisional (4) Anjloknya tingkat keikutsertaan dalam pemilu (5) Peningkatan partisipasi politik inkonvensional.

Kepercayaan konstituen terhadap elit partai politiknya, dan cara bagaimana demokrasi berjalan di wilayah mereka, semakin menurun, sedangkan keinginan konstituen untuk kritis mengawasi elit partai politik mereka semakin tumbuh. Dalam hal ini, media mempunyai peran yang sangat signifikan. Padahal, partai politik seharusnya menjadi mediator paling penting antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik telah menjadi aktor utama dalam menggerakkan partisipasi warga negara, seringkali dengan mengadopsi program politik yang mewakili kepentingan kelompok yang luas seperti yang didasarkan atas agama atau kelas.

Pasca gerakan reformasi 1998, uforia masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik meningkat tajam, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mendatangi kampanye, dan memberikan suara dibilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS), dengan satu harapan pemilihan umum kali ini akan melahirkan sosok pemimpin atau wakil rakyat, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, pemimpin yang bersih dan tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang lazim terjadi di masa Orde Baru, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pada pemilu pertama tahun 1999, tidak kurang seratus lima juta lebih masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya. Terlepas dari segala kritik yang mengikutinya, pemilu tahun 1999, dinilai sukses oleh sebagian besar kalangan, sebagai pemilu yang demokratis kedua setelah pemilu tahun 1955.

Pemilu di tahun 1999, kemudian menghadirkan elit-elit politik baru dalam pentas politik nasional, dan sebagian juga berasal dari elit politik lama, terutama dari partai Golkar. Rakyat kemudian menaruh harapan yang besar pada elit baru yang baru tumbuh, yang diharapkan akan membawa kesejahteraan rakyat dan jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Harapan rakyat yang besar pada wakil-wakilnya yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak berbanding lurus dengan tingkah laku para elit partai politik, banyak dari anggota DPR yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi, sebagian dari elit partai tampil bak orang kaya baru, dengan menggunakan mobil-mobil mewah, perilaku yang jauh dari kehidupan konstituen yang mereka wakili.

Perilaku elit partai politik ini kemudian disikapi secara apatis oleh masyarakat, dengan menganggap apapun yang berkaitan dengan politik; banyak argumentasi yang dikemukakan rakyat bahwa politik hanya menjadi urusan perebutan kekuasaan antar elit partai, dan rakyat hanya digunakan untuk menjadi alat dari perebutan kekuasaan semata. Argumentasi yang lebih jauh menunjukkan bahwa politik hanya menjadi permainan bagi segelintir elit partai, yang pada akhirnya hanya menjadi ajang berkarir, dan memperkaya diri sendiri.

Apatisme rakyat akan politik disatu sisi, dengan lemahnya kontrol rakyat akan kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan dirinya, rakyat mendapati para wakil-wakilnya tidak pernah memperjuangkan secara nyata beberapa kebijakan yang berimplikasi pada kehidupannya. Masyarakat kemudian bertanya dimana wakil-wakil yang dulu dipilih saat pemilu. Sikap lanjut dari apatisme rakyat, melahirkan fenomena yang dikenal sikap antipartai politik, bahwa sudah tidak ada beda lagi antara partai politik yang satu dengan yang lain, partai hanya hadir menjelang diadakannya perhelatan akbar kampanye, begitu masa kampanye usai, partai-partai kemudian menghilang bak ditelan bumi.

Saat ini realitas politik kita menegaskan bahwa peran basis sosial masyarakat semakin signifikan dalam proses sirkulasi elit partai politik, baik dalam level nasional maupun daerah. Proses peralihan kekuasaan tidak lagi sepenuhnya dimonopoli oleh partai politik, tetapi ditentukan oleh konstituen sebagai basis sosial partai politik. Dukungan konstituen sebagai basis sosial partai politik menjadi penentu bagi kemenangan calon yang akan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon kepala daerah. Jadi, teori partisipasi digunakan untuk mencermati dan mengidentifikasi bagaimana partisipasi elit Partai Demokrat dan basis sosialnya dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010.

2.2.4 Konsep Basis Sosial

Dalam demokrasi modern, konflik antar kelompok berbeda disalurkan melalui partai-partai politik yang merepresentasikan “perjuangan kelas secara demokratis”. Walaupun banyak partai menolak prinsip konflik kelas atau kesetiaan kelas, analisis terhadap program dan sumber dukungan menunjukkan bahwa partai-partai memang mewakili kepentingan-kepentingan kelas-kelas berbeda .

Lebih jauh, Seymour Martin Lipset (1960) memberikan generalisir pokok secara internasional bahwa partai-partai politik pada prinsipnya berbasis pada dua kelompok kelas, yaitu kelas bawah atau kelas menengah dan atas. Sedangkan tiga faktor lain yang menentukan dukungan terhadap

partai politik adalah ikatan kedaerahan, perbedaan seks dan usia. Ketiga faktor itu memiliki peran berbeda-beda terhadap pandangan politik.

Sementara itu Gabriel Almond¹² menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya menjadi beberapa jenis yaitu : (1) Partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat, misalnya dari kelas atas, menengah dan kelas bawah. (2) Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, misalnya petani, buruh, dan pengusaha. (3) Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Nasrani. (4) Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, misalnya dari suku bangsa yang sama, dan bahasa dan daerah tertentu.

Ramlan Surbakti¹³ mendefinisikan basis sosial partai politik sebagai pendukung loyal karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu.

Konstituen atau basis sosial partai politik sejatinya merupakan pemilih yang memiliki loyalitas dan identitas kepartaian yang tinggi. Konstituen sebagai basis sosial partai politik memiliki rasionalitas dan perilaku beragam. Konstituen bisa bersikap kalkulatif, primordial, atau alternatif. Konstituen kalkulatif umumnya lebih banyak berada di tengah komunitas yang tingkat sosio-ekonomi dan konsumsi informasi yang cukup tinggi. Mereka cenderung memilih parpol setelah mengalkulasi secara rasional program apa yang bisa diberikan partai untuk mereka.

Sedangkan konstituen primordial menentukan afiliasinya berdasarkan kesamaan identitas etnis, ras, agama, dan bentuk-bentuk ikatan mikro. Konstituen alternatif umumnya dibentuk sebagai massa yang khas. Konstituen jenis ini tidak mudah diikat suaranya oleh simbol, ketokohan atau oleh tawaran pragmatis. Konstituen alternatif suka dengan

¹² Gabriel Almond, 1978, "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik" dalam Mochtar Mas' oed dan Collin Mac Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2000. Hal 58

¹³ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/06/opini/46752.htm>, diakses tanggal 24 November 2011, pukul 13.30WIB.

ide dan gagasan baru yang tidak monoton. Perilaku memilih (*voting behaviour*) konstituen merupakan salah satu bentuk perilaku politik (*political behaviour*). Perilaku memilih konstituen atau basis sosial partai politik merupakan perbuatan dan aksi yang dijalankan basis massa partai politik sebagai respon terhadap stimulan atau lingkungan politik tertentu. Terutama sekali berkenaan dengan distribusi dan pemanfaatan kekuasaan oleh partai politik.

Konstituen atau basis sosial partai politik di Indonesia belakangan ini semakin kalkulatif. Meningkatnya jumlah golput pada event-event pemilihan umum maupun pemilukada, dinilai berbagai pihak sebagai bentuk makin kalkulatifnya konstituen. Konstituen primordial malah kini ditengarai berkurang dan beralih menjadi konstituen yang kalkulatif. Kesetiaan konstituen atau basis sosial partai politik umumnya bersifat resiprokal artinya sangat ditentukan pula kepada respon parpol terhadap mereka. Respon parpol yang baik sangat ditentukan oleh kemampuan pengurus partai tersebut mengelola manajemen sumber daya manusia, organisasi, keuangan, dan kepemimpinan. Respons partai itu dapat berwujud memperjuangkan aspirasi rakyat, memenuhi janji politik saat kampanye, melakukan pendampingan serta pendidikan politik.

Kecenderungan meningkatnya golput berdampak pada jumlah dukungan suara yang masuk kepada masing-masing pasangan calon peserta pemilukada. Kisaran angka 30 persen golput saja membuat pasangan peserta tidak akan meraih dukungan di atas 50 persen. Tidak mengherankan, jika kemenangan baik di pilihan gubernur, pilihan bupati atau walikota lebih banyak mencapai kisaran 40 persen, bahkan kurang dari 40 persen. Secara formal, legitimasi kemenangan memang sudah sah. Namun, legitimasi dukungan masyarakat secara riil menjadi berkurang. Lebih jelasnya suara golput saat pemilu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3:
Suara Golput Sepanjang Pemilu Di Indonesia

Tahun Pemilu	Pemilih Terdaftar	Suara Sah		Golput	
		Suara	Dalam %	Suara	Dalam %
1955	43.084.719	37.785.299	87,7	5.299.420	12,3
1971	58.558.776	54.635.338	93,3	3.923.438	6,7
1977	70.670.153	64.733.860	91,6	5.936.293	8,4
1982	82.002.545	74.122.100	90,39	7.880.445	9,61
1987	93.965.953	86.082.210	91,61	7.883.743	8,39
1992	107.565.000	97.789.534	90,9	9.775.466	9,1
1997	125.640.000	112.991.150	89,9	12.648.850	10,1
1999	117.738.000	105.786.661	89,8	11.951.339	10,2
2004	148.000.041	113.456.840	76,66	34.543.201	23,34
2009	171.265.442	104.048.118	85,57	67.217.324	39,1

Sumber : KPU dan LSI

Apabila menyimak angka-angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu, jumlah golput menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Jika pada Pemilu 1955, yang dikenal paling luber dan paling demokratis, tingkat golput mencapai 12,3 persen. Fenomena golput masih belum tinggi di era pemilu orde baru yang rakyatnya masih dimobilisasi dalam pemilu. Pemilu 1971 golput mencapai 6,7 persen, kemudian meningkat menjadi 8,4 persen dalam Pemilu 1977 dan meningkat lagi dalam Pemilu 1982 menjadi 9,61 persen. Dalam Pemilu 1987 turun menjadi 8,39 persen dan meningkat lagi dalam Pemilu 1992 menjadi 9,1 persen, dan 10,1 persen dalam Pemilu 1997. Sedangkan suara golput yang dicapai pada Pemilu 1999, pasca jatuhnya rezim otoriter, angka golput juga masih meningkat, yakni mencapai 10,2 persen. Hal ini bila memasukkan jumlah suara yang tidak sah karena berbagai alasan sebagai suara golput. Pada saat Pemilu 2004 angka golput meningkat tajam menjadi 23,34 persen. Sedangkan pada pemilu tahun 2009 angka golput terus meningkat hingga 39,1 persen.

Pertanyaan yang layak diajukan kemudian, bagaimana bisa terjadi perubahan yang begitu cepat sikap masyarakat terhadap partai politik dan rendahnya partisipasi politik rakyat yang ditahun 1999, menyambut secara gegap-gempita hadirnya partai politik baru, dan terlibat secara suka rela

untuk mendatangi kampanye dengan berarak-arikan, maupun datang ke bilik-bilik tempat pemungutan suara (TPS), untuk memberikan suaranya. Kondisi ini kemudian berbalik pada pemilihan umum tahun 2009. Pertanyaan yang lebih lanjut sebenarnya bagaimana peran partai politik ditengah-tengah masyarakat.

Hadirnya para elit partai politik di lembaga perwakilan rakyat maupun kepala daerah, diharapkan dapat membawa kepentingan para konstituennya, dan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Akan tetapi, kehendak ini jauh dari harapan semula, banyak kasus dijumpai para wakil rakyat dan kepala daerah lebih mengendepankan kepentingan pribadi dan partainya. Hal ini mencerminkan betapa lemahnya para wakil rakyat dan kepala daerah yang diusung oleh partai politik memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini sekali lagi menunjukkan representasi yang semu para wakil rakyat dan kepala daerah.

Representasi yang semu dari para wakil rakyat dan kepala daerah, menunjukkan bahwa para wakil rakyat dan kepala daerah tidak berangkat dari dukungan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya. Mereka hanya menjadi kepentingan partai politik semata, banyak dari wajah-wajah anggota dewan dan kepala daerah yang tidak dikenal oleh masyarakat, akan tetapi mereka para wakil rakyat sebagai anggota dewan dan kepala daerah, hanya karena kedekatannya dengan elit partai politik atau memiliki modal finansial yang cukup untuk membeli nomor urut atau supaya diusung dalam pemilukada. Secara social para wakil rakyat dan kepala daerah tidak tumbuh dan besar dengan pergumulan rakyat, sehingga menjadi wajar para wakil rakyat dan kepala daerah tidak “pernah” memperjuangkan kepentingan rakyat.

Rekrutment politik yang diharapkan sebagai sarana terjadinya rotasi dan mobilitas politik dalam tubuh partai, dimana terjadinya pergantian elit politik lama, dengan elit politik baru, baik secara alamiah maupun sebagai sarana hukuman rakyat terhadap elit. Rakyat sebenarnya berada pada posisi yang sentral dalam proses demokrasi, elit partai yang menjadi anggota dewan yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, akan dihukum

dengan tidak memilihnya lagi pada pemilihan selanjutnya. Tetapi dalam kenyataannya partai politik selalu menghadirkan elit-elit atau caleg yang tidak mengakar pada rakyat, sehingga meskipun dimungkinkan untuk terjadi rotasi politik dalam tubuh partai, rakyat selalu mendapati para pemimpin yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, proses politik ini akan meminimalkan partisipasi politik rakyat, karena tiadanya wakil rakyat yang layak untuk dipilih.

Basis sosial partai politik merupakan elemen terpenting bagi partai politik. Basis sosial partai politik memiliki tiga aspek yang saling terkait yaitu asal-usul, hubungan dengan organisasi kepentingan dan hubungan dengan warga negara. Dalam konteks asal-usul, kita memperlakukan akar struktural sosial dari mana partai muncul. Hubungan dengan organisasi kepentingan menghubungkan kelompok dengan partai yang berkonsentrasi pada upaya mobilisasi aktif yang terjadi setelah berdiri. Hubungan dengan warga negara merupakan hasil dari kedua aspek sebelumnya. Ini adalah semacam hubungan yang terkait dengan konsepsi “party in the electorate” (Beck and Sorauf, 1992; Dalton and Wattenberg, 2000, dalam *The Hand Book of Political Sociology*, 2005).

Hal ini berbeda ketika rezim Orde Baru, dimana peran masyarakat maupun partai politik saat itu sangat “terbatas”. Golkar diposisikan sebagai alat politik penguasa Orde Baru untuk mendemokratiskan situasi yang otoriter. PPP dan PDI hanya bermain di “pinggiran” sementara masyarakat diintimidasi agar hanya memilih Golkar saja, bahkan dengan tangan-tangan otoritarianisme-nya Orde Baru mampu mencengkeram hingga ke pelosok desa. Basis sosial partai politik di hancurkan. Sehingga partai politik miskin dukungan.

Ada beragam definisi tentang partai politik sebagaimana ditulis dalam *The Hand Book of Political Sociology* (2005). Weber mendefinisikan partai politik adalah kelompok perlawanan yang berjuang untuk pengendalian politik dalam tubuh perusahaan (pemerintah). Neumann mendefinisikan partai politik adalah sebuah organisasi masyarakat yang aktif dan bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain

atau orang yang memiliki pandangan yang beragam. Schlesinger partai politik adalah sebuah "politik organisasi yang aktif dan efektif terlibat dalam kompetisi untuk pemilu". Sartori mendefinisikan partai politik adalah "setiap kelompok politik yang ikut pemilu dan mampu menempatkan calonnya dalam pemilu itu untuk jabatan publik".

Dari beberapa definisi tentang partai politik diatas, jika diambil kesimpulan, masyarakat, kumpulan kelompok atau individu merupakan elemen terpenting bagi partai politik, mereka adalah basis sosial partai politik. Karena, beragam partai politik yang lahir, tumbuh dan berkembang merupakan inisiasi gerakan sosial dari kelompok atau individu tersebut. Charlot (1967:37–8) menyatakan bahwa Prancis berhimpun menjadi republik, awalnya dikenal sebagai "*Union for a New Republic*". Dimana *Union for a New Republic* terbentuk dari kumpulan kelompok dan individu yang mendukung Charles de Gaulle selama krisis 1958 yang diakibatkan oleh pertempuran Prancis dengan pemberontak Aljazair (*The Hand Book of Political Sociology*, 2005). Begitu juga seperti yang dilakukan oleh Kongres Nasional Afrika setelah jatuhnya *apartheid* di Afrika Selatan, sebelumnya merupakan gerakan ilegal, begitu juga gerakan Solidaritas di Polandia setelah jatuhnya komunisme. Mereka adalah kumpulan kelompok dan individu (*The Hand Book of Political Sociology*, 2005).

Atau seperti apa yang terjadi di Eropa Barat sekitar tahun 1970-1980-an, sebagaimana disampaikan oleh Kitschelt (1989, 1990) menemukan bahwa partai-partai baru yang muncul saat itu berasal dari gerakan sosial yang prihatin atas kondisi yang ada, mereka mengambil isu seputar gaya hidup, lingkungan, rasisme, perdamaian, dan gender. Kemudian mereka diberi label "*party left-libertarian*". Mereka adalah '*left*' karena mereka berbagi dengan sosialisme tradisional, ketidakpercayaan dari pasar, dari investasi swasta, dan pencapaian etika, dan komitmen untuk redistribusi egaliter. Mereka adalah '*libertarian*' karena mereka menolak otoritas birokrasi swasta atau publik untuk mengatur mereka melakukan kolektif individu (Kitschelt, 1990:180, dalam *The Hand Book of Political Sociology*, 2005).

Jadi, dari beragam partai politik yang muncul, baik di Prancis, Afrika, Polandia maupun Eropa Barat saat itu, mereka mempunyai basis sosial yang jelas, para pekerja atau buruh pabrik, aktivis dan lainnya. Basis sosial partai politik, menjadi penggerak utama partai-partai itu dalam melakukan aksi-aksinya. Baik ketika kampanye dalam pemilihan umum maupun demonstrasi untuk menentang kebijakan penguasa yang mereka rasa tidak sesuai dengan aspirasi mereka.

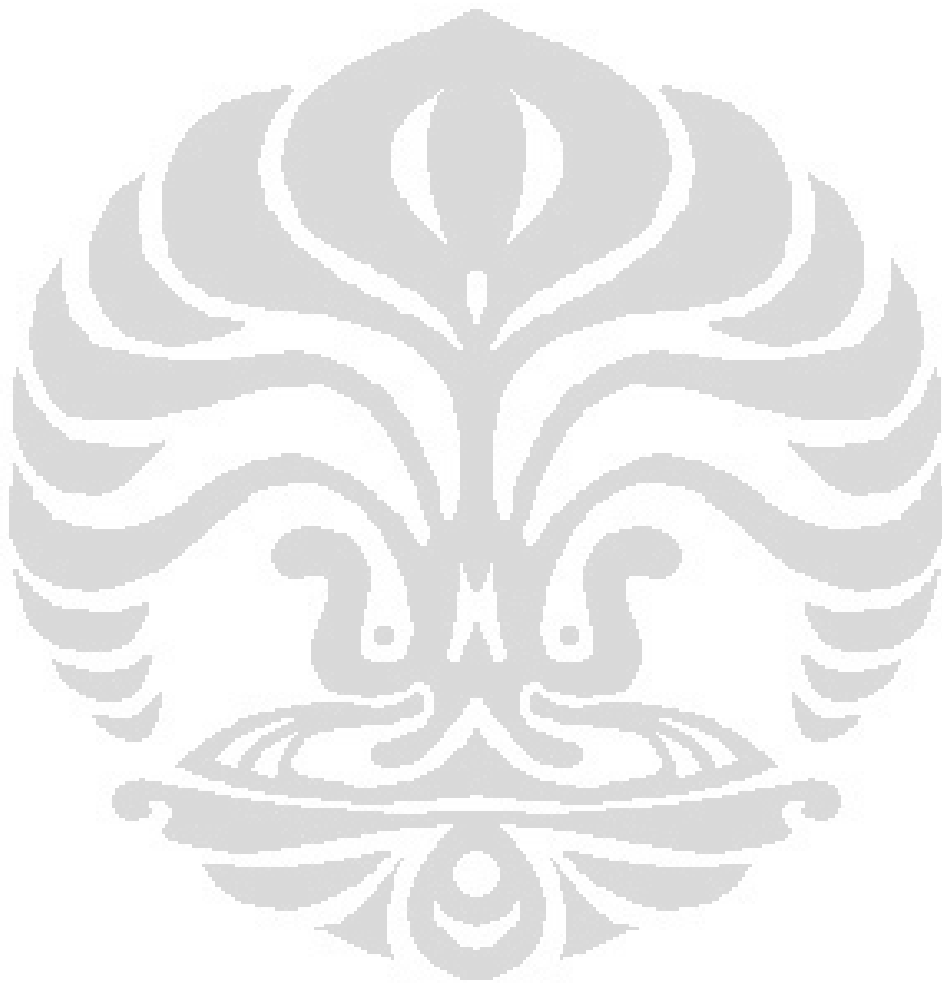
Jadi, dalam konteks politik, khususnya pemilu, seringkali, elit partai politik meng-eksklusi basis sosialnya saat penentuan calon yang akan diusung. Tetapi, pada saat pemilu, mobilisasi basis sosial partai dimaksimalkan demi kemenangan calonnya. Sehingga partisipasi terbatas bagi basis sosial partai politik tidak bisa dihindarkan lagi. Boleh dibilang, saat pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilu kedaulatan betul-betul ditangan rakyat, tetapi setelah pemilu, kedaulatan tetap berada ditangan sekelompok elit partai. Sehingga peran basis sosial pasca pemilu dipastikan nyaris tidak ada. Konsep basis sosial dari Lipset digunakan untuk mengidentifikasi konstituen Partai Demokrat yang memilih saat pemilu tahun 2009 maupun saat pemilu tahun 2010, bagaimana peran mereka.

2.3 Kerangka Alur Berpikir

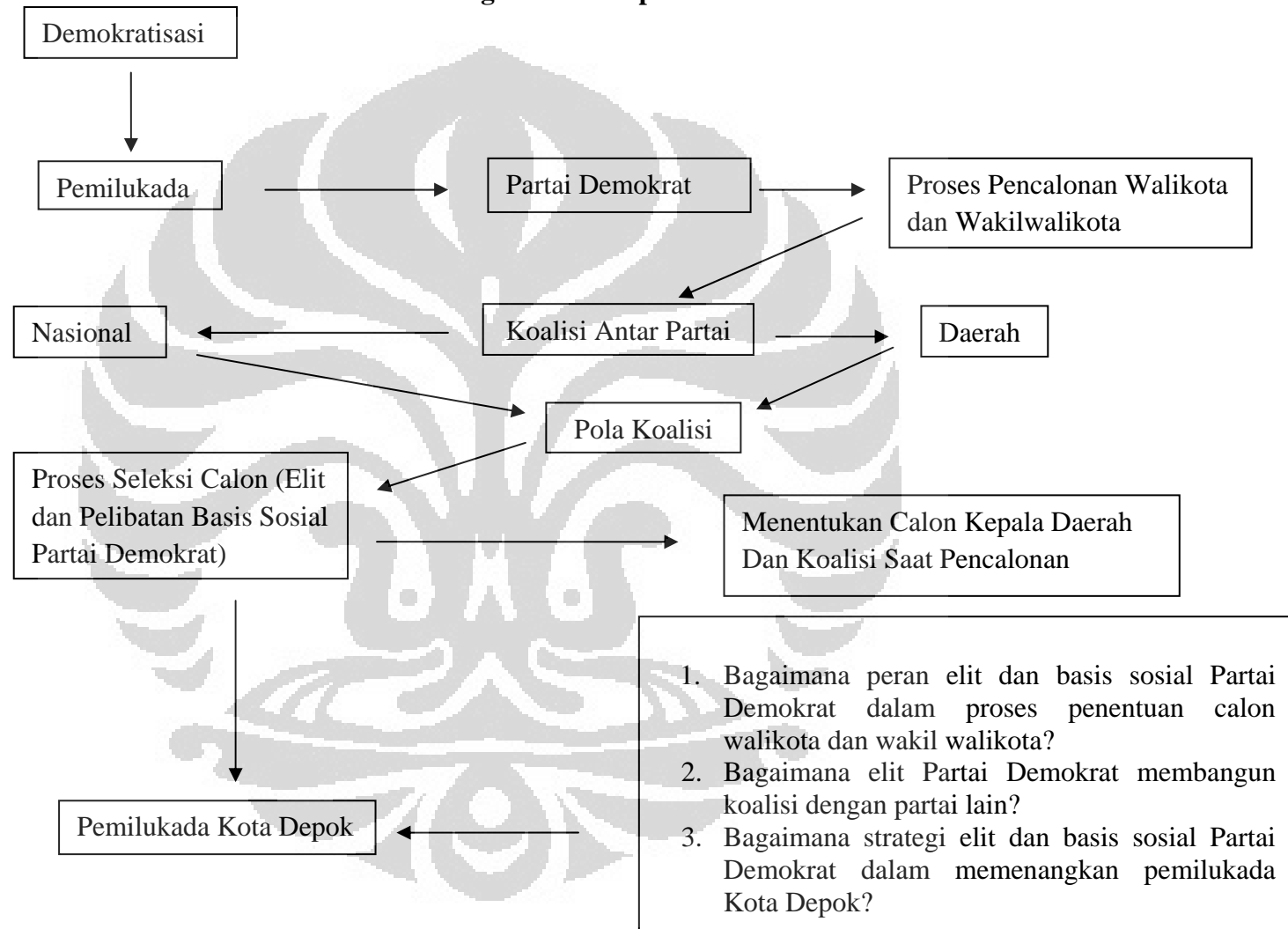
Pemilu menjadi arena kontestasi berikutnya bagi partai politik setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pemilu juga merupakan ajang bagi partai-partai politik untuk memperebutkan kekuasaan di tingkat daerah. Koalisi menjadi pilihan dominan bagi partai politik untuk memenangkan calonnya dan memenuhi kuota pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang.

Yang menarik, dalam menentukan koalisi maupun calon yang akan diusung dalam pemilu, seringkali peran elit partai politik terlalu dominan dibandingkan mengakomodir atau mendukung calon yang diusulkan oleh konstituennya (basis sosial partai politik). Oleh karena itu alur berikutnya tesis ini

akan menelisik lebih jauh tentang bagaimana peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada kota Depok tahun 2010.



Kerangka Alur Berpikir :



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian Dan Posisi Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Merujuk pada perspektif Creswell (1994), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1993) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami¹⁴. Sedangkan strategi pendekatan kualitatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Dengan pilihan ini diharapkan mampu mengeksplorasi secara mendalam terhadap aktivitas (program, kejadian, proses, institusi, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu lama (Creswell, 1994) yang dilakukan oleh elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pilukada Kota Depok tahun 2010. Penelitian ini khususnya ingin melihat lebih dalam bagaimana peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam penjangking calon walikota dan wakil walikota, bagaimana elit Partai Demokrat membangun koalisi dengan partai lain dan bagaimana strategi elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam memenangkan pilukada Kota Depok pada pilukada tahun 2010.

Sedangkan posisi peneliti, karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif, sehingga bias, nilai dan penilaian peneliti akan dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian (Creswell, 1994). Keterbukaan seperti itu menurut Locke, Spirduso & Silverman, (1987) dalam Creswell (1994) dianggap bermanfaat dan positif. Juga, dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisis data. Data didekati

¹⁴ Dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan keempat, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 3

melalui instrumen manusia, bukannya melalui inventaris, daftar pertanyaan atau mesin (Creswell, 1994).

Dalam penelitian ini, sebelumnya peneliti dibekali dengan surat keterangan dari program pasca sarjana departemen sosiologi Universitas Indonesia. Kemudian, sebelum surat ijin penelitian diberikan ke instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu KPUD dan BPS Kota Depok untuk pengambilan data, terlebih dahulu disampaikan ke Kantor Kesbangpol dan Linmas untuk meminta surat rekomendasi yang ditujukan kepada kedua pimpinan instansi tersebut. Setelah disetujui dan mendapat ijin, peneliti diberi surat rekomendasi kepada institusi yang peneliti tuju yaitu KPUD dan BPS Kota Depok untuk pengambilan data yang terkait dengan hasil pemilu tahun 2009 dan hasil pilukada tahun 2010 serta data kependudukan lain yang peneliti perlukan.

Dalam melakukan proses penelitian ini, peneliti ingin mengangkat elit dan basis sosial partai politik sebagai elemen yang sangat penting bagi perjalanan partai politik. Elit partai politik sebagai kelompok kecil yang membuat keputusan-keputusan strategis partai, mampu menentukan arah kebijakan partai, mereka kelompok yang mendapat “amanah” dari basis sosialnya sebagai penyambung aspirasi, yang semestinya tidak bisa mengabaikan begitu saja keinginan dari basis sosialnya. Seharusnya, suara elit adalah suara basis sosial partai politik. Peneliti melihat basis sosial partai politik sebagai kelompok mayoritas partai politik seringkali diabaikan perannya, saat pemilu dan pilukada saja mereka dimobilisasi, diberi janji-janji kesejahteraan, keadilan dan lainnya, namun setelah itu ditinggalkan. Peneliti melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan para pendukung Partai Demokrat dan pemimpinnya, sehingga mereka tidak menaruh curiga dan terganggu dengan kehadiran peneliti.

Sebelum melakukan wawancara dengan para narasumber, peneliti terlebih dahulu konfirmasi melalui telepon dengan sebelumnya memperkenalkan diri maksud dan tujuan peneliti kepada narasumber. Setelah itu peneliti membuat perjanjian dimana dan jam berapa peneliti bisa bertemu dengan narasumber untuk melakukan wawancara tatap muka. Setelah disepakati kemudian peneliti berangkat menuju tempat dan jam yang sudah disepakati untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan narasumber.

3.2 Informan

Penelitian ini memfokuskan pada peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Proses penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive* atau dengan kriteria tertentu yang menurut peneliti relevan dan sesuai dengan informasi dan data yang peneliti butuhkan. Informan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok periode 2007-2011. 2). Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Demokrat, periode 2009-2014. 3). Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat baik saat pemilu tahun 2009 maupun pemilukada tahun 2010. 4). Konstituen Partai Demokrat. 5). Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. 6). Ketua PAC PDIP Kota Depok. 7). Ketua FBR (Forum Betawi Rembug). 8). Pengurus PKS.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak satu orang ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, delapan orang ketua PAC Partai Demokrat, empat orang anggota DPRD fraksi Partai Demokrat Kota Depok, satu orang ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, satu orang ketua PAC PDIP Kota Depok, empat orang basis sosial (konstituen), satu orang ketua FBR, satu orang pengurus PKS. Jadi, total jumlah informan yang diwawancarai sembilan belas (20) orang.

Tabel 4 :
Daftar Informan

No	Keterangan	Jumlah
1	Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok	1 orang
2	Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok	1 orang
3	Ketua PAC PDIP Kota Depok	1 orang
4	Ketua PAC Partai Demokrat	8 orang
5	Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Demokrat	4 orang
6	Pemilih Partai Demokrat (Basis Sosial)	3 orang
7	Informan lain	2 orang
	Jumlah	20 orang

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari lapangan mulai dari bulan agustus 2010 sampai bulan januari 2012. Data yang dikumpulkan terdiri dari data dokumen dan wawancara. Data wawancara dengan para elit atau pimpinan partai digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang peran elit dan hubungannya dengan basis sosial dalam pilukada Kota Depok, sementara wawancara dengan basis sosial digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peran basis sosial dalam pilukada Kota Depok. Sementara data dokumen digunakan sebagai data penguatan atas data-data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

Pada tahap awal penelitian, peneliti memfokuskan pencarian data melalui internet, kliping media serta data-data dari instansi terkait tentang kondisi masyarakat Kota Depok maupun data pemilih, baik saat pemilu tahun 2009 maupun saat pilukada tahun 2010, seperti jumlah penduduk Kota Depok berdasarkan jenis kelamin, data statistik penduduk tiap kelurahan maupun kecamatan dan data mata pencaharian penduduk.

Berikutnya, data pemilih serta perolehan suara dan jumlah kursi DPRD masing-masing partai politik pada pemilu tahun 2009 di Kota Depok, serta jumlah pemilih dan perolehan suara pada pilukada tahun 2010 di Kota Depok dari masing-masing calon. Juga, data warga yang tidak memilih (golput) baik saat pemilu tahun 2009 maupun ketika pilukada tahun 2010. Sebagian data diambil dari internet, BPS Kota Depok dan KPUD Kota Depok. Selanjutnya, peneliti membuat panduan wawancara sebelum turun lapangan yang terlebih dahulu di konsultasikan dengan pembimbing. Sementara itu, penajaman pada panduan wawancara dilakukan setelah peneliti mendapat informasi-informasi yang didapat saat penelusuran.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD), disamping didukung dengan kajian literatur dan dokumen. Studi kepustakaan dan dokumen digunakan sebagai *cross check* atas informasi yang didapatkan dari sumber. Tahap berikutnya adalah wawancara dengan para informan atau narasumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi berstruktur dan

terbuka. Pada saat melakukan wawancara, peneliti berusaha memberikan pertanyaan yang mudah dipahami oleh informan, sehingga jawaban yang diberikan bisa fokus dan tidak melebar kemana-mana. Namun, adakalanya informan memberikan informasi-informasi tambahan melebihi dari pertanyaan yang diajukan. Dan terkadang, informasi tambahan yang diberikan menarik dan dapat digunakan untuk menambah kedalaman penelitian, sehingga peneliti akan berusaha menggali informasi tersebut lebih dalam lagi tanpa menggunakan panduan wawancara yang sudah dibuat. Namun, jika informan memberi jawaban atau informasi yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang peneliti ajukan, maka peneliti akan mengulang kembali pertanyaan peneliti tetapi dengan menggunakan analogi atau pertanyaan lain yang mudah dipahami oleh informan.

Wawancara dengan para informan dilakukan peneliti dengan terlebih dahulu membuat perjanjian mengenai waktu dan tempat, kapan dan dimana wawancara dapat dilaksanakan. Hampir semua informan yang peneliti temui untuk diwawancara, melakukan pertemuan dengan peneliti di rumah tempat tinggal informan dan beberapa orang dikantor DPRD dan kantor partai.

Wawancara dengan Ketua DPD Partai Golkar dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Kota Depok. Wawancara dengan ketua DPC Partai Demokrat dilakukan dua kali, pertama dilakukan dikantor DPC Partai Demokrat Kota Depok, wawancara kedua dilakukan dikantor DPRD Kota Depok. Berikutnya wawancara dengan Ketua PAC PDIP Kota Depok, dilakukan di Kantor PDIP Kota Depok. Sementara beberapa anggota DPRD partai Demokrat Kota Depok wawancara dilakukan setelah *Focus Group Discussion* (FGD) dan dilakukan di kantor DPRD dan kantor DPC Partai Demokrat Kota Depok. Sedangkan ketua PAC dan konstituen Partai Demokrat, wawancara dilakukan di rumah masing-masing.

Upaya membangun suasana wawancara yang baik peneliti lakukan terutama dalam memahami situasi dan kondisi yang melingkupi. Dengan cara demikian, kelengkapan serta kedalaman data dan informasi yang sudah digali akan terjamin. Wawancara dengan informan dilakukan secara tatap muka dan langsung (*face-to-face interview*) dengan berpedoman pada sejumlah daftar pertanyaan terbuka sebagai *interview guide*. Dalam mengajukan pertanyaan, peneliti tidak terpaku

hanya pada daftar pertanyaan yang disediakan, fleksibilitas metode ini memungkinkan berkembangnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk lebih mendalami isu dan persoalan yang digali dalam kerangka fokus studi.

Demikian pula wawancara dapat dilakukan dengan mengalir tanpa dibatasi dengan batasan waktu dan ruang tertentu mengingat kesibukan informan. Beberapa wawancara direkam dengan baik sehingga peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data. Alat bantu yang dipergunakan peneliti berupa buku catatan untuk mencatat poin-poin penting hasil wawancara dengan sumber data; dan alat perekam suara (*voice recorder*) yang berfungsi untuk merekam percakapan apabila memungkinkan dan informan bersedia direkam.

Wawancara dengan informan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dimaksud agar mempermudah peneliti untuk mengerti dan memahami jawaban yang disampaikan, walaupun terkadang peneliti juga sesekali menggunakan bahasa daerah (jawa) untuk menambah suasana kekeluargaan dan keakraban, karena ada beberapa ketua PAC Partai Demokrat yang berasal dari jawa. Namun jika ada jawaban-jawaban yang kurang jelas dan peneliti kurang memahami, peneliti meminta untuk mengulang kembali jawaban informan tersebut dengan bahasa yang sederhana.

Sementara itu FGD dilakukan dengan mengumpulkan para anggota DPRD Partai Demokrat Kota Depok. Awalnya, FGD direncanakan dengan mengundang semua anggota DPRD fraksi Partai Demokrat yang berjumlah 15 orang, namun, FGD tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan waktu mereka, sehingga FGD hanya dilakukan sekali dan waktunya kurang lebih 45 menit serta dihadiri oleh empat orang anggota DPRD. Empat orang tersebut adalah Jeanne Noveline, Endah Winarti, Siti Nurjanah dan Ayi Nurhayati. Dalam FGD tersebut penulis menentukan tema tentang peran anggota dewan fraksi Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok. Selanjutnya peneliti memberi arahan terlebih dahulu agar diskusi tidak melenceng dari topik bahasan. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tetapi FGD tersebut tetap bisa memberikan informasi-informasi yang peneliti perlukan, walaupun tetap perlu penajaman melalui wawancara yang lebih mendalam lagi.

Kemudian, data yang sudah di peroleh peneliti klasifikasikan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua)¹⁵.

3.4 Teknik Analisa Data

Merriam (1988) dan Marshal & Rossman (1989) dalam Creswell (1994) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dan analisis data harus merupakan sebuah proses yang bersamaan. Dimana, Schatzman dan Strauss (1973) dalam Creswell (1994) menyatakan bahwa analisa data kualitatif terutama bertujuan untuk mengelompokan benda, orang dan peristiwa dan properti yang menjadi karakteristiknya. Proses analisa data bersifat pilih-pilih; tidak ada cara yang benar, Tesch, 1990 dalam Creswell, 2002).

Analisa data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, insterpretasi data dan penulisan laporan naratif. Data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara, dituliskan dalam transkrip wawancara kemudian diberi kode pada fenomena atau pernyataan yang sama. Setelah itu dilakukan kategorisasi temuan dengan mengaitkan dan mengkontekstualisasikan untuk mencari hubungan-hubungan yang mengaitkan pernyataan dengan kejadian dalam sebuah konteks sehingga membentuk sebuah keutuhan narasi.

Sedangkan proses analisa data dilakukan oleh peneliti mencakup seluruh hasil pengumpulan data dari lapangan, menyortir data kedalam kategori, memformat data kedalam deskripsi narasi, menentukan pola, serta menampilkannya kedalam skema relasi hasil analisa. Setelah itu data diinterpretasikan, dicari makna dari setiap gejala yang ditemukan dilapang, mencatat pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada alur kausalitas dan proposisi, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sementara yang selanjutnya diperoleh kesimpulan final. Semua proses itu dilakukan untuk

¹⁵ <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian>. diakses tanggal 17 Juni 2011, pukul 13.00.

mendapatkan gambaran bagaimana peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilu pada Kota Depok tahun 2010.

3.5 Strategi Validitas Data

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif dan memenuhi kriteria dan etika penelitian ilmiah. Selain itu, peneliti juga menggunakan strategi validitas temuan hasil lapangan. Jika ketika wawancara dengan informan kemudian menemukan jawaban yang menurut peneliti tidak sesuai, maka peneliti akan melakukan konfirmasi ulang kepada informan yang bersangkutan serta mengkonfirmasi dengan informan lain. Jika ternyata tidak sesuai jawaban informan tersebut dan informan lain memberikan koreksi, maka peneliti akan berpegang pada data atau informasi yang diberikan oleh kebanyakan informan lain yang memiliki pendapat atau informasi yang sama.

Validitas penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana upaya memeriksa data dengan memanfaatkan hal lain untuk keperluan pengecekan dan perbandingan (Moelong dan Salim, 2006). Triangulasi dilakukan dengan cara: 1). Data yang diperoleh disatu kesempatan, diperiksa kebenarannya pada kesempatan yang lain; 2). Data observasi dikroscek dengan data wawancara; 3). Data wawancara dikroscek dengan dokumen terkait; 4). Data dari narasumber satu dikroscek dengan narasumber yang lain. Selain itu, peneliti juga melakukan kroscek kembali kepada informan. Hal ini peneliti lakukan untuk menghindari salah tafsir atau salah pemaknaan atas jawaban informan ketika wawancara.

3.6 Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, baik secara teknis maupun metodologis. Adapun potensi keterbatasan yang dimaksud, antara lain: pertama, alokasi waktu pengumpulan data atau informasi lapangan yang relatif panjang, sehingga menjadikan peneliti kehilangan “semangat”; kedua, ketersediaan waktu informan penelitian dalam memberikan informasi secara lengkap dan kesulitan untuk menemui informan untuk berbicara dan atau bertemu dan secara lepas terbuka mengingat kesibukan informan; mereka adalah para anggota dewan dan

pekerja, dimana untuk bertemu dan wawancara harus menyesuaikan dengan jadwal mereka; ketiga, konstituen Partai Demokrat. Peneliti merasa kesulitan untuk mendapatkan data seputar konstituen Partai Demokrat, karena beberapa ketua PAC yang peneliti wawancara tidak bisa memastikan kalau yang bersangkutan adalah konstituen Partai Demokrat saat pemilu 2009 maupun saat pemilukada tahun 2010. Namun ada juga beberapa informan yang bisa memberikan informasi meskipun tidak secara detail. Keempat, bias peneliti. Peneliti sebagai salah satu anggota partai Partai Keadilan Sejahtera, saat ini bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPR RI Fraksi PKS, yang mempunyai peran sebagai *supporting system* anggota DPR. Kelima, ada salah satu informan yang penulis tidak bisa bertemu untuk melakukan wawancara yaitu ketua DPRD Kota Depok yang juga sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Depok. Padahal penulis sudah melakukan kontak langsung dengan beliau, juga sudah mengirimkan surat permohonan wawancara yang sudah diterima sekretaris pribadi beliau, tetapi sampai batas waktu yang penulis tentukan yang bersangkutan belum juga bisa penulis wawancarai karena kesibukan beliau, padahal menurut penulis beliau termasuk salah satu informan yang cukup penting karena menurut beberapa informan lain, beliau termasuk orang yang “berseberangan” dengan keinginan mayoritas kader Partai demokrat Kota Depok. Beliau juga diinformasikan oleh beberapa informan awal termasuk orang yang kurang cocok dengan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok.

BAB IV

KOTA DEPOK DALAM BINGKAI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

4.1. Profil Kota Depok

Kota Depok dahulu merupakan dusun terpencil, yang kemudian pada tanggal 18 Mei 1696 seorang pejabat tinggi VOC Cornelis Chanstelein membeli tanah tersebut dan sedikit wilayah Batavia. Pada tahun 1871 pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok membentuk pemerintahan sendiri.

Pada tahun 1975 dimulailah pembangunan perumahan oleh Perumnas yang saat ini dikenal dengan kawasan Depok I dan menyusul pembangunan perumahan yang dikenal dengan kawasan Depok II tengah dan timur. Pesatnya pembangunan di Kota Depok, maka pada tanggal 18 Maret 1982 status pemerintahan yang semula kecamatan menjadi Kota Administrasi Depok kabupaten Bogor.

Penetapan Depok sebagai Kotamadya, berdasarkan pada Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok pada tanggal 20 April tahun 1999. Kotamadya Depok diresmikan pada tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok selanjutnya dijadikan suatu landasan yang bersejarah sebagai hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 kemudian diresmikan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud), saat itu Kota Administratif Depok terdiri dari tiga Kecamatan dan duapuluh empat desa, yaitu :

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :
Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

2. Kecamatan Beji terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru.
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati Mulya, Kelurahan Tirta Jaya.

Kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 1999, wilayah Administratif Kota Depok ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terdiri dari tiga Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan, Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Sementara itu, dari tahun 1982 sampai tahun 1999, kurang lebih selama 17 tahun hingga Depok menjadi Kotamadya, penyelenggaraan pemerintah Kota Administratif Depok mengalami beberapa pergantian kepemimpinan yaitu :

1. Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm), Walikotatif periode 1982 sampai 1984

2. Drs. H.M.I Tamdjid, Walikotaatif periode 1984 sampai 1988
3. Drs. Abdul Wachyan, Walikotaatif periode 1988 sampai 1991
4. Drs. Moch. Masduki, Walikotaatif periode 1991 sampai 1992
5. Drs. H.Sofyan Safari Hamim, Walikotaatif 1992 sampai 1996
6. Drs. H. Yuyun WS, Plh Walikotaatif 1996 sampai 1997
7. H. Badrul Kamal, Walikotaatif 1997 sampai 1999

Setelah Depok disahkan menjadi Kotamadya pada tahun 1999, untuk pertama kalinya yaitu tahun 2005, Kota Depok melakukan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung. Hal ini sebenarnya tidak lepas dari dampak reformasi tahun 1998 yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, termasuk bidang politik. Partai politik baru bermunculan, anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan mekanisme dicalonkan oleh partai politik. Pun demikian dalam pemilihan kepala daerah, partai politik yang mempunyai jumlah kursi di DPRD atau suara yang cukup sesuai dengan aturan undang-undang untuk mencalonkan kepala daerah dan wakilnya, boleh mencalonkan atau mengukung calonnya sendiri.

Hingga tahun 2011, Kota Depok sudah melakukan dua kali pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung. Sejak era pemilukada secara langsung, hingga sekarang, Kota Depok telah dipimpin oleh pasangan walikota dan wakil walikota :

1. Dr. Ir. Nurmahmudi Ismail, MSc dan Drs. Yuyun WS, memimpin Kota Depok untuk periode 2005 sampai 2010.
2. Dr. Nurmahmudi Ismail, MSc dan Drs. KH. Idris Abdul Shamad, memimpin Kota Depok untuk periode 2010 sampai 2015

Nurmahmudi Ismail, sudah dua kali memenangkan pemilukada langsung Kota Depok, tetapi dengan wakil yang berbeda. Pasangan ini di usung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkoalisi dengan partai lain.

Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dari pemerintah dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pada akhir tahun 2009 Kota Depok yang semula 6 kecamatan dimekarkan menjadi 11 Kecamatan. Pemekaran ini berdasarkan pada Perda Kota Depok No. 8 tahun 2007 dengan implementasi mulai dilaksanakan

tahun 2009. Wilayah yang mengalami pemekaran ada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Tapos, merupakan pemekaran dari Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Bojongsari pemekaran dari Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cilodong pemekaran dari Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cipayung pemekaran dari Kecamatan Pancoranmas dan Kecamatan Cinere pemekaran dari Kecamatan Limo. Jadi, saat ini Kota Depok memiliki 11 kecamatan, 63 kelurahan, 871 rukun warga (RW) dan 4856 rukun tetangga (RW).

Tabel 5 :
Jumlah kecamatan, kelurahan, RW, RT Kota Depok tahun 2010

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	RW	RT
1	Sawangan	7	75	355
2	Bojongsari	7	77	300
3	Pancoran Mas	6	104	608
4	Cipayung	6	52	321
5	Sukmajaya	5	122	875
6	Cilodong	5	63	340
7	Cimanggis	6	91	640
8	Tapos	7	128	620
9	Beji	6	72	372
10	Limo	4	45	218
11	Cinere	4	42	207
Jumlah		63	871	4.856

Sumber : BPS Kota Depok 2010

4.2 Kondisi Geografis Dan Demografis

4.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19' 00" – 6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00" – 106° 55' 30" Bujur Timur. Disebelah utara, kota ini berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Disebelah selatan, Kota

Depok berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sindur dan Parung, Kabupaten Bogor, disebelah utara berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Bentang alam Kota Depok dari selatan ke utara merupakan daerah dataran rendah-perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah yang masuk dalam propinsi Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km².

Selain itu, kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub satuan wilayah aliran sungai. Disamping itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar. Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara yaitu Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesangrahan dan Kali Cikeas.

4.2.2 Kondisi Demografis

Sedangkan secara demografi, Kota Depok, yang menjadi lokasi penelitian ini terletak di propinsi Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Ibukota negara Indonesia. Sebagai daerah penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. Jumlah penduduknya menurut sensus tahun 2010 mencapai 1.736.565 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 879.325 jiwa dan penduduk perempuan 857.240 jiwa¹⁶. Kecamatan Cimanggis merupakan kecamatan yang paling banyak

¹⁶ Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, BPS.

penduduknya dibanding dengan kecamatan lain di Kota Depok yaitu 242.214 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Limo, yaitu 87. 615 jiwa.

Tabel 6 :
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sawangan	63.023	60.333	123.356
2	Bojongsari	50.895	48.873	99.768
3	Pancoran Mas	106.322	103.882	210.204
4	Cipayung	65.160	62.547	127.707
5	Sukmajaya	116.163	116.732	232.895
6	Cilodong	62.724	60.989	123.713
7	Cimanggis	123.136	119.078	242.214
8	Tapos	109.348	107.233	216.581
9	Beji	83.753	80.929	164.682
10	Limo	44.575	43.040	87.615
11	Cinere	54.226	53.604	107.830
Jumlah		879.325	857.240	1.736.565

Sumber : Sensus penduduk tahun 2010, BPS.

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok dapat dilihat dari meningkatnya pengembangan kawasan perumahan. Angka kepergian penduduk Kota Depok tahun 2004 memperlihatkan pula pola yang berfluktuasi, dimana jumlah penduduk yang datang 11,899 jiwa dan penduduk yang pergi 4.503 jiwa, atau rata-rata jumlah pendatang pertahun mencapai 7,396 jiwa. Berdasarkan perkembangan tersebut diperkirakan jumlah penduduk yang datang ke Kota Depok pada waktu mendatang akan meningkat, seiring dengan semakin banyaknya operasional kegiatan jasa dan niaga yang berkembang pesat.

4.3 Kondisi Ketenaga Kerjaan

Sementara itu, penduduk Kota Depok berdasarkan survei angkatan kerja nasional 2009, dapat diperoleh gambaran bahwa sebanyak 653.171 jiwa bekerja, yang menganggur sekitar 71.182 jiwa. Sedangkan penduduk Kota Depok yang tergolong angkatan kerja sebanyak 417.433 jiwa. Penduduk yang bekerja masih didominasi laki-laki daripada perempuan, laki-laki 65,54% dan perempuan 34,46%. Penduduk yang bekerja sebagian besar di sektor jasa kemasyarakatan. Status pekerjaan pun masih didominasi sebagai buruh, karyawan atau pegawai sebanyak 60,21%, kemudian wiraswasta (berusaha sendiri) sebanyak 20,49%.

Tabel 7 :
Presentase penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di kota Depok 2010

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	15.647	2.361	18.008
2	Industri pengolahan	60.298	37.955	98.253
3	Perdagangan besar/ eceran, rumah makan dan hotel	97.343	75.972	173.315
4	Jasa kemasyarakatan	119.329	80.360	199.689
5	Pertambangan dan penggalan, listrik, gas dan air minum, konstruksi, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.	135.488	28.418	163.906
Jumlah		428.105	225.066	653.171

Sumber : Sensus Penduduk tahun 2010, BPS

4.4 Kondisi Pendidikan

Untuk ukuran sebuah kota yang makin berkembang pesat, Kota Depok yang memiliki beberapa kampus besar di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Politeknik negeri Jakarta boleh dibilang, tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kota Depok masih rendah. Hal ini berdasarkan survei susenas tahun 2010, masyarakat Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas yang memiliki ijazah tertinggi yaitu SLTA dan sederajat sebanyak 22,70%. Prosentase ini merupakan tertinggi dibanding jenjang pendidikan yang lain.

Tabel 8 :

Persentase penduduk 10 tahun keatas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki dan jenis kelamin di Kota Depok , 2010

No	Ijazah tertinggi yang dimiliki	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak punya ijazah	12.21	16.04	14.05
2	SD/ MI/ sederajat	15.94	21.05	18.19
3	SLTP/ MTs/ sederajat	19.48	20.83	20.13
4	SMU/ MA/ sederajat	22.85	21.64	22.27
5	SMKejuruan	16.04	10.38	13.32
6	Diploma I/ II	0.75	1.17	0.95
7	Diploma III	3.72	2.73	3.24
8	Diploma IV/ S1	8.43	5.91	7.22
9	S2/ S3	0.58	0.27	0.43
	Kota Depok	100.00	100.00	100.00

Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS

4.5 Kondisi Keberagamaan

Kota Depok memiliki tingkat keberagaman yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari adanya enam agama yang dipeluk oleh warga Kota Depok, dan mereka diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Jarang sekali terjadi konflik yang disebabkan karena faktor agama. Mereka hidup berdampingan

dengan damai tanpa harus saling curiga diantara pemeluk agama yang berbeda. Padahal bagi pemeluk agama islam, di Kota Depok ada beberapa aliran yang selama ini dipandang “sesat” oleh islam kebanyakan seperti LDII, Ahmadiyah. Keenam agama tersebut adalah islam, kristen katolik, kristen protestan, hindu, budha dan konghucu. Berikut tabel penduduk menurut agama yang dianut di Kota Depok tahun 2010.

Tabel 9 :
Penduduk menurut agama yang dianut di Kota Depok tahun 2010

No	Keca- Matan	Islam	Pro Testan	Katoli k	Hindu	Budha	Khong Hucu	Jumlah
1	Sawangan	153.337	3.127	734	252	301	2	157.753
2	Pancoran Mas	140.775	247.420	8.215	11079	1.464	1.191	410.144
3	Sukmajay a	224.621	21.971	15.400	1378	2.392	-	265.762
4	Cimanggis	389.677	20.669	10.077	1821	2.301	-	424.545
5	Beji	105.049	8.486	3.410	806	1.059	-	118.810
6	Limo	104.028	6.522	4.644	145	1.226	-	116.565
Kota Depok		1.117.487	308.195	42.480	15.481	8.743	1.193	1.493.579

Sumber : Sensus Penduduk tahun 2010, BPS (Data masih dalam 6 Kecamatan)

Sementara itu, beberapa sarana tempat ibadah juga banyak betebaran di Kota Depok. Karena tempat ibadah merupakan salah satu sarana yang amat penting untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Bahkan Kota Depok memiliki *icon* Masjid Kubah Emas, yang cukup terkenal seantero nusantara. Tahun 2010, di Kota Depok terdapat 768 masjid, 851 langgar, 1.086 mushala, 6 gereja katolik, 82 gereja protestan, 2 vihara dan 5 pura.

Tabel 10 :

Banyaknya tempat ibadah menurut jenis agama di Kota Depok tahun 2010

No	Kecamatan	Masjid	Langgar	Mushala	Gereja katolik	Gereja protestan	Vihara	Pura
1	Sawangan	152	177	241	-	4	-	-
2	Pancoran Mas	149	175	175	2	32	1	1
3	Sukmajaya	175	135	189	2	18	-	1
4	Cimanggis	156	106	279	1	16	-	1
5	Beji	48	67	115	-	7	-	-
6	Limo	88	191	87	1	5	1	2
Kota Depok		768	851	1.086	6	82	2	5

Sumber : Sensus Penduduk tahun 2010, BPS (Data masih dalam 6 Kecamatan)

4.6 Struktur Masyarakat Kota Depok

Pada hakikatnya kota merupakan salah satu tempat bagi penduduk untuk tinggal atau menetap. Penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah kota atau urban ini, berasal terutama dari berbagai wilayah di sekitarnya. Perbedaan wilayah, dalam hal ini adalah *regional development* akan membedakan sosial dan ekonomi suatu wilayah yang merupakan penyebab dari pergerakan penduduk antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Masyarakat perkotaan sering juga disebut sebagai *urban community*. Beberapa ciri dari masyarakat perkotaan adalah pada umumnya mereka dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain dan memiliki jalan pikiran yang rasional serta memiliki interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Sehingga perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata cepat terjadi di perkotaan. Hal ini dikarenakan kota biasanya lebih terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.

Kota Depok merupakan kota yang berfungsi sebagai kota penyangga kehidupan dan kegiatan ekonomi kota Jakarta atau disebut juga sebagai daerah *sub-urban*. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi ke kota Jakarta menjadikan sebagian penduduknya memilih untuk tinggal di daerah *sub-*

urban dengan tetap bekerja di dalam kota Jakarta. Hal tersebut ternyata juga berdampak terhadap perkembangan kehidupan di kota Depok, sehingga kepadatan penduduk dan kebutuhan hidup di kota Depok semakin meningkat pula. Kota Depok juga dijadikan sebagai tempat tinggal *commuter*, yaitu orang yang melakukan perjalanan rutin pulang-pergi ke kota Jakarta.

Masyarakat Kota Depok, seperti umumnya kota metropolitan, bersifat terbuka dan memiliki daya tarik ekonomis bagi para pendatang. Dari sisi etnis, penduduk Kota Depok dapat dibedakan menjadi dua kelompok (Yuliani Widiyaningsih, tesis, 2007) pertama, penduduk asli yang memang sudah turun temurun tinggal di daerah ini, dan kedua, penduduk pendatang. Penduduk asli meliputi kelompok penduduk keturunan Belanda yang turun temurun tinggal di Kota Depok, dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan Belanda Depok. Umumnya kelompok penduduk keturunan Belanda ini masih banyak ditemukan disekitar Jalan Kartini, Pancoran Mas. Dikawasan ini pula rumah-rumah bergaya Belanda tempo dulu masih kokoh berdiri.

Sementara itu, kelompok pendatang adalah mereka yang berpindah ke Kota Depok karena pergeseran kondisi di Kota Jakarta. Kelompok pendatang lainnya dikenal sebagai orang-orang yang pindah karena faktor ekonomi dan juga karena faktor kebutuhan tempat tinggal dan bekerja di Jakarta. Dari tipikal diatas, dapat dikenali bahwa penduduk pendatang kelompok pertama sebagian besar adalah suku Betawi yang berasal dari Jakarta, sedangkan pendatang kelompok kedua adalah multi etnis dengan cara pikir budaya modern. Ketiga kelompok itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya metropolitan, namun dalam beberapa hal potensi lokal dalam bentuk budaya seni, khususnya suku Betawi yang bisa menjadi aset budaya Kota Depok.

Kondisi sosial budaya Kota Depok saat ini sudah mengarah pada budaya metropolis yang multietnis dan dari berbagai tingkat intelektualitas. Namun masih dalam ikatan satu homogenitas agama tanpa mengucilkan agama minoritas. Dimasa yang akan datang, kondisi sosial budaya yang ada akan terus berkembang dan ikatan homogenitas agama akan masih ada dengan kadar yang berbeda.

4.7 Dinamika Politik Kota Depok

Ketika rezim orde baru masih berkuasa, Partai Golkar merupakan kekuatan mayoritas. Namun, pasca tumbang rezim orde baru, dan diganti dengan era reformasi, seperti halnya daerah-daerah lain, kebangkitan politik lokal mulai unjuk gigi. Demikian juga di Kota Depok. Kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini tiarap mulai menampakkan diri. Dari pemilu yang dilaksanakan sejak runtuhnya rezim orde baru, perolehan suara maupun kursi DPRD Kota Depok mengalami perubahan, bahkan partai-partai lama mengalami penurunan dukungan terutama PDIP dan Golkar.

Dalam dua kali pemilu tahun 2004 dan tahun 2009, justru Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mampu menggeser dominasi partai Golkar dan PDIP sebagai pemenang pemilu tahun 1999. Bahkan kedua partai itu (Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera) disebut-sebut oleh pengamat sebagai *the rising stars*. Berikut tabel perolehan suara dan kursi partai-partai di Kota Depok dari pemilu 1999 sampai pemilu tahun 2009.

Tabel 11 :

Perolehan suara dan kursi pemilu di Kota Depok Tahun 1999-2009

No	Nama Partai	Jumlah Suara dan Kursi					
		1999		2004		2009	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi
1	PDIP	177.145	12	72.647	5	53.290	5
2	Golkar	96.223	6	112.330	8	74.757	7
3	PKS	41.613	3	176.858	12	125.490	11
4	PAN	96.564	7	63.929	5	44.450	5
5	PKB	24.997	2	23.731	2	19.747	1
6	PPP	101.213	7	45.281	4	28.495	2
7	PBB	14.467	1	17.518	-	14.844	-
8	PKP	6.383	1	-	-	-	-
9	PP	6.154	1	-	-	-	-
10	PDS	-	-	25.929	1	13.052	1
11	Demokrat	-	-	102.777	8	186.548	15

Sumber : KPUD Kota Depok

Dari tabel diatas, jika kita analisa partai yang menempati posisi tiga besar, baik perolehan suara maupun kursi terbanyak pada pemilu tahun 1999 sampai pemilu tahun 2009 selalu berubah. Pemilu tahun 1999, pemilu pertama setelah reformasi, PDIP menjadi partai dengan perolehan suara dan kursi terbanyak yaitu dua belas kursi DPRD. Kalau kita lihat latarbelakang kemenangan PDIP saat itu sebenarnya tidak terlepas dari posisi Megawati Soekarno Putri, sebagai ketua umumnya yang mendapat perlakuan tidak adil saat Orde Baru berkuasa, sehingga mendapat simpati dari rakyat. Juga, dengan jargonnya sebagai partai wong cilik, partai yang membela kepentingan kalangan masyarakat kecil, yang selama orde baru berkuasa relatif terpinggirkan. Akhirnya pada pemilu 1999 PDIP menjadi partai pemenang, karena rakyat bersimpati atas Megawati saat itu.

Sementara Golkar, partai yang selama ini identik sebagai partainya Orde Baru, dan selalu menjadi partai pemenang, pada pemilu 1999 di Kota Depok turun diposisi kedua dengan perolehan enam kursi DPRD. Hal ini menggambarkan bahwa dominasi Golkar selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, sedikit demi sedikit mulai tumbang. Sementara PKS dengan perolehan tiga kursi DPRD, bisa dibilang sebuah capaian yang luar biasa, partai baru, dipimpin oleh anak-anak muda dan boleh dibilang satu-satunya partai yang tidak mengandalkan figur dalam kampanye, tetapi mesin politik dari para kadernya.

Pemilu tahun 2004 konstalasi politik berubah, PDIP yang pada pemilu tahun 1999 menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, digeser oleh *the rising star* PKS. Kekalahan PDIP pada pemilu 2004 sebenarnya tidak lepas dari keagalannya mengantarkan cita-cita rakyat menuju perubahan yang jauh lebih baik serta ditambah lagi menurunnya citra Megawati Soekarno Putri yang selama ini menjadi harapan mereka. Hal ini ditambah dengan pemahaman masyarakat Kota Depok yang sudah mulai berubah. Masyarakat Kota Depok sudah mulai rasional dalam memilih calon-calon wakilnya yang duduk di DPRD. Partai yang menempatkan anggotanya di DPRD tidak berkualitas, memiliki moral rendah dengan sendirinya akan di hukum oleh masyarakat. Kondisi inilah yang mungkin dialami oleh PDIP.

Kenyataan inilah yang membawa kemenangan PKS pada pemilu 2004 di Kota Depok. PKS mampu memperoleh kursi terbanyak dengan jumlah dua belas

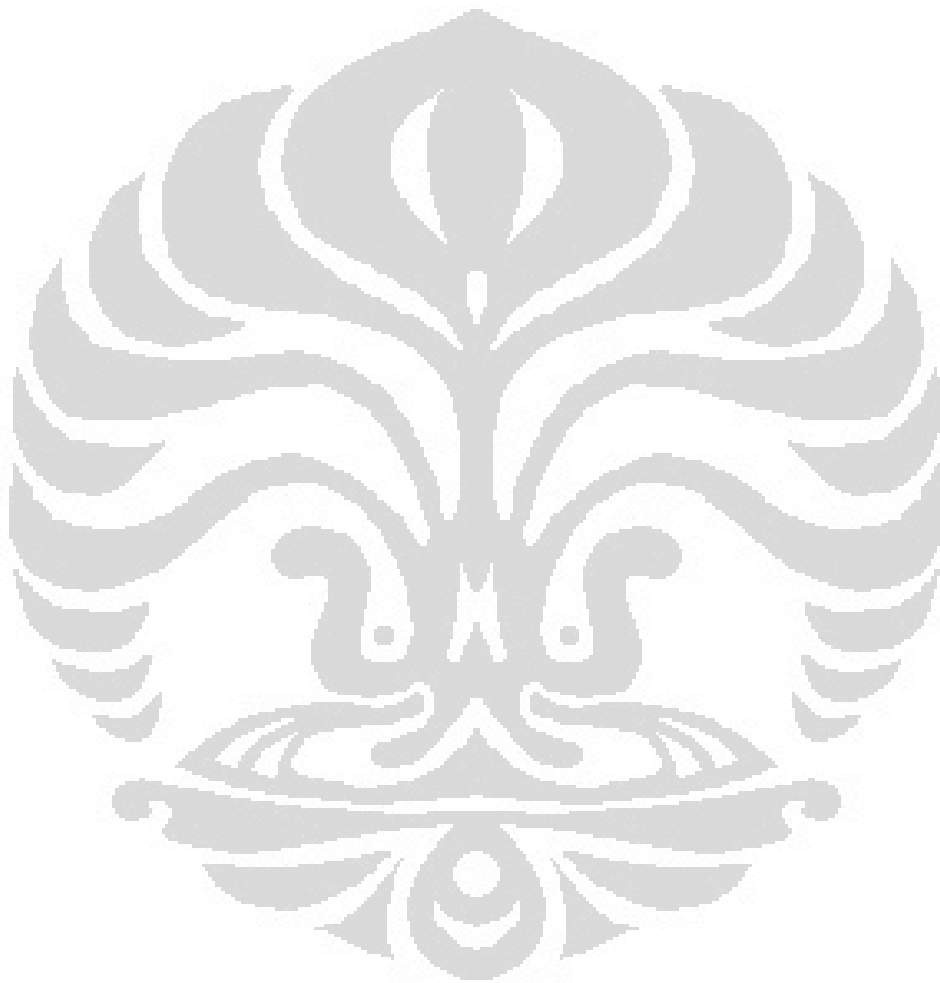
kursi DPRD. Kemenangan PKS sebenarnya tidak lepas dari kemampuan partai ini dalam menjual *platform* partainya yang mngedepankan “bersih dan peduli”. Jargon yang diusung oleh PKS saat itu memang lebih aktual dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, hal ini mengingat penyelenggaraan pemerintahan yang masih sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. PDIP turun drastis dan hanya memperoleh lima kursi DPRD. Sementara Golkar, dari lima kursi di pemilu tahun 1999 bertambah menjadi delapan kursi, naik tiga kursi.

Sedangkan pada pemilu tahun 2009 kondisi politik berubah lagi, PKS yang pada pemilu tahun 2004 menjadi partai pemenang dengan mengumpulkan dua belas kursi, mampu dikalahkan oleh Partai Demokrat yang memperoleh lima belas kursi DPRD. Kemenangan Partai Demokrat sebenarnya tidak lepas dari figur SBY. SBY dianggap sebagai figur yang tenang, kalem dan tidak mudah emosi sehingga disukai oleh masyarakat. Sementara Golkar, perolehan kursinya kembali turun, dari delapan kursi menjadi tujuh kursi. Hal ini menunjukkan, masyarakat Kota Depok sudah semakin cerdas. Partai politik yang tidak benar-benar memperjuangkan aspirasinya, pada pemilu berikutnya akan dihukum dengan tidak memilihnya kembali.

Berikutnya, meskipun pada pemilu tahun 2004 PKS merupakan partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD, namun PKS tidak mampu menempatkan kadernya menjadi ketua DPRD. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman PKS dalam melakukan komunikasi politik dengan partai lain, sehingga partai-partai lain melakukan koalisi untuk menggagalkan PKS menjadi ketua DPRD. Selanjutnya, pada pilukada pertama tahun 2005, PKS mampu mengantarkan Nurmahmudi Ismail calon yang diusungnya menjadi walikota periode 2005-2010, berbeda dengan pilukada tahun 2010 lalu. Partai Demokrat sebagai partai pemenang tahun 2009, tetapi tidak mampu mengantarkan calon walikota dan wakil walikotanya menjadi walikota Kota Depok periode 2010-2015. Hal ini dikarenakan adanya “kecelakaan politik” ketika menentukan calon yang diusung dalam pilukada saat itu.

Hingga saat ini, dinamika politik Kota Depok bisa dibilang masih sarat dengan friksi-friksi partai politik, baik internal maupun eksternal. Sehingga hal ini sering kali menjadi penghambat bagi pembangunan Kota Depok. Keadaan itu bisa

kita lihat bagaimana hubungan antara DPRD Kota Depok dengan Walikota selama ini, yang nota bene beda partai. Ketua DPRD dipimpin oleh Partai Demokrat, sementara walikota berasal dari PKS, partai yang menjadi rival terberat Partai Demokrat pada pemilu tahun 2009.



BAB V

KONTESTASI ELIT DAN BASIS SOSIAL PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK.

5.1 Gambaran Umum Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan fenomena baru dalam dunia politik di Indonesia. Betapa tidak, sepanjang sejarah republik ini baru kali ini ada partai politik yang ruh dan ideologinya benar-benar mengandalkan figur sentral seorang tokoh. Termasuk dalam kancah politik elit Indonesia saat ini. Atas fenomena tersebut, saat pemilu 2004 para pengamat menjuluki Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat sebagai *the rising stars* dengan raihan suara 7-8 persen. Sebagai partai baru tetapi mampu menarik simpati masyarakat Indonesia dengan perolehan suara yang cukup signifikan.

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif dari Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY) yang terilhami dari kekalahannya dalam pemilihan calon wakil presiden pada sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil *pooling public* yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri SBY, beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi wakil presiden RI tetapi menjadi presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6).

Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum).

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang yang dibantu oleh Sutan Bhatogana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. Lima puluh tiga (53) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen.

Setelah diadakan penelitian, maka Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang. Pada malam harinya pukul 20.30 WIB, Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001. Sepekan kemudian tepatnya tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC) oleh 99 orang deklarator Partai Demokrat dideklarasikan¹⁷.

Selanjutnya, pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh partai demokrat setelah dideklarasikan. Saat itu, perolehan suara partai demokrat secara nasional sebanyak 7,45% atau 8.455.225 dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Ditingkat Kota Depok, pada pemilu 2004, partai demokrat mampu menempatkan 8 wakilnya duduk sebagai anggota DPRD Kota Depok. Perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Kota Depok nomor dua bersama partai golkar setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara itu pada pemilu tahun 2009, Partai Demokrat yang secara nasional merupakan partai pemenang, di Kota Depok pun demikian. Partai Demokrat mampu menyalip perolehan suara kursi PKS sebagai partai peroleh kursi terbanyak di DPRD Kota Depok tahun 2004, yaitu dengan mampu mendudukkan kadernya di kursi DPRD Kota Depok sebanyak 15 orang. Sementara PKS melorot ke posisi ke dua dengan memperoleh 11 kursi DPRD Kota Depok.

Hingga sekarang, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok sudah mengalami tiga kali pergantian pimpinan. Periode pertama, DPC Partai Demokrat di pimpin oleh Sayuti. Periode kedua, DPC Partai Demokrat Kota Depok di pimpin oleh Edi Supeno. Dan saat ini, DPC Partai Demokrat di

¹⁷ www.demokrat.or.id

pimpin oleh Agung Witjaksono yang tinggal beberapa bulan kedepan akan habis juga masa kepemimpinannya.

5.2 Pemilukada Kota Depok Dan Dinamikanya

Pemilukada merupakan proses politik yang melibatkan partisipasi publik dalam jumlah besar, melibatkan banyak aktor dengan beragam kepentingan, serta melibatkan berbagai strategi untuk meraih sebanyak mungkin dukungan agar dapat memenangkan jabatan politik tertinggi di daerah. Dengan kata lain, pemilukada merupakan pertarungan politik yang berlangsung dalam arena yang serba kompleks, sehingga wajar jika dalam upaya meraih kemenangan berpotensi memicu konflik bahkan kekerasan politik (Dede Mariana, 2009).

Pemilukada berbeda dengan pemilihan presiden atau wakil presiden, karena figur pemilukada merupakan figur yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat daerah. Kedekatan emosional elit lokal dengan massa lebih mudah menimbulkan konflik. Di sisi lain, jika kita melihat pada karakteristik budaya politik di Indonesia pada umumnya masih menggambarkan karakteristik hubungan elit dan massa yang diwarnai nuansa patrimonial. Konsekuensinya, massa lebih bercitra sebagai *supporters* (pendukung) dibandingkan sebagai *voters* (pemilih) yang mengetahui dan memahami hak dan kewajiban politiknya¹⁸.

Pemilukada juga merupakan indikator yang penting untuk melihat perubahan dalam sebuah masyarakat politik¹⁹. Proses pemilukada dapat mengungkapkan proses pertumbuhan infrastruktur politik, derajat politisasi, serta partisipasi politik masyarakat. Momentum pemilukada secara langsung adalah merupakan proses pembelajaran politik masyarakat di daerah. Konteks pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal²⁰. Pertama, pemilukada secara langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari

¹⁸ Dede Mariana, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung, 2009.

¹⁹ Cornelis Lay. "Rekrutmen Elit Politik", *Prisma No. 4*, April – Mei 1997, hal. 21

²⁰ Hendi Hendrar Prihadi. "Masa Depan Demokrasi Lokal", dalam *Suara Merdeka*, 5 Januari 2005

kebutuhan yang ingin diwujudkannya. Dengan cara demikian maka kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud.

Kedua, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Dengan demikian, akan tumbuh keberanian dan kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemandirian ini dengan sendirinya juga meminimalkan kecenderungan praktik mobilisasi massa yang dilakukan oleh partai-partai politik.

Ketiga, rakyat juga dituntut kedewasaan politiknya. Mereka harus siap secara mental untuk menerima perbedaan pilihan politik di antara mereka sendiri. Dalam pemilu jarak langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini akan memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil pada aras lokal. Akibatnya kadar dan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) serta keterlibatannya terhadap agenda masing-masing calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

Pemilihan legislatif tahun 2009 menghasilkan kejutan yang luar biasa bagi partai politik. Partai Demokrat yang merupakan partai baru dalam ranah politik Indonesia, mampu menjadi pengumpul suara terbanyak dalam pemilu tersebut. Dengan meraih 21.703.137 suara atau 20,85 % secara nasional, Partai Demokrat menjadi pemenang. Kemenangan itu telah menggusur dominasi partai lama seperti Partai Golkar, PDIP, dan PPP. Walaupun tidak menang secara mayoritas, namun kemenangan Partai Demokrat yang merupakan partai baru, menandakan adanya pergeseran fanatisme dukungan terhadap partai-partai lama dari para pemilih atau konstituen di Indonesia.

Sementara itu, walaupun tidak mayoritas, di Kota Depok, Partai Demokrat juga mampu menjadi pemenang dalam pemilu legislatif tahun 2009, yaitu dengan meraih 15 kursi DPRD. Kemudian diikuti oleh PKS dengan 11 kursi, Golkar dengan 7 kursi, PDIP mendapat 5 kursi, PAN 5 kursi, Gerindra 3 kursi, PPP mendapat 2 kursi dan terakhir PKB dan PDS masing-masing 1 kursi. Berikut tabel perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Depok Tahun 2009.

Tabel 12 :
Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Partai Politik di Kota Depok
Tahun 2009

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Suara Dalam Persen	Jumlah Kursi
1	Demokrat	186.548	27.37%	15
2	PKS	125.490	18.41%	11
3	Golkar	74.757	10.97%	7
4	PDIP	53.290	7.82%	5
5	PAN	44.450	6.32%	5
6	Gerindra	40.185	5.90%	3
7	PPP	28.495	4.18%	2
8	PKB	19.747	2.90%	1
9	PDS	13.052	1.92%	1

Sumber : KPUD Kota Depok.

Meningkatnya perolehan suara Partai Demokrat secara tajam, tidak bisa lepas dari figur SBY. Pola pikir konservatif masyarakat yang merasa nyaman dengan pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh SBY. Masyarakat tidak mau ambil resiko dengan berbagai tawaran perubahan dari elit lain. Mereka merasa lebih aman dan nyaman dengan pemerintahan saat itu sehingga mereka memberikan suaranya untuk Partai Demokrat. Sementara SBY mampu menjadi figur yang masih bisa diterima, disaat figur-figur lainnya yang sudah mulai ditinggal oleh masyarakat.

Partai Demokrat dan PKS yang diawal kemunculannya disebut-sebut bakal menjadi *the rising stars*, bagi partai-partai politik di Indonesia, hal itu terbukti. Pada pemilu tahun 2009, Partai Demokrat dan PKS mampu mendominasi perolehan suara dan kursi di Kota Depok. Partai Demokrat dengan lima belas (15) kursi DPRD Kota Depok, sementara PKS mampu meraih sebelas (11) kursi DPRD Kota Depok, turun satu kursi bila dibandingkan dengan hasil perolehan kursi DPRD pada pemilu tahun 2004.

Perubahan politik setelah jatuhnya rezim Orde Baru, membawa dampak yang serius bagi partai politik. Partai politik di Indonesia memiliki peran yang semakin besar. Sedikitnya ada tiga peran (Sri Budi Eko Wardani, 2007). Pertama, adanya pergeseran peran politik, partai politik menjadi aktor strategis dalam panggung politik Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik khususnya pasal 29. Dimana, partai politik diberi kewenangan dalam merekrut dan menyeleksi kandidat pemimpin, baik ditingkat nasional maupun daerah. Hal ini sangat berbeda ketika rezim Orde Baru berkuasa, dimana peran partai politik di pinggirkan. Bahkan tidak punya peran sama sekali, partai politik hanya di jadikan sebagai legitimasi bagi kelanggengan kekuasaan rezim Orde Baru.

Kedua, partai politik harus melakukan reformasi secara internal. Kebijakan rezim orde baru saat berkuasa dengan melakukan penyederhanaan partai politik membawa dampak negatif berupa terjadinya konflik internal partai politik. Sehingga, partai politik yang seharusnya melakukan fungsi seperti sosialisasi, artikulasi dan agregasi kepentingan, komunikasi politik, rekrutmen politik dan penengah konflik, hal itu tidak terjadi. Basis sosial partai politik dihancurkan, partisipasi politik masyarakat dibatasi dan diwajibkan (terutama dikalangan PNS) hanya mendukung Partai Golkar. PPP dan PDI hanya bermain di “pinggiran” sementara masyarakat diintimidasi agar hanya memilih Golkar saja, bahkan dengan tangan-tangan otoritarianisme-nya, Orde Baru mampu mencengkeram hingga ke pelosok desa. Memang mendukung partai lain “terkesan” di biarkan, tetapi pada prakteknya tetap saja masyarakat diintimidasi dan diarahkan untuk hanya memilih Golkar. Makanya ketika rezim Orde Baru berkuasa, Golkar selalu menjadi partai pemenang dalam pemilu. Seluruh sumber daya partai politik juga dicurahkan untuk mendukung kekuasaan rezim Orde Baru.

Ketiga, partai politik terlibat dalam seleksi dan pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Hal ini dimungkinkan setelah adanya perubahan UUD 1945 yang memberikan mandat bagi partai politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan fungsi rekrutmen politik. Diantaranya pengisian jabatan Kapolri, Gubernur BI, Pangliam TNI, Duta besar, dan lain-lain.

Perubahan dalam bidang politik berikutnya adalah pemilukada memungkinkan untuk dilaksanakan secara demokratis, yaitu dengan melibatkan masyarakat agar memilih langsung calon kepala daerah yang diajukan atau diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan (*independent*) dengan prosedur yang telah ditetapkan²¹ tanpa adanya intimidasi. Hal ini sangat berbeda ketika zaman Orde Baru berkuasa, partai politik tidak diberi kewenangan untuk mengajukan atau mengusulkan calon kepala daerah. Kepala daerah dipilih oleh DPRD atas “restu” presiden (Soeharto).

Setelah terjadi perubahan dalam politik, partai politik diberi kebebasan untuk maju dengan mengusung calonnya sendiri atau berkoalisi dengan partai lain. Pemilukada menjadi arena kontestasi berikutnya bagi partai-partai politik setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilukada dan hal ini sebagai amanat dari UUD 1945 terutama pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.

Sejak itu, partisipasi masyarakat untuk menentukan sendiri pemimpinnya menjadi sangat penting. Pemilukada tidak lagi dilakukan oleh partai politik melalui perwakilannya yang duduk di DPRD, tetapi, rakyat diberi kebebasan memilih langsung calon pemimpinnya. Karena, hakikat pemilukada pada dasarnya adalah suatu semangat perubahan yang ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat agar terlibat dalam proses perubahan (suksesi kepemimpinan) ditingkat lokal (daerah). Dengan adanya pemilukada yang dipilih langsung oleh masyarakat diharapkan mampu mendapatkan pemimpin (kepala daerah) yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Pemilukada Kota Depok untuk periode 2010 – 2015, sesuai dengan anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok menghabiskan dana sebesar Rp. 33 milyar.²² Pemilukada Kota Depok juga memiliki dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Selain secara geografis

²¹ Lihat UU no 12 tahun 2008 pasal 59 tentang perubahan kedua atas UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

²² <http://www.yipd.or.id/main/readnews/anggaran-pilkada-depko-rp33-miliar-cair>

dekat dengan Ibu Kota Negara, aktor yang bermainpun bukan merupakan wajah-wajah baru dalam perpolitikan daerah. Mereka adalah elit lama yang ingin berkuasa kembali atau elit lama yang ingin mempertahankan kekuasaannya kembali.

Berikut sekilas profil dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Depok periode 2010-2015.

1. Pasangan Gagah Sunu Sumantri dan Derry Drajat.

Gagah Sunu Sumantri merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Kota Depok. Jabatannya adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Sedangkan Derry Drajat merupakan artis dan presenter yang sering mondar-mandir di televisi.

2. Pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna.

Yuyun Wirasaputra sebelumnya menjabat sebagai Wakil wali Kota Depok periode 2005-2010, yang berakhir masa jabatannya pada 26 Januari 2011. Sedangkan Pradi Supriatna adalah pimpinan Partai Gerindra dan sosok pengusaha muda yang cukup sukses. Sementara pasangan ini didukung oleh lima belas (15) partai politik yaitu Partai Gerindra yang memiliki 3 kursi di DPRD dan 14 partai non-parlemen PBR, PKPB, PKNU, PMB, PKP, PDK, PPI, PPRN, PNI Marhaenis, PSI, Partai Buruh.

3. Pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad.

Nur Mahmudi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Depok yang akan berakhir masa jabatannya pada 26 Januari 2011. Sedangkan Idris Abdul Shomad merupakan tokoh agama dan menjabat sebagai sekretaris MUI Kota Depok. Pasangan ini didukung oleh enam (6) partai politik yaitu PKS, PAN, Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot, dan Republikan.

4. Pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto.

Badrul Kamal merupakan Walikota Kota Administratif Kota Depok periode 1997 – 1999 dan Walikota Kota Depok periode 1999 – 2005. Badrul Kamal adalah orang lama di birokrasi Kota Depok. Sedangkan pasangannya, Agus Supriyanto merupakan seorang pengusaha. Pasangan ini didukung oleh tujuh partai besar yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS, dan Partai Demokrasi Pembaruan.

Memasannya kondisi politik menjelang pemilukada Kota Depok tahun 2010 menambah semakin menambah semaraknya atmosfir politik yang ada di Kota Depok. Banyak pihak terutama kalangan partai politik telah menyiapkan calonnya. Beragam koalisi pun muncul. Tidak ketinggalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bertempat di Rumah Makan Saung Telaga Pancoranmas, Rabu, tanggal 14 April 2010 deklarasikan koalisi dengan nama koalisi pangeran. Koalisi yang terdiri dari tiga Partai Politik yang mendapatkan kuota kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009. Koalisi ini telah menyiapkan tiga orang calon wakil walikota yaitu Ali Fahmi Al Habsy (PDIP), Hasbullah Rachmad (PAN), dan Abdul Halim (PPP).

Berikut adalah, adanya ide pembentukan koalisi '45. Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Terakhir Partai Amanat Nasional (PAN), meninggalkan koalisi yang dibangun Partai Golkar dengan bergabung dalam koalisi '45. Tujuannya sama, menaikan posisi tawar partai-partai tersebut. Karena menurut peraturan, di Kota Depok partai yang bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi hanyalah dua partai yaitu Partai Demokrat dan PKS.

Berbagai wacana sebelum pemilukada Kota Depok dilaksanakan bermunculan, sehingga membuat suasana Kota Depok menjadi dinamis. Adanya ide membuat koalisi besar sebagaimana terjadi di DKI Jakarta saat pemilihan Gubernur tahun 2007 yang diusung oleh Partai Demokrat sebagai partai pemenang, sempat menjadi topik yang hangat menjelang pemilukada tersebut. Semua sepakat, untuk mengalahkan PKS, tidak bisa dihadapi sendiri oleh satu partai, harus ada koalisi besar yang mampu menjadi satu kekuatan yang signifikan untuk menjadi lawan PKS.

Jadi menjelang pemilukada Kota Depok tahun 2010, dinamika politik Kota Depok sangat dinamis. Partai Demokrat mencoba untuk menggalang koalisi besar dengan merangkul partai-partai besar yang mempunyai suara di DPRD Kota Depok. Munculnya koalisi pangeran, yang digalang oleh PDIP, PAN, dan PPP serta koalisi '45. Walaupun akhirnya PAN merapat ke PKS. Pemilukada menjadi

arena kontestasi tersendiri bagi partai-partai politik untuk memaksimalkan mesin politiknya (struktur partai).

5.3 Peran Elit Dan Basis Sosial Partai Demokrat Dalam Proses Penentuan Calon Walikota Dan Wakil Walikota

5.3.1 Hubungan Elit Daerah dan Elit Pusat Partai Demokrat

Elit dalam hal ini didefinisikan sebagai orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat atau suatu kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan mewakili sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat. Sedangkan hubungan antara elit daerah dan elit pusat partai politik diartikan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi antara elit (pimpinan) partai ditingkat daerah dengan elit (pimpinan) partai ditingkat pusat dalam menentukan arah serta kebijakan partai. Jadi, elit daerah maupun elit pusat, mereka adalah sama-sama orang maupun kelompok yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat atau suatu kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan mewakili sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat.

Bercermin dari pengelolaan partai politik yang ada, mengelola partai politik di era modern sekarang ini, tak ubahnya seperti mengelola sebuah organisasi kebanyakan. Ada kebijakan atau strategi tertentu yang bisa diputuskan ditingkat daerah atau lokal, namun ada kalanya kebijakan dan strategi itu diputuskan dengan melibatkan struktur yang ada di atasnya (dewan pimpinan wilayah atau dewan pimpinan pusat). Namun dalam hal ini, biasanya daerah selalu menjadi pihak yang “lemah”. Lemah dalam artian, ia tidak bisa secara mandiri memutuskan semua kebijakan dan strategi partai. Harus ada konsultasi dengan struktur yang ada di atasnya. Jadi, elit partai politik lokal hanya diberi kebebasan relatif dalam memutuskan kebijakan atau strategi bagi partai yang ada di daerah.

Sementara itu, peran pimpinan pusat (DPP) masih sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan partai. Dampaknya kemudian, tidak sedikit para elit partai yang ada di daerah seringkali melakukan perlawanan

atas keputusan pusat (DPP), karena dianggap keputusan pusat (DPP) tidak mengakomodir atau mempertimbangkan aspirasi daerah. Kasus semacam ini biasanya terjadi dalam pemilukada. Pusat seringkali memutuskan calon yang akan diusung dalam pemilukada bertolak belakang dengan keinginan elit atau kader partai yang ada di daerah.

Kebanyakan partai politik yang ada saat ini, hubungan antara pengurus daerah (DPC, DPD atau DPW) dengan pengurus pusat (DPP) berjalan sebagaimana hubungan struktur organisasi pada umumnya, yaitu hubungan kerja saja. Setiap tingkatan struktur kepengurusan (baik tingkat DPP, DPD, DPC dan PAC) bertanggungjawab atas pengelolaan struktur yang ada dibawahnya yaitu dengan melakukan evaluasi, kontrol atas kebijakan maupun program yang akan maupun telah dilakukan.

Di dalam Partai Demokrat, hubungan antara elit (pimpinan) daerah dengan elit (pimpinan) di atasnya, baik DPW ataupun DPP, tak ubahnya seperti organisasi pada umumnya yaitu hubungan kerja. Dimana tiap-tiap tingkatan struktur baik itu DPC, DPD maupun DPP, punya wewenang membawahi struktur yang ada dibawahnya. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu informan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok.

“kalau mekanisme saya rasa mungkin hampir sama layaknya organisasi ya, dan memang di partai itu kalau di kami tingkat pusat namanya DPP, tingkat propinsi DPD, tingkat kota atau kabupaten DPC, tingkat kecamatan PAC, nah hubungannya ya terus terang, hubungan kerja saja”

Jadi hubungan struktural yang dibangun oleh para pengurus Partai Demokrat selama ini, baik dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC hingga ranting adalah hubungan kerja sebagaimana organisasi kebanyakan. Dimana setiap struktur yang ada diatas membawahi struktur yang ada dibawahnya dan struktur yang dibawah bertanggungjawab kepada struktur yang ada diatasnya. Mereka saling sinergi antar struktur. Seperti dituturkan kembali oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok.

“kalau kita berangkat mengenai kegiatan keorgansasian ya sinergi itulah yang berwenang bahwa, DPW tentunya punya kewenangan dan tugas fungsi yang membawahi DPC, begitu juga DPP punya

wewenang membawahi DPD, tetapi saya rasa hubungan yang di maksudkan, tetapi dibarengi dengan komunikasi antara DPC dengan DPW kan gitu, karena ada kekhasan kita ini kan ada di ranah politik dimana cek and ricek, terus sosial kontrol itu kan sangat tinggi sekali lapangan kerja yang kita hadapi adalah masyarakat, jadi tentunya antara DPD dan DPP itu pasti mempunyai tools ya semacam alat untuk mereview, cek and ricek dan lain sebagainya atas kinerja yang ada dibawahnya”

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan ketua PAC kecamatan Cimanggis.

“pastinya koordinator wilayah ya yang mengkoordinasi wilayah masing-masing untuk kemenangan, pengerahan massa ya itu dengan struktur.”

Serta, masing-masing struktur juga melakukan cek dan ricek atau saling koreksi atas program kerja yang akan dan telah dilakukan dengan struktur yang ada dibawahnya. Mereka melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan, diantaranya adalah menginformasikan dan mengadvokasi bantuan-bantuan sosial, kelompok usaha dan lainnya yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun propinsi kepada masyarakat. Mereka meneruskan kepada para anggota dewannya agar membantu mengusahakan supaya program itu bisa diterima. Hal ini sebagaimana yang dituturkan ketua PAC kecamatan Cimanggis.

“kita konsolidasi kebawah, dalam semua kegiatan kita libatkan ke masyarakat. Adapun contohnya bantuan-bantuan, ada bantuan sosial dari pusat dari Jawa Barat kita tetap mencari masyarakat, ada kelompok usaha masyarakat, kita kebetulan di wilayah itukan punya dewan wakil kita, di Depok, Jawa Barat maupun pusat, itu karena konstituen ini apa yang mereka programkan ya kita libatkan masyarakat. Dan kita sampaikan ini memang bantuan sosial ini kan dari pemerintah, tetapi sebagai tanggungjawab kita yang punya jalur, artinya ya kita perjuangkan terutama pengurus demokrat dewan demokrat yang ada di wilayah dan informasi apa pun kita sampaikan ke bawah. Kita kan punya pengurus sampai tingkat RW di cimanggis”

Walaupun adakalanya juga, untuk hal-hal tertentu, pengurus wilayah, daerah ataupun pengurus cabang diberi kewenangan relatif untuk mengatur dan memutuskan sendiri “jalan” partainya, tetapi untuk

keputusan-keputusan tertentu yang dianggap cukup strategis, harus melibatkan pengurus DPW maupun DPP.

Untuk keputusan yang harus melibatkan struktur di atasnya (DPD dan DPP) dalam Partai Demokrat diantaranya adalah tentang pemilukada. Dalam AD/ART-nya, disebutkan bahwa untuk mengawal proses pemilukada, Partai Demokrat membentuk tim sembilan (tim 9). Tim sembilan (9) inilah yang mengurus dan bertanggungjawab atas pemilukada yang dilakukan diseluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok.

“oh itu ada di AD/ART-nya, tim sembilan (9)-pun diatur di AD/ART dan itu sudah bentuk bakunya.

“....dan tim sembilan (9) ini badan bentukan setiap pemilukada dan ditetapkan dengan SK dari ketua umum, dan namanya diusul oleh masing-masing tingkatan (DPP, DPD, dan DPC)”

Dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 yang lalu, tim sembilan yang dibentuk oleh Partai Demokrat terdiri dari dua orang unsur DPC, tiga orang unsur DPD dan empat orang unsur DPP. Tim inilah yang bertugas melakukan pengawalan atau supervisi atas pemilukada, dari proses penjangkaran atau pendaftaran calon, verifikasi, wawancara serta penyampaian visi dan misi calon, hingga terjaring calon yang layak serta memenuhi kualifikasi yang Partai Demokrat inginkan. Kemudian, nama-nama yang sudah memenuhi kualifikasi disampaikan ke pengurus pusat (DPP) untuk kemudian DPP memutuskan siapa yang layak untuk diusung pada pemilukada. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok.

“Tim sembilan (9) ini khusus pemilukada yang tugasnya merancang, mereview, melakukan pendaftaran dan lain sebagainya meskipun teknisnya di bantu sama DPC tapi pelurunya yang megang tuh tim sembilan (9). Ada unsur DPP, DPW, DPD, DPC. Dari DPC ada ketua dan sekretaris, kalau DPD selain ketua dan sekretaris ada juga yang ditunjuk dikarenakan membawahi 29 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tentu yang menunjuk harus ketua dan sekretaris. Komposisinya DPC dua (2) orang, DPD tiga

(3) orang dan DPP empat (4) orang. Kalau DPD selain ketua dan sekretaris juga ada orang yang di tunjuk karena mereka kan sangat sibuk ga punya waktu, tim sembilan (9) itu kan kalau dibilang bertanggungjawab dalam perencanaan siapa yang akan maju.”

Disampaikan juga oleh ketua PAC kecamatan Sawangan.

“anggota tim sembilan (9) perwakilan dari tim DPP, DPD dan DPC.

“....semua yang nyalon diajukan, di survei, jadilah mengerucut Pak Badrul dan Supriyanto, itu dari tim sembilan (9)”

Sejatinya, tim sembilan memiliki peran yang sangat besar bagi penentuan calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat, namun sebenarnya hal itu tidak terlepas dari cara elit pusat “bermain aman”, karena tetap saja dari perwakilan tim itu komposisi elit pusat adalah yang paling banyak yaitu empat orang, dibanding perwakilan dari elit propinsi, kabupaten maupun kota. Sehingga disinyalir, independensi dari tim sembilan (9) ini diragukan oleh sebagian kader yang ada di bawah. Mereka kecewa dengan keputusan dari tim sembilan (9) yang justru merekomendasikan calon dari luar, bukan calon dari internal atau kader sendiri. Karena mereka berkesimpulan, bahwa Partai Demokrat adalah partai pemenang di Kota Depok, dari jumlah kursi maupun perolehan suara sudah cukup memenuhi persyaratan partai politik untuk bisa mengajukan sendiri calonnya. Seperti penuturan ketua PAC kecamatan Pancoran Mas.

“Kelemahan dari partai ini, masih sistem tunjuk, emang aturan dan mekanisme yang dibuat mengharuskan calon atau bakal calon itu melakukan sosialisasi terhadap konstituen, sehingga mereka (tim sembilan) yang akan menilai layak atau tidak layak seorang calon ini di calonkan. Tapi ini sebatas usulan, keputusan tetap di ketua umum, nah ketum ini berdasarkan tim sembilan (9), inilah yang membuat celah atau kelemahan, kenapa kekalahan-kekalahan dari partai itu tidak berdasarkan riil dari konstituen tapi berdasarkan dari tim yang di bentuk. Sedangkan independen

dari tim ini diragukan terhadap kondisinya bukan mekanismenya. Kalau secara normatif, prosedur sudah benar, bahwa konstituen memberikan masukan kemudian tim sembilan (9) mengevaluasi dari tim survei melakukan survei, tapi ini semua belum murni, jadi tahap-tahapan demokrasi kita belum menciptakan kemurnian dalam suatu hasil, tapi merupakan hasil yang di rekayasa.”

Begitu juga seperti penuturan ketua PAC kecamatan Sawangan.

“...pada waktu itu kita kan inginnya yang maju itukan dari kader sendiri, tetapi dari tim sembilan (9) lain, sebenarnya disitu ketidakpuasannya, wong kita punya kader kok ga lolos, ada apa sebenarnya? Itu aja. Sebenarnya semua unsur PAC mendukung kader yang kita majukan, karena PAC di bawah dan tidak bisa memutuskan, hanya tim sembilan (9) yang di rekomendasikan oleh DPP itu”

Keberadaan tim sembilan (9) seolah semakin menegaskan bahwa, oligarki dalam tubuh partai politik tak terbantahkan lagi. Sebagaimana di sampaikan oleh Robert Michels (1955), “Adalah organisasi yang menyebabkan lahirnya kedaulatan para wakil atas pemilih, yang diberi mandat atas pemberi mandat, para delegasi atas pemberi delegasi. Siapa yang bicara organisasi, bicara oligarki” (*It is organizations which gives birth to the dominion of the elected over the electors, of the mandatories over the mandators, of the delegates over the delegators. Who says organization, says oligarchy*). Tim sembilan (9) satu sisi bisa disebut sebagai upaya demokratis dari para elit Partai Demokrat untuk menjembatani keinginan kader ditingkat daerah, karena adanya unsur keterwakilan struktur partai disitu, tetapi disisi lain justru melemahkan suara para kostituen dan kader yang ada di lapangan. Karena keputusan tetap berada ditangan tim sembilan (9) dan DPP, tim sembilan membuat mekanisme seolah-olah demokratis, padahal keputusan tetap berada ditangan DPP.

Sedangkan interaksi antara elit (pimpinan) daerah dengan elit (pimpinan) pusat Partai Demokrat tak jauh berbeda dengan organisasi atau partai politik pada umumnya, sebatas hubungan kerja. Namun untuk

pemilukada, khususnya dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 lalu hubungan tersebut termanifestasikan dalam tim sembilan (9). Dimana tim sembilan merupakan tim yang dibentuk oleh DPP khusus bertanggungjawab atas pemilukada berdasarkan surat keputusan (SK) yang anggotanya merupakan perwakilan dari unsur masing-masing elit partai yang ada di daerah, baik DPC, DPD maupun DPP. Dengan komposisi dua orang unsur DPC, tiga orang unsur DPD dan empat orang unsur DPP. Yang ternyata hal itu belum mampu mengakomodir keinginan para kader dan konstituen yang berada di bawah.

5.3.2 Hubungan Elit dan Basis Sosial Partai Demokrat

Baik Vilfredo Pareto (1848-1923) ataupun Gaetano Mosca (1858-1941) percaya, bahwa dalam suatu masyarakat akan selalu ada sekelompok kecil orang yang memerintah dan sekelompok besar lain masyarakat yang diperintah. Dalam konteks partai politik, sekelompok kecil yang memerintah dimaknai sebagai elit (pimpinan) partai sedangkan sekelompok besar masyarakat yang diperintah adalah mereka para konstituen atau basis sosial dari partai politik tersebut. Yang dalam bahasa Seymour Martin Lipset (1960) memberikan generalisir bahwa partai-partai politik pada prinsipnya berbasis pada dua kelompok kelas, yaitu kelas bawah atau kelas menengah dan atas. Dalam bahasan ini akan coba diuraikan bagaimana interaksi antara elit (pimpinan) Partai Demokrat dengan para konstituennya (basis sosialnya) selama ini.

Kota Depok merupakan salah satu daerah pinggiran disekitar Jabodetabek yang dijadikan tempat bermigrasi penduduk. Namun yang menarik, dari penduduk Kota Depok adalah mereka tidak mencari pekerjaan di Kota Depok saja, namun mereka tetap mempertahankan tempat bekerjanya di DKI Jakarta. Boleh dikatakan secara umum penduduk di Kota Depok adalah mereka para pekerja dari kelas menengah kebawah.

Sementara itu, hubungan antara elit Partai Demokrat Kota Depok dengan basis sosialnya yang terjalin selama ini sangat beragam. Ada yang

melalui jalur struktural partai seperti DPC, PAC dan ranting serta anak ranting juga melalui anggota dewannya yang duduk di DPRD Kota Depok, baik saat reses maupun sehari-hari. Dan bentuknya pun juga bermacam-macam, ada yang berupa bantuan sosial atau kegiatan yang memberdayakan, pertemuan bulanan yang membahas informasi-informasi seputar kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan dari Partai Demokrat saat fokus diskusi group. Salah satu cara yang dilakukan untuk membina hubungan baik atau melakukan komunikasi antara elit (pimpinan partai) dengan konstituen (basis sosial) partainya adalah memberikan pelayanan saat mereka sakit, meninggal dunia, pernikahan, sunatan atau kegiatan sosial keagamaan lainnya. Seperti penuturan informan Ibu Siti Nurjanah, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD:

“Kalau aku, misalkan gini, kita ga harus nunggu dari reses ya, kalau itu masa sidang, sidang waktunya cuma satu minggu, itu tidak akan cukup, kalau kita mau terjun langsung ke masyarakat. Jadi kalau ada konstituen misalkan mereka ada yang sakit, ada yang meninggal, ada pernikahan, sunatan, atau hal-hal maulidan, pengajian itu kita datang, jadi itu berhubungan dengan konstituen itu salah satunya, ada lagi banyak cara yang lain”.

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan Ibu Endah Winarti, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD:

“Yang Pertama, tadi umpamanya ada Ibu Nurjannah sakit, itu setiap saat ya mas, kami membantu memberikan yang terbaik, artinya umpamanya ada salah satu rumah sakit (RS) yang menolak, RSUD menolak, kami ada acara tersendiri untuk apa namanya, melobi ke salah satu dinas, harus menolong konstituen tersebut. Yang Kedua, aku lakukan disetiap ta’lim , jadi ta’lim itu ada hari selasa, hari jum’at dan lain sebagainya, kita kunjungin kembali konstituen yang dulu nyontreng kita, dan yang tidak nyontreng kita. Gitu mas!”

Ada juga salah satu informan, karena latarbelakangnya pernah menjadi ketua RT, ketua RW setempat dan pemimpin Majelis Ta'lim, dia lebih mudah menjangkau para konstituennya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial serta advokasi terhadap warga. Misalnya jika ada masyarakat yang ditolak masuk RSUD, anggota dewan tersebut melakukan pendekatan ke salah satu dinas terkait. Mereka mudah mendekati masyarakat, karena mempunyai jadwal rutin ta'lim bertemu dengan masyarakat karena dikenal terlebih dahulu sebagai tokoh sebelum menjadi anggota dewan. Penuturan Ibu Endah Winarti, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD:

“Kalau saya mah, karena bermasyarakat ya, pernah jadi ketua rt, RW, pengajian dan lain sebagainya. Jadi saya memonitor konstituen kami, saya mempunyai satu mobil, untuk setiap hari, setiap saat membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang Pertama, tadi umpamanya ada ibu Nurjannah sakit, itu setiap saat ya mas, kami membantu memberikan yang terbaik, artinya umpamanya ada salah satu rumah sakit yang menolak, RSUD menolak, kami ada cara tersendiri, untuk apa namanya, melobi ke salah satu dinas, harus menolong konstituen tersebut. Yang Kedua, aku lakukan disetiap majelis ta'lim, jadi majelis ta'lim saya itu ada hari selasa, hari jum'at dan lain sebagainya, kita kunjungi kembali konstituen yang dulu nyontreng kita, dan yang tidak nyontreng kita. Gitu mas”

Juga diperkuat oleh penuturan Ibu Ayi Nurhayati, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD tentang hal ini :

“Kami sosialisasi ditingkat ibu-ibu lagi, seperti ta'lim selain membantu masyarakat dibidang kesehatan, kita juga membantu masalah program pemerintah pusat, masalah ranting, bos, pendidikan, yang dibawah masyarakat langsung ke kita langsung turun. Tidak hanya program kesehatan pasien-pasien yang sakit saja, program pusat tetap kita turun, tetap kita mendampingi”.

Mereka para anggota dewan, juga menjembatani atas program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Meskipun di Kota Depok

walikotaanya bukan dari Partai Demokrat, tetapi mereka tetap mengawal agar program-program itu sampai kepada masyarakat, supaya tidak diakui oleh partai lain. Mereka membantu masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, bos serta bantuan lain yang digulirkan oleh pemerintah. Penuturan Ibu Ayi Nurhayati, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD:

“Untuk menjaga sinergisitas program nasional, apalagi kita kan dari Partai Demokrat, kita punya presiden, dia punya kebijakan dan punya program yang harus kita kawal sampai tingkat kota. Itu saja banyak terjadi, jangan sampai program presiden yaitu Bapak SBY di aku-akui oleh kepala daerah Kota Depok yang bukan dari Partai Demokrat. Kami sosialisasi di tingkat ibu-ibu lagi, seperti majelis taklim, selain membantu masyarakat dibidang kesehatan, kita juga membantu masalah program pemerintah pusat, masalah ranting, BOS, pendidikan (gitu), yang dibawah masyarakat kita langsung turun. Tidak hanya program kesehatan, pasien-pasien yang sakit saja, program pusat tetap kita turun, tetap kita mendampingi”.

Sementara itu ada juga informan lain yang mengatakan, bahwa kebanyakan anggota DPRD Kota Depok dari Partai Demokrat berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing sehingga mereka senantiasa terbuka dua puluh empat (24) jam, dan selalu siap menerima keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh para konstituennya (basis sosialnya). Penuturan Ibu Endah Winarti, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD :

“Karena kita sehari-hari juga setiap saat bertemu dengan konstituen kita. Konstituen itu adalah semua masyarakat yang tinggal di daerah pemilihan (dapil) bukan hanya yang memilih kita. Jadi definisi konstituen itu adalah semua warga masyarakat yang tinggal di dapil kita, dapil kita itu kemarin kita masing-masing dapil, masing-masing anggota dewan punya dapil kecamatan, disitulah konstituen kita berada. Nah kita ini semua masing-masing ini tinggal di Dapil kita. Sehingga dapil kita naik. Kalau kita tinggal di dapil kita, itu masyarakat yang mau, yang sakit yang ada perlu itu kerumah kita, 24 jam mau kapan aja dia

ga perlu nunggu. Kita tinggal di dapil kita, jadi kita tiap hari ketemu dengan konstituen dan itu tidak harus menunggu momen-momen tertentu, itu hubungan antara pribadi-pribadi dengan konstituen”.

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Jeanne Noveline, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD:

“Kalau ditanya saya bilang, inilah bedanya antara anggota DPRD di tingkat kota dengan DPRD tingkat provinsi dan DPR RI, karena kalau misalnya DPRD tingkat kota itu biasanya anggota dewan hidup tinggal di dapilnya. Jadi dia tidak perlu menunggu reses seperti misalnya anggota DPR RI untuk berhubungan dengan konstituennya. Karena kita sehari-hari juga bertemu dengan konstituen kita. Konstituen itu adalah semua masyarakat yang tinggal di dapil bukan hanya yang memilih. Jadi definisi konstituen itu adalah semua warga masyarakat yang tinggal di dapil kita, dapil kita itu kemarin kita masing-masing dapil, masing-masing anggota dewan punya dapil kecamatan, disitulah konstituen kita berada”.

Namun ada juga mereka para elit partai yang memanfaatkan momen-momen tertentu saat partai membuat acara-acara yang sifatnya insidental, seperti ulang tahun partai, buka puasa bersama, halal bi halal dan lainnya. Seperti penuturan Ibu Jeanne Noveline, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD C:

“Tapi kalau acara partai, kita membuat acara-acara seperti ini (santunan terhadap anak-anak yatim yang dikoordinasi oleh tiap-tiap PAC se-Kota Depok), contohnya kaya kemarin acara buka puasa bersama, halal bi halal, ulang tahun partai nah itu kalau atas nama partai, kalau atas nama pribadi nah itu tadi yang saya bilang”.

Sementara itu, interaksi yang dibangun melalui struktur partai dengan basis sosialnya sangat beragam. Mereka memanfaatkan PAC, ranting serta anak

ranting untuk bergerak menyerap aspirasi para konstituennya serta melakukan pertemuan-pertemuan dengan konstituen sebagai basis sosial partai yang berada di wilayah masing-masing, serta mensosialisasikan informasi-informasi yang didapatkan dari anggota dewan mereka atau struktur partai yang lebih tinggi (DPC, DPD maupun DPP) atas kemungkinan peluang-peluang atau program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot Kota Depok, Pemprov Jawa Barat maupun program dari pusat sekalipun. Penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“Kita konsolidasi kebawah, dalam semua kegiatan kita libatkan ke masyarakat. Adapun contohnya bantuan-bantuan, ada bantuan sosial dari pusat dari Jawa Barat kita tetap mencari masyarakat, ada kelompok usaha masyarakat, kita kebetulan di wilayah itu kan punya dewan wakil kita, di Depok, Jawa Barat maupun pusat, itu karena konstituen ini apa yang mereka programkan ya kita libatkan masyarakat. Dan kita sampaikan ini memang bantuan sosial ini kan dari pemerintah, tetapi sebagai tanggung jawab kita yang punya jalur, artinya ya kita perjuangkan terutama pengurus demokrat dewan demokrat yang ada di wilayah dan informasi apa pun kita sampaikan ke bawah. Kita kan punya pengurus sampai tingkat RW di cimanggis.”

Selain itu, struktur partai juga didorong untuk menyerap aspirasi dari para konstituen atas ketidakpuasan para konstituen sebagai basis sosial partai politik atas kinerja anggota DPRD serta para elit partai yang lain untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing melalui struktur partai terdekat. Sebagaimana penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“Kita punya dapil masing-masing dan kita punya kewajiban, tanpa masyarakat meminta, kita pun karena sehari-hari kita bergaul dengan mereka otomatis kita tahu aspirasi mereka, jalan ini rusak, kita usahakan untuk konsultasi gimana untuk wilayah ini. Kalau memang kontribusinya ada dari anggota dewan masing-masing. Riil itu kan kenyataan konsituennya tersentuh. Kan ga mungkin kalau uang kita kasih, ga mungkin kesejahteraan mereka kita ganggu. Secara umum terbuka kita, misalnya wilayah punya tanah wakap untuk posyandu kita bantu, kita perjuangkan, jalur nya itu anggota dewan”.

Juga, beberapa struktur PAC mengadakan program pemberdayaan masyarakat bagi konstituenya (basis sosialnya). Program tersebut berupa program usaha kemandirian. Dimana agar kader-kader serta konstituen sebagai basis sosial partai mampu mempunyai usaha mandiri. Penuturan ketua PAC kecamatan Cilodong :

“Program-program sekarang adalah program kemandirian, seperti usaha kemandirian, bahwa kader-kader kita ini harus mampu usaha, untuk membina di masyarakat atau dia bisa mandiri sendiri, di lingkungan dia sendiri”.

Program itulah yang akan terus digalakkan. Karena para pengurus Partai Demokrat menyadari, partai mereka merupakan partai baru dan konstituennya (basis sosialnya) mengambang, dan belum memiliki kader se-militan partai-partai lain seperti PKS, PDIP, dan Partai Golkar. Dengan program-program kemasyarakatan ataupun pembinaan-pembinaan di level bawah diharapkan Partai Demokrat bisa menjadi partai-partai yang memiliki kader militan. Seperti penuturan ketua PAC kecamatan Cilodong:

“Selama ini memang terkesan bahwa demokrat ini partai yang mengambang atau partai bukan militan, di banding partai-partai yang sudah matang, seperti PKS, Golkar, PDIP. Nah inilah yang akan kita galakan, kita bina menjadi kader yang militan. Dengan program-program kemasyarakatan ataupun pemninaan-pembinaan di level bawah”

Jadi, jika dilihat dari paparan diatas, interaksi antara elit Partai Demokrat dan basis sosial (konstituen) yang dilakukan oleh elit Partai Demokrat dengan konstituennya, sebagai basis sosial partai selama ini masih tetap berjalan. Anggota dewan memanfaatkan masa reses, dan acara-acara tertentu yang dibuat oleh partai seperti ulang tahun partai, buka puasa bersama, halal bi halal, serta memanfaatkan struktur partai seperti PAC, ranting, serta anak ranting yang ada di bawahnya dengan membuat

pertemuan bulanan dengan basis sosial. Mereka menerima keluhan usulan serta masukan dari para konstituen.

5.3.3 Resistensi Pembantu Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Dalam Pemilukada Kota Depok

Tidak bisa dipungkiri, kader dan struktur partai politik mempunyai peran yang sangat signifikan bagi partai politik. Kader dan struktur partai ibaratnya seperti mesin dan bahan bakarnya, saling membutuhkan. Struktur partai tanpa adanya kader, berakibat matinya mesin partai. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara keduanya.

Resistensi para pengurus PAC Partai Demokrat Kota Depok saat pemilukada, ternyata membawa dampak yang signifikan bagi perolehan suara pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto. Hal ini dipicu dengan kekecewaan kader yang ada dibawah yang tidak setuju ketika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memutuskan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto sebagai calon pasangan yang diusung dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010.

Mayoritas kader menginginkan agar Partai Demokrat mengukung calon dari internal partai yaitu dengan mencalonkan kadernya sendiri. Karena berbagai upaya sudah ditempuh ternyata tetap saja tidak mampu merubah keputusan, akhirnya mereka lebih memilih diam, tidak mau bergerak dan sebagian kader lain mendukung calon yang diusung oleh partai lawan mereka yaitu pasangan Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad yang diusung oleh PKS.

Akibat dari keputusan tersebut menimbulkan tidak berjalannya struktur partai, terutama Pembantu Anak Cabang (PAC) dan para kader yang ada di ranting. Hampir semua PAC melakukan mogok, tidak mau bergerak. Bahkan para anggota dewan-nya pun demikian, mereka kecewa dengan keputusan DPP yang tidak mendukung kadernya sendiri untuk maju. Sebagaimana penuturan Ibu Jeanne Noveline, anggota DPRD Kota Depok fraksi Partai Demokrat dalam FGD:

“Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan keputusan itu. Saya sama teman-teman kader yang lain pun sempat ke DPP untuk ketemu langsung dengan ketua umum agar keputusan itu dirubah, karena kader yang ada dibawah menginginkan kita mengusung calon sendiri. Kitakan partai pemenang, mengapa malah tidak mencalonkan?”

Berbagai upaya juga telah dilakukan agar keputusan mengusung Badrul Kamal dan Agus Suprianto dibatalkan, dimana mereka para anggota dewan Partai Demokrat Kota Depok yang diikuti beberapa perwakilan kader dari PAC datang ke DPP menemui ketua umum meminta agar Demokrat mengusung calon internal (kader sendiri) tetapi upaya itupun juga gagal. Akhirnya gejolak itu terus membesar meskipun coba diredam oleh ketua DPC Kota Depok. Karena ketika sudah dilapangan, struktur tidak bisa lagi mengontrol mereka. Sebagaimana penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“...saya hanya redam saja, dan saya ga bisa memaksa hati mereka. Kalau saya maju dari bukan partai (jalur independent) tentu saya akan mikir dua kali, bisa ga saya dapati hatinya PAC, oh saya bisa mengantongi surat dari mereka, tapi dilapangan saya gimana? Para prajuritnya para panglimanya mau membantu saya tidak”

Resistensi yang terjadi ditubuh Partai Demokrat Kota Depok atas pencalonan Badrul Kamal dan Agus Suprianto tidak hanya terjadi dikalangan struktural dan kader saja, bahkan para anggota dewannya pun juga menentang keputusan DPP tersebut. Lima belas (15) anggota DPRD Kota Depok mendukung atas pencalonan ketua DPC, Agung Witjaksono sebagai calon walikota Kota Depok. Sehingga merekapun juga tidak mau bergerak secara maksimal untuk mendukung calon yang diputuskan oleh DPP. Seperti penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“Lah di PAC kan cuma saya dengan Pak Rintis, dan anggota dewan juga pro-nya ke saya, kita kan punya lima belas anggota dewan dan ketua PAC, aleg itu kan sebelumnya masih didapil, mereka punya konstituen, mereka juga lesu mas. Kalau saya melihat seperti itu, entah itu bentuk simpati terhadap saya atau pemahaman mereka”

Sementara itu, para pengurus anak cabang (PAC) merasakan kekecewaan yang sama, mereka merasa tidak dihargai kerjakerasnya selama ini. Dan mereka sangat menyayangkan atas keputusan DPP yang mengusung Badrul Kamal dan Agus Supriyanto. Sebagaimana dituturkan oleh ketua PAC kecamatan Cilodong :

“Jujur saja pada waktu itu ada beberapa elit khususnya di PAC menginginkan kader yang maju.....kebetulan itu yang kita usung, tanpa koalisi dengan partai apapun kita sudah memiliki tiket. Kita usung kader yang mempunyai peluang dan kesempatan adalah Pak Agung (ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok), terlepas dia no.1 atau 2, itu lain cerita. Saya dengan ranting itu sudah hitam di atas putih.”

Alasan mereka beberapa pimpinan atau elit PAC menginginkan agar kader sendiri yang maju, karena Partai Demokrat bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Mereka menginginkan agar Agung Witjaksono, ketua DPC sebagai calon, terlepas calon walikota maupun wakil walikota. Seperti penuturan ketua PAC kecamatan Cilodong :

“yang jelas satu gerbong, sepakat untuk mengusung secara eksplisit kita tidak memilih pak agung, PAC menginginkan kader, dan saya termasuk yang keras sampai saya ketemu Pak Anas dan Pak Mubarak (DPP).”

Karena aspirasi mereka para ketua PAC tidak diakomodir, akhirnya mereka memilih tidak bergerak atau mati suri, walaupun mereka juga tidak mau mengatakan bahwa kekalahan pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto karena mereka, tetapi minimal ada kontribusi dari PAC atas kekalahan pasangan tersebut karena mesin partai tidak bergerak. PAC merasa tidak ada penghargaan atas dukungan mereka selama ini. Seperti penuturan ketua PAC kecamatan Cilodong :

“ketika semakin jelas (tidak berubah) akhirnya kita, kalau kata kawan-kawan, mati suri, terlepas kita itu bisa mempengaruhi atau tidak, karena pada saat itu kita menyadari, kita benar-benar mendukung tapi ko ga ada penghormatan terhadap kader kita, kita belum membicarakan menang atau kalah pada saat itu, cuman berilah kesempatan kader untuk maju, itulah dasar pemikiran kita, terlepas kita punya modal atau tidak, itu mah lain cerita.”

Bahkan, sebelum DPP memutuskan mengusung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto untuk diusung dalam pemilukada Kota Depok, mereka para pimpinan dan pengurus PAC masih tetap mencoba meminta kebijaksanaan agar Demokrat tetap mengusung kadernya sendiri. Bahkan para ketua PAC menanyakan kepada tim sembilan, mengapa justru kader sendiri tidak lolos dalam pencalonan. Karena tetap tidak mendapat respon dari DPP merubah keputusan atas pencalonan pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto, akhirnya mereka memilih diam. Sebagaimana penuturan ketua PAC kecamatan Cinere :

“sebelum Pak BK (Badrul Kamal) sudah terlebih dahulu direkomendasikan, kita coba barangkali ada kebijakan ternyata kebijakan itu kan tidak bisa, ya udah akhirnya kami diam.”

Penuturan ketua PAC kecamatan Sawangan :

“Pada waktu itu kita kan inginnya yang maju itu kan dari kader sendiri, tetapi dari tim 9 lain, sebenarnya disitu ketidakpuasannya, wong kita punya kader kok ga lolos, ada apa sebenarnya? Itu aja. Sebenarnya semua unsur PAC mendukung kader yang kita majukan, karena PAC di bawah dan tidak bisa memutuskan”

Namun ada juga beberapa respon dari ketua PAC, meskipun kecewa dengan keputusan DPP mereka tetap berusaha menerima keputusan itu. Dan memahami walaupun ada gelombang-gelombang perlawanan dari para pengurus PAC yang lain. Mereka memahami memang seperti itulah politik. Sebagaimana penuturan ketua PAC kecamatan Bojongsari :

“Kemarin kita boleh mencalonkan kader dari kita sendiri, tapi itupun kita sudah berusaha, tapi apapun yang terbaik dari tingkat pusat ya, kita harus ngikutin walaupun ada gelombang-gelombang di dengarnya kurang enak tapi itu sudah tidak ada masalah lagi.”

“.....kita ajukan ke DPP, ini bagaimana? Tapi kenyataan di DPP ditolak dan sudah menentukan, itu tidak ada masalah, ya walaupun ada gejolak-gejolak, ya wajarlah namanya juga berpolitik.”

Perlawanan kader ditingkat ranting juga terjadi secara masif. Kader ditiap-tiap ranting dimasing-masing PAC bergabung membentuk paguyuban ranting demokrat se- Kota Depok (Parade) yang dipublikasi secara masif ke media dan secara terang-terangan mendeklarasikan diri mendukung calon lain yaitu pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad, yang didukung oleh PKS dan PAN. Seperti penuturan penggagas relawan Bintang Mercy Tiga :

“....jadi saya merasa berjuang di Demokrat ketika penjarangan pemilukada kita di cuekin sebagai kader ranting, sedangkan orang Demokrat kan banyak anggota baru yang baru kan, akhirnya kita yang diranting ga ada yang di bicarain mau dukung Pak Badrul karena merasa tidak dilibatkan cuman elit-elit aja, disitu akhirnya kan kita ngusung Pak Agung kan karena kita tau beliau benar-benar orang Demokrat dan orang lain pun tau, kita berupaya bagaimana Pak Agung bisa naik, tapi karena di pusat dan di Depok ada elit-elit partai yang bermain sampai Pak Agung ga terpilih, kalau saya sih ngapain dukung orang lain, akhirnya saya dan temen-temen di ranting bikin forum parade (paguyuban ranting se-Depok) intinya kita ga mau dukung Pak Badrul, ya karena analisisnya ga bakal menang, waktu dia ngejabat dulu aja ga menang didukung Demokrat di tambah lagi Pak Supriyanto, dimasyarakat di lingkungan aja ga dikenal ini kecewaan saya sampai saya ga mau dengar arus dari bawah gitu. Padahal di bawahkan yang tau yang langsung terjun ke masyarakat mulai dari legislatif, kemudian janji-jani lah kita dan ranting yang ditagih, ketika di pemilukada kita merasa ga dilibatkan dan kita kecewa, Pak Agung sebagai ketua DPC, udah ga jadi DPRD trus di pemilukada di babad, akhirnya udah lah kita ga dukung pak badrul, jadi pas pemiulkada kita dukung Pak Nurmahmudi.”

Paguyuban ini menginventarisir kader-kader di tiap-tiap ranting yang merasa kecewa dengan keputusan DPP, karena merasa perjuangan mereka tidak dihargai, padahal mereka selama ini sudah begitu banyak berjuang untuk Demokrat, tetapi untuk memutuskan calon walikota, suara mereka tidak diakomodir. Mereka mengatakan ada sekitar 43 ranting dari 63 ranting se-Kota Depok yang menolak mendukung keputusan DPP dan lebih memilih mendukung pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul shomad. Sebagaimana penuturan penggagas relawan Bintang Mercy Tiga :

“.....kita satukan dulu kader ranting yang kecewa seperti Cimanggis ama Tapos kemudian Sukma Jaya, Cilodong. Kita ngedukung Pak Nurmahmudi secara tertulis dan pake stample ada sekitar 43 ranting dari 63 ranting, ga papa kita ga usah turun ke masyarakat minimal kita ga bergerak atau vakum, tapi kalau saya sih turun dengan Pardi Dongkal kita ikut kampanye, bawa massa dari parade, ya walaupun konsekuensinya kami di pecat.....”

Penuturan penggagas relawan Bintang Mercy Tiga :

“.....kemarinkan dari Demokrat mencalonkan Pak Agung dengan Pak Hariyanto dan kita minta ke DPP agar salah satu dari keduanya dicalonkan karena keduanya benar-benar kader Demokrat, kalau Pak Badrul kan dari Golkar, Pak Supriyanto pengusaha, Pak Pradi tokoh pemuda. Kita juga sampai ke Bandung bikin surat untuk mendukung Pak Agung waktu itu ada 12 ranting dari 11 kecamatan, satu kecamatan masing-masing mewakili 1 ranting. Sedangkan yang ke DPP itu dari PAC ada 7 dan beberapa ranting sama mereka juga mengajukan surat untuk mendukung Mas Agung. Ternyata di akhir pendaftaran pencalonan, DPP bukannya dari kader sendiri yang di calonkan, malah Pak Badrul dengan Pak Agus Supriyanto yang bukan dari internal Democrat, mereka yang di usung Demokrat bersama 8 partai lainnya. Sehingga parade ini kecewa oleh karena suara kader yang tidak diakomodir, awalnya kekecewaan itu dipendem dulu, artinya waktu itu kan baru rekomendasi kan jadi masih bisa di rubah, okelah Pak Badrul tapi wakilnya bisa dengan Pak Agung atau sebaliknya. Kita beberapa kali ke DPP sampai tiga kali, ketemu dengan Pak Mubarok sampai dua kali Ibu Jaen juga ikut, kalau ke DPP, PAC-PAC ikut sampai tiga kali kita bikin surat sampai akhir pendafrtran ke KPUD ga dirubah pasangan Pak Badrul-Supriyanto tetap di calonkan, karena ketua DPC Pak Agung sempat di ancam kalau nama ini (pasangan Pak Badrul-

Supriyanto) tidak segera diserahkan maka akan dibukukan dpc, setelah didaftarkan ke KPUD akhirnya harapan kami di ranting kan sirna kan karena ga ada dari internal, kemudian kita kumpul sharing, gimana nih...kalau saya sih ga bakal ngedukung terserah kalian mau dukung siapa...? Ternyata banyak dari temen-temen yang ga ngedukung”

Penuturan kader Partai Demokrat :

“Yang saya tau dari kekalahan dari pemilukada kemarin yaitu sebenarnya dari Democrat itu mengusung pak Agung tapi kenapa dari Pak BK yang di usung padahal di Depok ini Democrat fraksi paling banyak yaitu 15 kursi anggota DPRD. Itu yang sangat disesali oleh teman-teman semua. Dan kita sudah merasa kecewa sehingga tidak semangat untuk mengusung mereka.”

Kekecewaan para Pengurus Anak Cabang (PAC) dan kader yang ada diranting ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perolehan suara pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto. Pasangan ini kalah hampir di semua kecamatan, padahal kalau kita jumlah partai pendukungnya, tidak layak bagi pasangan ini untuk kalah. Sebagaimana penuturan kader Partai Demokrat :

“Kita sudah mengusulkan Pak Agung tapi keputusan dari sana sudah begitu. Akhirnya banyak yang ga pada milih sekitar 60%, partai banyak kan cuman untuk ngedompleng aja nyari duit.”

“Anjlok banget, intinya sih gara-gara kader internal yang tidak di usung akhirnya konstituen pada kecewa. Dan sebenarnya kita punya harapan bagaimana pemimpin bisa mengayomi nantinya ketika kita ada keluhan bisa mencurahkan. Tapi kalau saat ini yang terjadi kita mau ngadu ama siapa ga ada orang yang bisa mengayomi kita itu letak kekecewaan dari anak-anak.”

Penuturan ketua PAC Partai Demokrat kecamatan Pancoran Mas :

“secara hukum satu keputusan, tapi dalam masa tidak utuh, dalam arti, waktu itu kita usul dari kader sendiri untuk di calonkan. Karena kita partai pemenang pemilu, tapi tidak di akomodir,

melainkan menjagokan dari luar, sehingga konstituen merasa kecewa, ini membuat ada barisan yang kecewa.”

“Tapos, Cimanggis, hampir di semua wilayah, jadi tidak seimbang dengan porsi pemilu kemarin, alasannya sama (calon yang di usung) bukan dari internal.”

Karena, jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada dengan pemilu legislatif, perolehan suara saat pemilukada sangat jauh berkurang, bahkan tidak sampai 30 persen, ditambah lagi pasangan ini didukung oleh partai pemenang pemilu tahun 2009 dan partai-partai besar lainnya. Kekecewaan itu tidak hanya terjadi dikalangan ketua dan pengurus PAC saja, tetapi juga di kalangan basis sosial (konstituen) Partai Demokrat. Sebagaimana penuturan ketua PAC Partai Demokrat kecamatan Pancoran Mas :

“Dibandingkan dengan kemenangan pemilu kemarin sampai 40 persen, karena dalam pemilukada ini kita partai gabungan, didukung sembilan partai (partai besar semua), PDIP, Golkar, PKB, PPP, PDS, PD itu 34 kursi dari 50 kursi. Kalau secara matematika harusnya menang, tapi karena tidak bisa menguasai konstituen dan dengan kekecewaan itu, ini tidak sampai 30% hasil pemilukada yang kemarin.”

Juga penuturan ketua PAC kecamatan Cilodong :

“sebetulnya dia tidak mengatakan dukung atau tidak mendukung, tapi lebih pada silent, kalau kita kan memang terang-terangan. Kebetulan mereka itukan anggota dewan cipayung, sebetulnya yang silent tuh 2 satunya limau.”

Penuturan penggagas Relawan Mercy Bintang Tiga :

“Orang-orang di struktur Demokrat pasti ada yang ngedukung Pak Nur, tapi tidak di tampilkan dan saya tidak akan kasih tahu siapa saja namanya yang jelas ada, termasuk anggota dewan dan orang DPP yang tinggal di Depok yang jumlahnya ada 9 orang, dan mereka juga tidak kompak.”

“Dari sebelas (11) kecamatan, Demokrat hanya menang di satu kecamatan yaitu Cipayung yang lainnya kalah telak. Jadi Pak Nur tuh menang di sembilan (9) kecamatan, kecuali di Beji yang menang Pradi, Cipayung Pak Badrul selainnya Pak Nur menang. Demokrat walaupun koalisi partai besar semua tapi kalau menurut saya sih di pilkada ini adalah sosok atau figur yang dicalonkan yang ga menjual juga.”

“Kekecewaan temen-temen di rantingan membuktikan dengan menangnya Pak Nur di sembilan (9) kecamatan, kedua dengan bergabungnya temen-temen di Pak Nur berarti kan mereka tidak mau ngedukung Pak BK, apalagi konstituen yang sudah kecewa karena yang maju bukan kader internal sendiri, kalau bukan kader sendiri ngapain, menurut saya tetep sama kalau bukan dari kader sendiri dan sempat kecewa. BK kan pernah kalah, jadi susah kalau sudah kalah maju lagi, sampai temen-temen diranting dan pemuda ingin ketua Demokrat tuh yang muda, jangan yang agak tua dan itu kurang gimana gitu”

Ada juga kader Demokrat, dimana mereka dengan terang-terangan mendukung calon yang diusung oleh partai lain. Mereka membuat komunitas relawan bintang mersi tiga yang beranggotakan kader-kader Partai Demokrat yang berada di ranting-ranting. Penuturan pengagas Relawan Mercy Bintang Tiga :

“Kita ngobrol, sharing dengan semua ranting sehingga tekad kita bulat untuk memenangkan Pak Nur, akhirnya dari 43 ranting nambah jadi 51 ranting menjelang lebaran, akhirnya kita bikin tim namanya “Relawan Bintang Mersi Tiga” relawan ya orang yang sukarela, bintang mersi diambil dari logo Demokrat dan tiga, karena Pak Nur no urutnya tiga, dan Pak Nur akhirnya ngerestuin tuh di daerah Dongkal diresmiin ama dia dipasang balon tuh yang gede raksasa itu di Dongkal, relawan bintang tiga ini kita bikin satu kelurahan anggotanya 10 orang itu tim intinya, berarti kalau 51 kelurahan jadinya 510 tim inti, mereka ini punya tugas satu orang ngerekrut 50 orang kader Demokrat, karena semua tim ini kader Demokrat semua, ada pengurus ranting, PAC dan mereka merekrut ya kader Demokrat sendiri bukan orang umum, kalau umum mungkin sudah punya tugas dari PKS, nah kita nih di masing-masing kelurahan mengajak kader Demokrat untuk milih Pak Nur, dan hasilnya alhamdulillah sangat signifikan.”

Meskipun partai pemenang dan didukung oleh partai besar lainnya seperti Golkar, PDIP, PPP, PKB dan lainnya, ternyata perolehan suara

pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto tidak seperti yang diharapkan. Hanya satu kecamatan dari sebelas (11) kecamatan setelah pemekaran, pasangan ini menang. Namun, dikecamatan lain, pasangan ini kalah telak oleh pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad yang disung oleh PKS, PAN dan beberapa partai kecil. Karena jika kita berpatokan pada perolehan suara pada pemilu tahun 2009, seharusnya pasangan ini tidak layak untuk kalah dan bisa dengan mudah memenangkan pemilukada Kota Depok tahun 2010, karena mereka didukung oleh partai pemenang dan partai lama yang sudah dikenal lama oleh masyarakat. Berikut tabel perolehan suara sepuluh (10) partai politik per-kecamatan Kota Depok pada pemilu tahun 2009.

Tabel 13 :
Perolehan Suara Sepuluh (10) Partai Politik Per-Kecamatan Kota Depok Pada Pemilu tahun 2009

No	Nama Partai	Kec. Beji	Kec. Cima nggis	Kec. Sukma jaya	Kec. Pancoran Mas	Kec. Sawan gan	Kec. Limo	Jumlah Suara
1	Demokrat	12.722	61.479	43.212	34.378	15.198	19.559	186.548
2	PKS	12.804	32.882	31.893	25.265	12.814	9.832	125.490
3	Golkar	9.818	13.394	12.548	20.478	10.947	7.572	74.757
4	PDIP	3.858	13.640	11.367	11.443	6.605	6.377	53.290
5	PAN	6.012	6.606	11.131	7.505	11.796	1.400	44.450
6	Gerindra	4.182	11.740	8.751	6.100	3.452	5.960	40.185
7	PPP	2.863	6.110	2.983	6.164	5.543	4.832	28.495
8	PKB	1.503	4.180	1.299	4.251	6.748	1.766	19.747
9	PDS	1.011	2.930	3.740	2.579	1.124	1.668	13.052
10	PDP	264	801	899	1.996	1.372	174	5.506

Sumber : KPUD Kota Depok.

Dari tabel diatas, perolehan suara Partai Demokrat disetiap kecamatan pada pemilu tahun 2009 sangat signifikan, karena mampu

memenangi lima (5) kecamatan dari enam kecamatan yang ada yaitu di kecamatan Cimanggis, kecamatan Sukmajaya, kecamatan Pancoran Mas, kecamatan Sawangan dan kecamatan Limo. Perbedaan suara dengan PKS yang merupakan partai pemenang kedua disetiap kecamatan juga sangat besar dengan total perbedaan 61.058 suara. Karena PKS hanya menang di kecamatan Beji. Hal ini seharusnya menjadi modal yang cukup bagus bagi partai tersebut untuk berikutnya memenangi kembali saat pemilukada tahun 2010. Belum lagi ditambah dengan suara gabungan partai koalisi pendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto yang memiliki suara cukup besar seperti Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS yang mereka rata-rata mempunyai kursi di DPRD, dan memiliki kader-kader pendukung yang cukup loyalis ditambah lagi, partai ini rata-rata adalah partai lama, seharusnya, pasangan ini tidak layak untuk kalah, jika dibandingkan dengan calon pasangan Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad yang hanya didukung oleh PKS dan PAN, partai yang memiliki kursi di DPRD, dimana PKS hanya menang di satu kecamatan saja yaitu Beji. Namun kenyataannya pada pemilukada tahun 2010, justru pasangan ini mampu memenangi pemilukada tahun 2010 dengan menang di sembilan (9) kecamatan dari sebelas (11) kecamatan yang ada di Kota Depok yaitu kecamatan Pancoran Mas, kecamatan Limo, kecamatan Cinere, kecamatan Sukmajaya, kecamatan Cilodong, kecamatan Sawangan, kecamatan Bojongsari, kecamatan Cimanggis dan kecamatan Tapos. Hal ini bertolak belakang dengan perolehan suara saat pemilu tahun 2009.

Lebih jelas kita bisa melihat bagaimana perbandingan perolehan suara disetiap kecamatan partai pendukung pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto saat pemilu tahun 2009 dengan perolehan suara partai pendukung pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idrsi Abdus Shomad. Dua pasangan ini dianggap memiliki basis sosial pendukung yang cukup besar. Sehingga persaingan kedua calon pasangan itu akan berjalan cukup ketat. Berikut tabel perolehan suara partai pendukung pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto di tiap kecamatan pada pemilu tahun 2009.

Tabel 14 :
Perolehan Suara Per-Kecamatan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto Pada
Pemilu Tahun 2009

No	Nama Partai	Kec. Beji	Kec. Cimanggis	Kec. Sukmajaya	Kec. Pancoran Mas	Kec. Sawangan	Kec. Limo	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrat	12.722	61.479	43.212	34.378	15.198	19.559	186.548	15
2	Partai Golkar	9.818	13.394	12.548	20.478	10.947	7.572	74.757	7
3	PDIP	3.858	13.640	11.367	11.443	6.605	6.377	53.290	5
4	PPP	2.863	6.110	2.983	6.164	5.543	4.832	28.495	5
5	PKB	1.503	4.180	1.299	4.251	6.748	1.766	19.747	1
6	PDS	1.011	2.930	3.740	2.579	1.124	1.668	13.052	1
7	PDP	264	801	899	1.996	1.372	174	5.506	-
	Jumlah	32.039	102.534	76.048	81.289	47.537	41.948	381.295	34

Sumber : KPUD Kota Depok.

Ada tujuh (7) partai yang mendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS dan PDP. Dari ketujuh partai tersebut, pada pemilu tahun 2009 jumlah total suara yang dikumpulkan sebanyak 381.295 suara. Namun jika kita lihat jumlah perolehan suara tiap kecamatan menunjukkan perolehan yang cukup besar, rata-rata setiap kecamatan memperoleh jumlah suara 63.549 suara, cukup besar, apalagi jika mesin tiap-tiap partai bergerak secara maksimal, pasti akan mampu mempertahankan suara yang ada atau bahkan bertambah suaranya.

Sementara itu, pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad diusung oleh dua partai yang memiliki kursi di DPRD yaitu PKS dan PAN serta beberapa partai non kursi yaitu Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot, dan Republikan. Dimana total suara yang diperoleh sebanyak 180.551 suara, hampir setengah dari perolehan suara partai pendukung pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto. Pasangan ini sebenarnya hanya mengandalkan mesin politik PKS. Karena hanya PKS-lah partai yang diakui oleh lawan-lawannya yang memiliki kader cukup militan dan mau bergerak untuk memenangkan calonnya. Meskipun jika kita lihat jumlah perolehan suara rata-rata jika dibanding dengan perolehan suara pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto sangat kalah jauh yaitu rata-rata tiap kecamatan sebesar 30.091. Hampir setengah kurang dengan jumlah rata-rata perolehan tiap kecamatan partai pendukung pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto. Berikut tabel perolehan suara per-kecamatan partai politik pendukung pasangan calon Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad pada pemilu tahun 2009.

Tabel 15 :

Tabel Perolehan Suara Per-Kecamatan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad Pada Pemilu Tahun 2009

No	Nama Partai	Kec. Beji	Kec. Cimanggis	Kec. Sukmajaya	Kec. Pancoran Mas	Kec. Sawangan	Kec. Limo	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	PKS	12.804	32.882	31.893	25.265	12.814	9.832	125.490	11
2	PAN	6.012	6.606	11.131	7.505	11.796	1.400	44.450	5
3	Pelopor	-	3.372	219	223	24	79	3917	-
4	PNBK	44	422	2.641	101	37	51	3296	-
5	Patriot	80	238	373	389	235	167	1482	-
6	Republikan	-	504	398	281	198	535	1916	-
	Jumlah	6.148	44.024	46.655	33.764	25.104	12.064	180.551	16

Sumber : KPUD Kota Depok.

Di lima kecamatan, dimana Partai Demokrat menang, yaitu kecamatan Cimanggis, kecamatan Sukmajaya, kecamatan Pancoran Mas, kecamatan Sawangan dan kecamatan Limo, kebanyakan pemilih Demokrat adalah mereka dari kalangan menengah kebawah. Mereka kebanyakan tinggal di daerah perkampungan. Ada juga yang tinggal diperumahan, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Para pemilih Demokrat merupakan orang-orang yang mengagumi dan mengidolakan SBY. Karena sikap SBY yang dikenal selama ini cukup santun dan kebijakan-kebijakannya yang dianggap cukup berhasil dan bisa diterima dikalangan mereka. Para pemilih Partai Demokrat bukanlah para pemilih loyalis sebagaimana pemilih PKS, tetapi para pemilih yang hanya melihat sosok SBY, bukan Demokrat sebagai partai.

Hal ini ditegaskan oleh para informan bahwa basis sosial (konstituen) Partai Demokrat Kota Depok merupakan kalangan mengambang yang terdiri dari kelas bawah sampai atas. Mereka adalah kalangan terpelajar atau para pelajar, anak-anak muda yang mengidolakan SBY, guru, pedagang, karyawan atau pekerja, pedagang, masyarakat kelas bawah seperti tukang becak dan sopir angkot. Sebagaimana penuturan informan ketua PAC kecamatan Cimanggis :

“Di Demokrat tuh konstituennya mengambang tapi kita yakinkan, karena semua lapisan ada, dari lapisan bawah sampai atas saya rasa semua kaya gitu”

Penuturan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“kalau Depok masyarakatnya lebih ke intelektual, atau pemilih rasional. Jadi segmen intelektual menghasilkan kelompok pemilih rasional. Itu lebih banyak, mengingat Depok ini dekat civitas akademika dengan UI, Gunadarma dan berbagai kalangan seperti itu. Sehingga kita tidak bisa membohong-bohongi dengan money politik, untuk Depok susah, kalau daerah pinggiran atau pedalaman, saya yakin masih banyak praktek-praktek itu, tapi untuk di Depok susah. Karena kelompok pemilihnya lebih mayoritas rasional, banyak pekerja Jakarta juga, sehingga dia ga punya kesempatan hal-hal semacam itu”

Penuturan ketua PAC kecamatan Tapos :

“kalau khusus dengan konstituen ini memang satu amanah yang harus di lakukan kepada konstituen, biasa kita katakan masyarakat umum, karena kita setelah menjadi anggota dewan, seperti saya, sebenarnya tidak boleh deskriminasi, bahwa kita anggap seluruh masyarakat adalah konstituen kita”

Penuturan ketua PAC kecamatan Pancoran Mas :

“.....dari kalangan bisa bermacam-macam, kalangan tertentu misal, pelajar”

Penuturan ketua PAC kecamatan Cilodong :

“.....orang-orang yang berpendidikan, artinya sebagian besar dari mereka melek politik. Dan juga dari kalangan akademisi, saya kira sangat merespon Demokrat karena pada saat itu kebijakan-kebijakan yang diunggulkan pemerintah SBY, demokrat memang di sukai oleh banyak masyarakat kita di cilodong. Baik itu guru, rakyat kecil (tukang ojek, supir angkot), sebagian kecil anak-anak muda punya respek terhadap demokrat.”

Penuturan ketua PAC kecamatan Sawangan :

“.....kebanyakan pedagang”

Sementara itu, PKS yang menang di satu kecamatan yaitu Beji, memiliki kader dan pemilih yang loyalis, dimana memang sejak awal, kecamatan Beji dikenal sebagai basis dari para pemilih PKS. Di kecamatan inilah banyak tokoh dan kader PKS bertempat tinggal. Mereka umumnya tinggal di perumahan-perumahan. Mereka berasal dari kelompok menengah dan berpendidikan. Sehingga wajar kemudian PKS di kecamatan ini menang, walaupun tidak mutlak seratus persen.

Sedangkan saat pemilukada Kota Depok tahun 2010, pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto yang diusung oleh koalisi partai besar seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS dan PDP hanya mampu memperoleh 149.168 suara, bahkan mengalami penurunan suara yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah gabungan suara

koalisi partai pendukungnya pada pemilu tahun 2009 yaitu sebesar 23.2127 suara. Pasangan ini hanya menang di satu kecamatan yaitu Cipayung. Dimana kemenangan ini tidak lepas dari ketokohan ketua Partai Golkar yang tinggal di daerah tersebut. Dan kebanyakan yang tinggal di kecamatan cipayung adalah masyarakat perkampungan bukan mereka yang tinggal di perumahan.

Sementara itu pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad yang diusung oleh PKS dan PAN serta beberapa partai non kursi yaitu Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot, dan Republikan mampu memperoleh suara sebesar 227.744 suara. Jika dibandingkan dengan hasil gabungan suara koalisi pendukungnya pada pemilu tahun 2009 sebesar 180.551 suara, pasangan ini mengalami kenaikan dukungan suara yang cukup banyak yaitu sebesar 47.193 suara.

Kalau kita hitung jumlah suara yang diperoleh calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto dan calon pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad, tiap kecamatan sebelum pemekaran (enam kecamatan) dan setelah pemekaran (sebelas kecamatan) adalah sebagai berikut:

Suara pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto didukung oleh koalisi tujuh partai besar yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS dan PDP.

1. Kecamatan Sukmajaya, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 76.048 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Sukmajaya dan kecamatan Cilodong, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $23.065 + 10.712 = 33.777$ suara. Di kecamatan Sukmajaya jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada ditahun 2010 turun sebanyak $76.048 - 33.777 = 42.271$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Sukmajaya kehilangan suara sebanyak 42.271 suara.
2. Kecamatan Beji tidak mengalami pemekaran, tetapi jika dibandingkan dengan perolehan suara ditahun 2009 yaitu 32.039 suara, saat

pemilukada sebanyak 8.253 suara juga mengalami penurunan, $32.039 - 8.253 = 23786$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Beji meskipun tidak mengalami pemekaran kehilangan 23.786 suara.

3. Kecamatan Pancoran Mas, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 81.289 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Pancoran Mas dan kecamatan Cipayung, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $18.944 + 15.917 = 34.861$ suara. Di kecamatan Pancoran Mas jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada tahun 2010 turun sebanyak $81.289 - 34.861 = 46.428$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Pancoran Mas kehilangan suara sebanyak 46.428 suara.
4. Kecamatan Cimanggis, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 102.534 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Cimanggis dan kecamatan Tapos, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $16.049 + 25.012 = 41.061$ suara. Di kecamatan Cimanggis jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada tahun 2010 turun sebanyak $102.534 - 41.061 = 61.473$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Cimanggis kehilangan suara sebanyak 61.473 suara.
5. Kecamatan Limo, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 41.948 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Limo dan kecamatan Cinere, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $4.853 + 4.635 = 9.488$ suara. Di kecamatan Limo jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada tahun 2010 turun sebanyak $41.948 - 9.488 = 32.460$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Pancoran Mas kehilangan suara sebanyak 32.460 suara.
6. Kecamatan Sawangan, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 47.537 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Sawangan dan kecamatan Bojongsari, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan

ini ditambahkan, $12.990 + 8.738 = 21.728$ suara. Di kecamatan Sawangan jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada ditahun 2010 setelah dimekarkan perolehan suara pasangan ini turun sebanyak $47.537 - 21.728 = 25.809$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Pancoran Mas kehilangan suara sebanyak 25.809 suara.

Jika kita perhatikan dengan hitung-hitungan sederhana diatas, pasangan ini disemua kecamatan, setelah pemekaran mengalami penurunan perolehan suara yang sangat signifikan, bahkan ada yang sampai 50 persen lebih. Ini menunjukkan bahwa kerja partai-partai politik pendukungnya tidak efektif atau bahkan tidak berjalan.

Sementara itu, suara calon pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad yang diusung oleh PKS dan PAN serta beberapa partai non kursi yaitu Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot, dan Republikan.

1. Kecamatan Sukmajaya, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 46.655 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Sukmajaya dan kecamatan Cilodong, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $37.615 + 15.240 = 52.855$ suara. Di kecamatan Sukmajaya jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada ditahun 2010 naik sebanyak $46.655 - 33.777 = 6.200$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Sukmajaya mengalami kenaikan suara sebanyak 6.200 suara.
2. Kecamatan Beji tidak mengalami pemekaran, tetapi jika dibandingkan dengan perolehan suara ditahun 2009 yaitu 6.148 suara, saat pemilukada sebanyak 15.892 suara, mengalami kenaikan, $15.892 - 6.148 = 9.744$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Beji yang tidak mengalami pemekaran mengalami kenaikan 9.744 suara.
3. Kecamatan Pancoran Mas, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 33.764 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Pancoran Mas dan kecamatan Cipayung, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun

2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $30.602 + 13.037 = 43.639$ suara. Di kecamatan Pancoran Mas jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada tahun 2010 naik sebanyak $33.764 - 13.037 = 9.875$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Pancoran Mas mengalami kenaikan suara sebanyak 9.875 suara.

4. Kecamatan Cimanggis, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 44.024 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Cimanggis dan kecamatan Tapos, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $34.480 + 28.869 = 63.349$ suara. Di kecamatan Cimanggis jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada tahun 2010 naik sebanyak $63.349 - 44.024 = 19.325$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Cimanggis mengalami kenaikan suara sebanyak 19.325 suara.
5. Kecamatan Limo, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 12.064 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Limo dan kecamatan Cinere, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $11.541 + 9.630 = 21.171$ suara. Di kecamatan Limo jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada tahun 2010 naik sebanyak $21.171 - 12.064 = 9.107$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Pancoran Mas mengalami kenaikan suara sebanyak 9.107 suara.
6. Kecamatan Sawangan, sebelum pemekaran pasangan ini memperoleh suara sebanyak 25.104 suara. Kemudian kecamatan ini dimekarkan menjadi dua yaitu kecamatan Sawangan dan kecamatan Bojongsari, berarti perolehan suara saat pemilukada tahun 2010 di dua kecamatan ini ditambahkan, $15.284 + 15.554 = 30.838$ suara. Di kecamatan Sawangan jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilukada tahun 2010 setelah dimekarkan perolehan suara pasangan ini turun sebanyak $30.838 - 25.104 = 5.734$ suara. Jadi pasangan ini di kecamatan Pancoran Mas mengalami kenaikan suara sebanyak 5.734 suara.

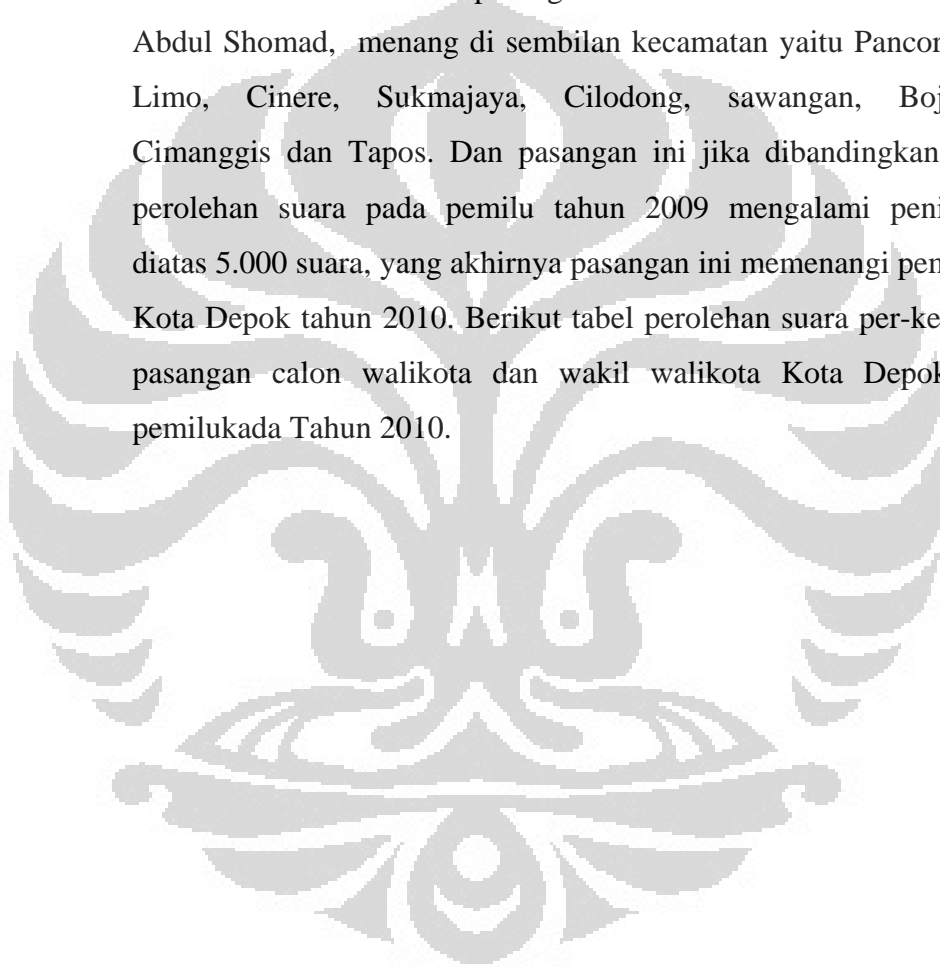
Tabel 16 :

Perbandingan perolehan suara per-kecamatan calon pasangan Badrul Kamal & Agus Suprianto dan Calon pasangan Nur Mahmudi Ismail & Idris Abdul Shomad pada pemilu 2009 dan pemilukada 2010.

No	Nama Calon	Kec. Beji		Kec. Pan-Mas + Cipayung		Kec. Limo + Cinere		Kec. Sukmajaya + Cilodong		Kec. Sawangan + Bojongsari		Kec. Cimanggis + Tapos		Jumlah total
		2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
1	Nur-Idris	18.940	15.892	33.764	30.602	12.064	11.541	46.655	37.615	25.104	15.284	44.024	34.480	59.985
					+		+		+		+		+	
					13.037		9.630		15.240		15.554		28.869	
Jumlah selisih 2009-2010		+9.744		+9.875		+9.107		+6.200		+5.734		+19.325		
2	BK- Pri	32.039	8.253	81.289	18.944	41.948	4.853	76.048	23.065	47.537	12.990	102.534	16.049	232.209
					+		+		+		+		+	
					15.917		4.635		10.712		8.738		25.012	
Jumlah selisih 2009-2010		-23.786		-46.428		-32.460		-42.271		-25.809		-61.473		

Namun, jika kita perhatikan dengan hitung-hitungan sederhana diatas, pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto, di semua kecamatan mengalami penurunan suara, meskipun pada pemilukada tahun 2010 pasangan ini menang di kecamatan Cipayung. Dan penurunan perolehan suara pasangan ini disemua kecamatan sangat signifikan jika dibandingkan dengan perolehan gabungan partai politik pada tahun 2009, yaitu diatas 23.000 suara.

Sementara untuk pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad, menang di sembilan kecamatan yaitu Pancoran Mas, Limo, Cinere, Sukmajaya, Cilodong, sawangan, Bojongsari, Cimanggis dan Tapos. Dan pasangan ini jika dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu tahun 2009 mengalami peningkatan diatas 5.000 suara, yang akhirnya pasangan ini memenangi pemilukada Kota Depok tahun 2010. Berikut tabel perolehan suara per-kecamatan pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Depok dalam pemilukada Tahun 2010.



Tabel 17 :
Perolehan Suara Per-Kecamatan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok
Dalam Pemilukada Tahun 2010.

No	Nama Calon	Beji	Pan Mas	Cipayung	Limo	Cinere	Sukmajaya	Cilodong	Sawangan	Bojongsari	Cimanggis	Tapos	Jumlah Suara
1	Gagah Sunu Sumantri dan Derry Drajat	2.889 (0.52%)	6.527 (1.17%)	3.668 (0.66%)	2.435 (0.44%)	3.040 (0.55%)	6.808 (1.23%)	5.173 (0.93%)	3.209 (0.58%)	3.215 (0.58%)	8.806 (1.59%)	8.372 (1.51%)	54.142 (9.75%)
2	Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna	23.124 (4.16%)	18.505 (3.33%)	10.007 (1.80%)	6.641 (1.20%)	5.484 (0.99%)	13.015 (2.34%)	7.902 (1.42%)	11.651 (2.10%)	6.193 (1.11%)	11.321 (2.04%)	10.668 (1.92%)	124.511 (22.41%)
3	Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad	15.892 (2.86%)	30.602 (5.51%)	13.037 (2.35%)	11.541 (2.08%)	9.630 (1.73%)	37.615 (6.67%)	15.240 (2.74%)	15.284 (2.75%)	15.554 (2.80%)	34.480 (6.21%)	28.869 (5.20%)	227.744 (40.99%)
4	Badrul Kamal dan Agus Supriyanto	8.253 (1.49%)	18.944 (3.41%)	15.917 (2.87%)	4.853 (0.87%)	4.635 (0.83%)	23.065 (4.15%)	10.712 (1.93%)	12.990 (2.34%)	8.738 (1.57%)	16.049 (2.89%)	25.012 (4.50%)	149.168 (26.85%)
	Jumlah	50.158	74.578	42.629	25.470	22.789	80.503	39.027	43.134	33.700	70.656	72.921	555.565

Sumber : KPUD Kota Depok

5.4 Partai Demokrat dan Koalisi Dalam Pemilukada Kota Depok

Koalisi merupakan gabungan dari dua partai politik atau lebih dengan tujuan untuk membentuk suatu pemerintahan bersama atau untuk mengajukan pasangan calon yang akan diusung dalam pemilu atau pemilukada. Koalisi didasarkan pada beberapa hal, diantaranya hanya karena ingin memaksimalkan jumlah kursi parlemen menjadi $50\% + 1$, sehingga mampu menguasai parlemen, atau koalisi dilakukan karena persamaan preferensi partai politik itu. Misalnya sama-sama berideologi islam, kesamaan visi dan misi, dan lainnya.

Selama lima tahun terakhir, sebagian besar partai-partai yang memenangkan pertarungan dalam pemilukada adalah partai-partai yang saling berkoalisi dalam mengusung para calon kandidat. Namun demikian, hampir tidak ada pola koalisi dan kerjasama yang permanen di antara partai-partai yang mengajukan pasangan calon dalam pemilukada. Di satu pihak hal ini tampak positif karena kerjasama tersebut seolah-olah didasarkan pada kesamaan isu lokal yang hendak diusung, tetapi di sisi lain memperlihatkan bahwa partai-partai sesungguhnya tidak memiliki ideologi dan *platform* politik yang jelas. Selain itu, pola dan kerjasama antarpartai di tingkat nasional tidak sepenuhnya terjadi di tingkat lokal.

Dalam pemilukada Kota Depok, koalisi parpol pengusung masing-masing calon pasangan sangat beragam. Sekretariat Gabungan (Setgab), koalisi nasional yang digalang oleh Partai Demokrat untuk mengamankan pemerintahan SBY hingga 2014 yang di dukung oleh lima partai lain yaitu Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan PKB ternyata tidak cukup ampuh untuk meresonansi koalisi ke tingkat daerah. Koalisi nasional yang tergabung dalam Setgab tercerai-berai dengan mengusung calonnya masing-masing.

Bahkan, PDIP yang nota bene adalah partai oposisi di tingkat nasional, justru bergandengan dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai pendukung pemerintahan SBY mengusung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto. Berbeda dengan pasangan yang diusung oleh PKS dan PAN, partai yang juga tergabung dalam koalisi nasional (Setgab) yaitu pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdushomad.

Partai-partai besar saling berkoalisi dengan partai besar, partai sedang, ataupun partai kecil. Begitu pula sebaliknya, partai kecil berkoalisi dengan sesama partai kecil ataupun dengan partai besar dan partai sedang. Hampir tidak ada suatu pola yang bersifat tetap antara daerah yang satu dengan lainnya, termasuk di antara satu partai yang sama di kabupaten atau kota yang berbeda tetapi di dalam propinsi yang sama.

Yang menarik, dalam pemilu pada Kota Depok tahun 2010, bukan partai politik yang aktif melakukan komunikasi dan lobi politik untuk membangun koalisi dalam mengusung calon, tetapi justru calonlah yang aktif melakukan pendekatan dan komunikasi dalam pembentukan koalisi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“yang membangun tuh calon, bukan saya, nah itulah yang saya katakan siapa yang membangun koalisi itu, saya tidak pernah berkomunikasi dengan Golkar untuk membangun itu tapi calon sudah mengkondisikan, Golkar di panggil, PKB, PPP, Demokrat, yang bisa ke Pak Badrul siapa itu teknisnya seperti itu”

Juga disampaikan oleh ketua DPD Partai Golkar Kota Depok :

“sampai akhirnya masuknya PDIP, bukan karena Golkar, masuknya Demokrat bukan karena Golkar, begitupun sebaliknya, Demokrat pun bukan karena partai lain, tapi karena Pak Badrul Kamal-nya sendiri menggalang koalisi tadi”

Serta diperkuat oleh penuturan ketua DPC PDIP Kota Depok

“Terkait koalisi, ketika ada orang mendaftar ke PDIP yang kami tanyakan di awal adalah apakah sudah ada dukungan dari partai lain? Kalau itu sudah terjadi artinya kita sudah punya kekuatan, dan mereka menyanggupi untuk mendapatkan dukungan dari partai lain, artinya ketika mereka menyanggupi tuh iya silahkan sok, minta dukungan dari partai lain sehingga kekuatan ini makin besar. Tapi itu bukan tugas kami, dan ketika si calon sudah menyanggupi ya secara komunikasi kami bina”

Sehingga terbentuklah koalisi pendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PPP,

PKB, PDS, dan Partai Demokrasi Pembaruan. Sebagaimana penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“kita berkoalisi dengan partai lain, sehingga menjadi koalisi besar dan lainnya. Itu hasil dari komunikasi partai dengan partai”.

Koalisi yang dibangun oleh pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto, dilakukan untuk kemungkinan membentuk koalisi besar yang melibatkan partai-partai lain dalam rangka mengusung calon yang sama. Hal ini juga dikuatkan oleh informan lain, bahwa untuk memenangkan pemilu pada Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain. Seperti penuturan ketua PAC kecamatan Cilodong :

“Jadi itu kebijakan dari pimpinan, bahwa kita harus memenangkan pemilu. Dan itu strategi yang harus dilakukan seorang pimpinan. Jadi diminta atau tidak konstituen harus siap, tidak dilibatkan untuk ikut menyuarakan, kita harus koalisi”.

Calon diberi kewenangan untuk membangun koalisi. Ibaratnya, calonlah yang membutuhkan “perahu” untuk bisa dia gunakan untuk maju mencalonkan diri. Jadi, dalam pemilu, bukan satu-satunya kewenangan partai politik untuk membangun koalisi, tetapi calonlah yang harus aktif membangun koalisi tersebut. Hal ini menurut salah satu informan merupakan model terbaik untuk menghindari kecemburuan antar partai koalisi. Seperti diungkapkan oleh ketua DPD Partai Golkar Kota Depok :

“sebenarnya ini model yang sangat bagus, dengan demikian sebenarnya kalau dijalani serius oleh semua partai didalam berjuang, termasuk kader-kader partai, saya pasti akan menang, tetapi tadi kan tida konsisten, tidak serius”

Walaupun pendapat itu dibantah oleh informan lain, karena kalau calon bukan orang partai (bukan pengurus partai), hal itu akan mempersulit calon dalam membangun komunikasi dengan masing-masing partai koalisi. Seperti penuturan informan F.

“bagaimana seorang kandidat yang harus pintar kan orang partai, jangan sampai menjual partai, bahasanya kan gitu mas, tapi bukan berarti maaf maksudnya, kita punya kader kenapa ga kader gitu loh mas, kenapa harus diserahkan kepada orang lain, itu akan mengakibatkan konsekuensi dia harus membutuhkan waktu untuk asimilasi”

Koalisi besar yang dibangun oleh pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto ternyata tidak mampu mengantarkan calon pasangan ini memenangi pemilukada Kota Depok tahun 2010. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kekompakan didalam internal partai koalisi. Adanya kontestasi dari masing-masing partai pendukung yang ternyata berdampak negatif bagi calon yang diusung. Padahal pasangan ini didukung oleh beberapa partai besar diantaranya Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, dan PPP.

Bahwa kekalahan calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto tidak lepas dari rapuhnya pondasi yang dibangun oleh pasangan ini atas partai-partai pendukungnya. Karena pada awalnya, sebelum nama Badrul Kamal dan Agus Supriyanto diusung secara resmi oleh partai-partai koalisi, masing-masing partai sudah memiliki calon yang akan diusung dalam pemilukada Kota Depok tahun 2012. Misalnya Partai Golkar, sebagaimana ditulis oleh Harian Rakyat Merdeka on line (Minggu, 28 Februari 2010), menghadapi Pemilukada Kota Depok, diperkirakan suara kader dan simpatisan Partai Golkar akan pecah. Meski Partai Golkar sudah memunculkan Naming Bothin sebagai jagoan (Balon walikota) yang akan diusung, namun kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak kader dan simpatisan partai berlambang pohon Beringin tersebut yang menginginkan Badrul Kamal untuk menjadi Walikota Depok mendatang.

Demikian juga Partai Demokrat, sebagai partai pemenang, sejak awal, berdasarkan kesepakatan kader-kadernya yang ada di Kota Depok menginginkan agar Agung Wicaksono sebagai sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok diusung menjadi calon walikota. Seperti penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“saya dicalonkan berpasangan bukan di musda tetapi kesepakatan lah, teman-teman yang pro saya, tapi tadi kalau saya gunakan itu, gertakan itu akan besar sekali mas, antara ngotot dan ngerem, karena saya tahu kalau saya gunakan otoritas saya, Depok pecah dan yang akan tepuk tangan

PKS, padahalkan partai besar yang bisa mengimbangi sparing PKS kan demokrat, makanya saya lepaskan saja ”

“satu suara iya, tapi tidak terlepas dari jalan cerita tadi, memang berangkatnya pondasinya sudah rapuh kalau saya melihatnya seperti itu, misalkan dulu yang diangkat demokrat kan saya, dan dari golkar ya kader golkar, itu mungkin perangnya, perang brata yudha mas, mereka siap perang mas, tapi ini kan untuk orang lain”

Juga seperti yang disampaikan oleh ketua DPD Partai Golkar Kota Depok :

“adanya ketidakkonsistenan partai pendukung, saya tidak harus menyebutkan didalam pelaksanaan pemilukada kemarin, mungkin boleh jadi adanya pengkhianatan dipartai politik, adanya ketidakompakan, jadi tidak mendukung secara utuh, nah ini salah satu faktor penyumbang kegagalan”

“tidak berjalannya mesin partai, masih ada rasa kurang tanggungjawab untuk meraih dukungan pemilih bagi BK, masalahnya semangat kader itu kurang dalam mendukung pak BK, mereka bekerja hanya ketika ada kunjungan pak badrul saja, tapi ketika sendiri tidak ada komunikasi dia tidak mau turun kelapangan, dia tidak mau membentuk program tersendiri baik pimpinan legislative maupun pimpinan partai tingkat kelurahan dan kecamatan. Ini tidak maksimal, sehingga dari kekuatan yang begitu besar ini tidak sinergi tidak maksimal”

Serta penuturan ketua DPC PDIP Kota Depok.

“Ketidaksinkronan di internal koalisi pasti ada yah, tidak bisa dipungkiri karena semua partai ini ingin paling depan, mungkin saja ada. Dan bisa jadi partai besar golkar, demokrat dan PDIP tidak nyatu atau pecah, nah yang pecah ini adalah yang memberikan dukungan secara pribadi, tapi tidak mengatasmamakan partai, cumankan cukup signifikan juga, iya kan ketika pribadi bergerak door to door inikan yang sangat berpengaruh”

Ketidakkompakan didalam koalisi partai pendukung ini sebenarnya tidak lepas dari konflik yang terjadi diinternal partai pendukung yang tidak terselesaikan dengan baik yang kemudian berdampak pada internal koalisi partai-partai pendukung. Sebagaimana penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“sebenarnya, itulah kesalahannya, calon itu boleh dari luar, kalau calon bukan orang partai kan susah mas, dia mau ketemu dengan orang golkar juga ga kenal dekat, sama Demokrat juga sama iya kan, nah kalau orangnya seperti saya, lah orang golkar kan sering ketemu saya, jadi dari situ saja sudah menimbulkan potensi tidak akan harmonis, boleh calon dari luar tapi efeknya seperti ini mas, akhirnya dia tidak punya tim kerja dibawah untuk merangkul masyarakat, yang mas bisa lihat di PAC, PAC ga jalan masuk arena feelingnya ga kena. Saya sama PAC Golkar kenal mas, minimal pernah ketemu, kalau dari luar akan ada kesulitan, boleh mereka dapat rekomendasi boleh, tapi tim kerjanya kagak ada.”

Hal itu juga ditambah dengan ketidakmampuan pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto mengendalikan partai, calon pasangan ini dianggap tidak bisa merangkaul masyarakat dan memenej partai, karena mereka bukan orang-orang partai, sehingga masyarakat tidak mau bergerak secara masif calon pasangan ini. Seperti penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“Yang jelas pak BK tidak bisa mengendalikan partai, mereka tidak bisa merangkul masyarakat, tidak bisa memenej, karena mereka bukan orang partai, jangan di anggap enteng partai democrat, memang hak suara di masyarakat, tapi yang memenejkan orang partai, sampai kenapa konstituen tidak memilih sampai saat itu.”

Juga penuturan ketua DPD Partai Golkar Kota Depok :

“salah satunya yaitu ada ketidakkompakan diinternal partai, Demokratkan pada waktu itu kan pecah, saudara Agung tidak mendukung dan mengerahkan untuk Badrul karena dia tidak sinkron dengan saudara rintis jadi ada dua kubu, dan dia tidak atasi dengan baik, kalau saya atasi dengan baik dan itu diketahui dan pengembosan kepada Partai Demokrat itu luar biasa”

Koalisi besar yang diusung oleh pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto semula diharapkan mampu mengalahkan pasangan calon *incumbent* ternyata justru “layu sebelum berkembang”. Konflik diinternal partai pendukung koalisi yang tidak terselesaikan dengan baik ternyata berdampak pada lemahnya komitmen dari partai-partai pendukung. Yang paling nyata adalah konflik di tubuh Partai Demokrat, yang itu diakui oleh ketua DPC-nya yaitu saudara Agung Wicaksono dan juga Partai Golkar sebagai mitra koalisi. Akibatnya mesin politik

partai-partai koalisi tidak berjalan dengan baik dan para kader yang ada dibawah tidak mau bergerak, karena calon yang diusung tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

5.5 Strategi Elit Dan Basis Sosial Partai Demokrat Dalam Memenangkan Pemilukada Kota Depok.

Dalam uraian ini dibahas tentang bagaimana strategi elit dan basis sosial Partai Demokrat dan partai-partai pendukung lainnya yaitu Golkar dan PDIP dalam memenangkan pemilukada pada tahun 2010 atas calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto.

Didukung oleh koalisi partai-partai besar dan calon yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Kota Depok, seharusnya semakin memudahkan jalan pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto untuk memenangkan pemilukada. Ditambah lagi struktur partai yang sudah mapan, diprediksi, pasangan ini bisa menang dengan mudah mengalahkan pasangan *incumbent*, Nurmahmudi. Berbagai strategi dilakukan agar pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto bisa memperoleh dukungan dari masyarakat.

Diantara strateginya adalah mendorong mendatangkan calon walikota ke daerah-daerah pemilihan dan juga mendatangkan para anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atas calon yang akan diusung oleh Partai demokrat. Seperti penuturan ketua PAC kecamatan Cimanggis :

“.....di dorong dengan mendatangkan calonnya, siapapaun, misalnya salah satu caleg wilayah kita, kita datengin. Kandidat lain juga kan datang juga, tinggal program kandidat yang mereka pilih.”

Strategi lainnya adalah membuat program-program yang bisa membantu meringankan kesusahan masyarakat kecil seperti pengurusan program jamkesmas. Masyarakat dipandu, didampingi mulai dari RT, RW sampai ke dinas hingga jamkesmas benar-benar bisa dirasakan oleh mereka kalangan asyarakat kecil. Seperti penuturan ketua PAC kecamatan Cimanggis :

“Dengan program, program yang kaya seperti saya di cimanggis, jauh sebelum pilukada, pilpres kita sudah membantu masyarakat yang kesusahan dalam mengurus jamkesmas, kita akan pandu dia mulai dari RT, RW kalau memang di belum bisa sampai ke Dinas dan sampai keluar jamkesmas. Itu kita riil kita lakukan dan kita terbuka untuk membantu semua untuk masyarakat, tidak hanya konstituen saja tapi masyarakat, tetangga RT, RW, temen saya pun bukan semua orang demokrat, toh kalau jalur saya lebih cepat kenapa tidak, tapi tidak ada tendensi partai disini, tapi kalau untuk memenagkan sesuatu itu jelas, kita harus memenangkan.”

Juga memanfaatkan struktur partai yang sudah ada baik ditingkat kota, kecamatan, maupun ranting untuk mensosialisasikan pasangan yang akan diusung. Para kader juga diminta terus aktif berkomunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat dengan meminta masukan atas calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Seperti penuturan ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok :

“.....kita punya stuktur, PAC, ranting, jadi selalu kita berkomunikasi dengan masyarakat. Susunan atau kader kita yang ada di tingakat kota atau kecamatan itu sama, kelurahan yah, DPC, PAC dan ranting. Ya mereka berkomunikasi, terus aktif dengan masyarakat, sehingga kita dapat masukan dari kader-kader kita”

“.....melihat dari lembaga survei, siapa yang tingkat elektabilitasnya yang paling bagus, walaupun ditetapkan siapa, kemudian pasangannya dengan siapa begitu....dan kita selain proses itu juga, kita membuka komunikasi dengan partai lain”

“.....lewat jaringan dari partai kita. Tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dari DPC, PAC dan ranting. Peran dari pengurus, khususnya pengurus partai dan kadernya, itu mensosialisasikan siapa yang di usung oleh kami”

Hal ini juga dipertegas oleh ketua PAC Partai kecamatan Tapos. Setelah partai memutuskan calon yang akan diusung dalam pilukada, diharapkan kepada seluruh partai disemua tingkatan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan mau mendukung dan memberikan suaranya kepada calon yang telah diusung oleh Partai Demokrat. Penuturan ketua PAC Partai kecamatan Tapos :

“.....kita berharap kepada seluruh partai, baik itu PAC, ranting maupun kader yang lain. Agar mereka melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat...”

“.....ketika partai memutuskan dan mengusung pasangan Pak Badrul Kamal dan Pak Supriyanto, maka kita berkomitmen dan berjuang, bagaimana pasangan yang memang sudah di setuju, di terima melalui proses-proses yang ada, di lembaga ataupun di partai politik yang lebih tinggi. Saya pada saat itu berjuang mati-matian, untuk bagaimana masyarakat dilingkungan saya itu minimal memilih orang yang barangkali, yang tadi di usulkan, dan alhamdulillah walaupun hasilnya tidak kita harapkan. Tapi di kelurahan saya, Pak Badrul menang”

Setelah itu, strategi lain yang dilakukan adalah saat pencoblosan, dimana tiap-tiap partai memiliki peran, sebagaimana Partai Demokrat memiliki peran menjadi pemantau atau menyediakan saksi dimasing-masing TPS. Sebagaimana disampaikan oleh ketua PAC Partai kecamatan Sawangan :

“.....tugas kita pada waktu itu sebagai pemantau, dibagikan peran sendiri, jadi ketua koalisinya waktu itu Pak Rintisyanto, jadi mungkin perannya di bagi-bagi, Demokrat bagiannya pemantau terkait saksi di masing-masing tps.”

Meskipun berbagai strategi yang diharapkan mampu menarik dukungan massa atas calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto sudah dilakukan, namun, yang terjadi justru adanya perlawanan dari arus bawah Partai Demokrat Kota Depok. Mereka kecewa karena tidak diakomodirnya calon dari internal partai oleh Tim Pemenangan pasangan bakal Calon Walikota–Wakil Walikota Depok, Badrul Kamal–Agus Supriyanto. Untuk itu, kader dan simpatisan Partai Demokrat Kota Depok memberikan dukungan mereka kepada pasangan lain, yakni Yuyun–Pradi yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan beberapa partai politik (parpol) non parlemen.

Hal ini dikarenakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok tidak jadi dicalonkan oleh partai, maka kader-kader Demokrat Kota Depok akan menyalurkan aspirasi politiknya untuk pasangan Yuyun–Pradi. (Rakyat Merdeka Online, Jumat, 30 Juli 2010). Sehingga strategi yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto tidak bisa berjalan dengan maksimal.

BAB VI

ANALISA TEORITIK PERAN ELIT DAN BASIS SOSIAL PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010

6.1 Implikasi Teoritik

6.1.1 Teori Koalisi

Dalam logika politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Dalam sistem multipartai, koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari di dalam proses politik. Koalisi partai tidak hanya terjadi dalam sistem parlementer, dalam sistem presidensial pun dikenal koalisi partai politik. Misalnya dalam proses pengambilan keputusan diparlemen. Partai-partai diparlemen melakukan koalisi untuk meloloskan kebijakan tertentu. Karena tujuan dibentuknya koalisi adalah untuk menang dalam pemilu dan untuk memaksimalkan kekuasaan, dengan mengesampingkan preferensi ataupun kesamaan partai, baik ideologi maupun basis sosialnya serta tujuan partai tersebut (William Riker, 1962).

Namun ada juga, koalisi yang dibentuk secara “*connected*” yaitu partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan *partner* yang tidak penting. Partai-partai terlebih dahulu akan mencoba bergabung dengan partai-partai yang memiliki banyak kesamaan dengan mereka, jika diperlukan baru menambah dengan partai-partai lain hingga koalisi mayoritas terbentuk. Tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi diantara anggota koalisi disaat memerintah. Karena membentuk koalisi atas dasar kesamaan tujuan kebijakan lebih penting dan stabil dari pada atas dasar jumlah kursi semata Robert Axelrod (1970).

Dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010, semangat membangun koalisi sebenarnya sudah dilakukan oleh partai-partai politik jauh hari sebelumnya. Koalisi dibangun untuk menaikan posisi tawar partai politik menjelang pemilukada. Beragam koalisi pun muncul. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bertempat di Rumah Makan Saung Telaga Pancoranmas, Rabu, tanggal 14 April 2010 mendeklarasikan koalisi dengan nama koalisi pangeran. Koalisi ini terdiri

dari tiga Partai Politik yang mendapatkan kuota kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009. Koalisi ini telah menyiapkan tiga orang calon wakil walikota yaitu Ali Fahmi Al Habsy (PDIP), Hasbullah Rachmad (PAN), dan Abdul Halim (PPP).

Berikutnya, adalah ide pembentukan koalisi '45. Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Terakhir Partai Amanat Nasional (PAN), meninggalkan koalisi yang dibangun Partai Golkar dengan bergabung dalam koalisi '45. Koalisi '45 juga dibuat sebagai alat tawar dari partai-partai politik agar mau mendukung atau melibatkan mereka dalam koalisi.

Terakhir adalah ide membuat koalisi besar sebagaimana terjadi di DKI Jakarta saat pemilihan Gubernur tahun 2007 yang diusung oleh Partai Demokrat sebagai partai pemenang, sempat menjadi topik yang hangat menjelang pemilukada tersebut. Semua sepakat, untuk mengalahkan PKS, tidak bisa dihadapi sendiri oleh satu partai, harus ada koalisi besar yang mampu menjadi satu kekuatan yang signifikan untuk menjadi lawan PKS.

Walaupun pada akhirnya, koalisi-koalisi itu berguguran karena yang muncul kemudian adalah tiga koalisi pendukung calon pasangan walikota dan wakil walikota Kota Depok yaitu koalisi partai non parlemen yang mendukung calon pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, koalisi besar mendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto dan koalisi mendukung calon pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad.

Menurut peneliti, hanya calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Riker dengan teori koalisi *Minimal Winning Coalitions*-nya (WMC), walaupun tidak minimal tetapi lebih kepada *oversized* koalisi. Karena, pasangan ini mengesampingkan preferensi atau kesamaan partai baik ideologi maupun basis sosial dalam membangun koalisi untuk memenangkan pencalonannya dalam pemilukada di Kota Depok. Partai-partai politik yang mendukung pasangan ini adalah Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS dan PDP. Dimana partai-partai tersebut memiliki preferensi, ideologi dan basis sosial yang berbeda.

Bila menganalisa lebih jauh koalisi-koalisi yang terbentuk dalam pemilukada Kota Depok, akan ditemui banyak hal yang menarik. Diawal telah diuraikan, ada empat calon yang akan bertarung. Satu merupakan calon independent dan tiga calon lainnya diusung oleh koalisi partai-partai, baik partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Depok maupun partai-partai yang tidak memiliki kursi. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 59, ayat 1 dan 2 bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Dan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud adalah dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dari koalisi tersebut kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa koalisi pengusung Badrul Kamal dan Agus Suprianto adalah koalisi yang besar karena mempunyai jumlah perwakilan di DPRD 34 kursi, yang terdiri dari tujuh partai politik yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PDS dan PDP. Semua partai pendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto memiliki kursi di DPRD kecuali PDP.

Sementara itu pasangan koalisi calon lainnya didukung oleh beberapa partai politik. Calon pasangan Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad didukung oleh PKS dan PAN yang memiliki kursi di DPRD dan beberapa partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yaitu Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot, dan Partai Republikan. Total kursi DPRD yang dikumpulkan calon pasangan ini adalah 16 kursi. Berikutnya adalah calon pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna yang didukung oleh lima belas (15) partai politik yaitu Partai Gerindra yang memiliki 3 kursi di DPRD dan 14 partai non-parlemen PBR, PKPB, PKNU, PMB, PKP, PDK, PPI, PPRN, PNI Marhaenis, PSI, Partai Buruh. Walaupun kemudian pasangan ini digugat ke pengadilan karena Gerindra

menarik dukungannya dan berpindah ke calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto.

Bila dilihat dari perolehan jumlah kursi DPRD partai yang mendukung masing-masing pasangan calon, nampak pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto bukan hanya sekedar ingin memenangkan pemilukada tetapi memprediksi lebih jauh lagi yaitu bagaimana koalisi yang dibangun tersebut dapat mendukung kebijakannya selama memerintah. Dapat diperkirakan bahwa pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto bukan sekedar mencukupkan persyaratan 15 persen untuk maju, tetapi melakukan strategi agar jika terpilih nantinya pasangan ini mendapat dukungan mayoritas di DPRD.

Penghitungan jumlah kursi DPRD partai pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota Depok tahun 2010 :

Pasangan Gagah Sunu Sumantri dan Derry Drajat	: 0 kursi
Pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna	: 3 kursi
Pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad	: 16 kursi
Pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto	: 34 kursi

Dengan koalisi banyak partai diharapkan pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto bisa memperoleh suara signifikan sehingga mampu memenangkan pemilukada dengan mudah. Sebab, kalau kita berpatokan pada perolehan suara pada pemilu tahun 2009 (dibahas dalam V), partai-partai yang mendukung pasangan ini adalah partai pemenang serta partai-partai besar yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan memiliki basis sosial yang cukup kuat dimasyarakat seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PPP dan PDS. Partai-partai itu semuanya memiliki perwakilan di DPRD Kota Depok. Namun justru sebaliknya, pasangan ini kalah dengan calon pasangan Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdus Shomad yang didukung oleh koalisi PKS, PAN dan beberapa partai non parlemen.

Jika dilihat dari sisi aktor yang berperan dalam pembentukan koalisi, menurut penulis setidaknya ada tiga aktor, yaitu pimpinan partai politik tingkat DPC (DPD), calon dan pengurus Pusat (DPP). Jumlah aktor partai politik, tergantung dari jumlah partai politik yang bergabung dalam koalisi, semakin banyak partai politik yang bergabung, semakin banyak aktor yang terlibat dan harus diakomodasi kepentingannya. Jika calon tidak mampu mengendalikan

koalisi, justru koalisi akan menjadi ajang kontestasi masing-masing partai politik, sehingga semakin menguatkan friksi karena koalisi yang dibangun hanya untuk kepentingan pragmatis.

Menurut pemahaman penulis, jika dianalisa berdasarkan asumsi teori MWC dari Riker, dapat dikatakan bahwa hanya calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto yang memenuhi minimal 50% + 1 bahkan melebihi atau *oversized coalition* dengan 34 kursi DPRD dari jumlah keseluruhan kursi DPRD sebanyak 50 kursi. Begitu juga dengan jumlah partai yang mendukung pasangan ini, juga melebihi atau *oversized*, karena yang mendukung lebih dari dua atau tiga partai politik, hal ini dikarenakan dalam pemilu tahun 2009 tidak ada partai politik yang menang secara mayoritas. Partai Demokrat sebagai partai pemenang di Kota Depok hanya memperoleh 15 kursi di DPRD. Jadi, dalam hal ini jika untuk menganalisa koalisi dalam pemilukada Kota Depok dengan menggunakan asumsi Riker, hal ini bisa diterima. Karena, tujuan pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto membangun koalisi adalah tidak hanya untuk memenangkan pemilukada tetapi memprediksi lebih jauh lagi kedepan bagaimana koalisi yang dibangun tersebut dapat mendukung kebijakannya selama memerintah nanti.

Namun, yang menjadi catatan dari teori MWC Riker adalah tidak mengurai secara detail kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang bisa saja menggagalkan koalisi tersebut seperti adanya kontestasi diinternal koalisi atau resistensi dari struktur partai politik, kader dan para konstituen partai politik yang menjadi anggota koalisi. Asumsi penulis, logika koalisi adalah logika elit karena bisa saja koalisi tersebut mendapat perlawanan dari kader dan pendukung partai tersebut jika tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Dan logika koalisi menurut Riker adalah meniadakan kedekatan preferensi dan kesamaan kebijakan. Hal ini terjadi dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto kalah dengan pasangan Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad yang diusung oleh PKS, PAN, Partai Pelopor, PNBK, Partai Patriot, Partai Republikan seharusnya tidak layak terjadi. Yang secara hitung-hitungan suara maupun perolehan jumlah kursi di DPRD sangat jauh. Hanya PKS (125.490 suara atau 11 kursi) dan PAN (44.450 atau 5 kursi) yang memiliki kursi di DPRD Kota Depok, sedangkan partai pendukung lainnya yaitu Partai Pelopor,

PNBK, Partai Patriot dan Partai Republikan tidak memiliki kursi di DPRD Kota Depok.

Sementara itu, jika mengacu pada realitas koalisi yang terjadi pada pemilukada Kota Depok, sulit mengatakan bahwa koalisi yang terjadi dibangun berdasarkan pada skala kebijakan dan meniadakan *partner* yang tidak penting atau dalam teori *Minimum Connected Winning* (MCW) menurut Robert Axelrod terwujud. Karena, semua koalisi yang dibangun oleh masing-masing calon pasangan boleh dikatakan meniadakan kedekatan preferensi, dan kesamaan kebijakan, karena yang penting calon memiliki “perahu” yang bisa mengantarkan mereka pada kemenangan.

Dan pada kenyataannya, koalisi yang dibangun dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 lalu lebih berorientasi pada pragmatisme calon. Yang penting calon memiliki “perahu” untuk bertarung mengambil simpati masyarakat agar mau memilihnya. Karena semua koalisi yang dibangun oleh masing-masing calon, kecuali pasangan Badrul Kamal dan Agus Surpianto hanya mengejar batas minimal syarat pengajuan yang di atur dalam undang-undang. Jadi, partai apa saja boleh berkoalisi mendukung calon yang ada dan akan diterima, meskipun partai tersebut tidak memiliki kursi di parlemen (DPRD). Jadi preferensi, kedekatan atau kesamaan bukan menjadi masalah dalam membangun koalisi dalam pemilukada Kota Depok. Jadi, pada kenyataannya pemilukada memang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan pemilihan presiden ditingkat nasional. Figur lokal atau daerah sangat menentukan sementara partai hanya berfungsi semacam *agency* bagi para calon kepala daerah.

Berikutnya, dalam pemilukada “komersialisasi” partai sebagai kendaraan politik calon tak terhindarkan lagi, hal ini menyebabkan parpol di daerah lebih “berpihak” pada calon yang memiliki banyak uang daripada calon yang memiliki popularitas di akar rumput. Dalam hal inilah kemudian kader dan konstituen partai sebagai basis sosial partai, terabaikan. Rekrutmen calon kepala daerah lebih terkesan calonlah yang membutuhkan “kendaraan” partai politik, bukan partai politik yang punya kepentingan mencari kader-kader yang akseptabilitas dan kredibilitas mumpuni untuk dicalonkan. Sehingga yang dikhawatirkan terjadinya praktek jual beli “kendaraan” partai oleh kandidat tak terelakkan lagi.

Bukan rahasia lagi jika dalam hal ini partai-partai yang mempunyai kursi dilembaga legislatif atau bahkan yang tidak mempunyai kursi melakukan “tender” terhadap para bakal calon kepala daerah untuk mendapatkan kuota 15% sebagai kelayakan terhadap keikutsertaan dalam pilkada. Di sini, perilaku partai politik dan para politisi tidak lagi “mengindahkan” etika dan norma politik karena telah “mengubah” partai politik menjadi “perusahaan politik” yang mendapat pemasokan sumber daya bagi partai maupun bagi pribadi dalam jangka waktu periode suatu pilkada. Karena di berbagai daerah, para bakal calon tidak pernah menganggap remeh partai-partai yang memiliki jumlah kursi di bawah 15% di lembaga legislatif, bahkan harus mempertimbangkan pula partai-partai yang *non sheet*²³, meskipun susah untuk dibuktikan secara hukum, bahwa adanya “transaksi” dukung mendukung dalam penentuan calon untuk di ajukan dalam pemilukada ada benarnya. Entah sebagai dana kompensasi kampanye, mahar, tanda jadi atau istilah yang lainnya

Oleh karena itu, kekalahan pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto penulis rasa karena komunikasi antar partai yang terlalu elitis dalam membangun koalisi serta adanya konflik diinternal partai politik maupun internal koalisi yang tidak terselesaikan dengan baik. Pelibatan kader dibawah sebagai basis sosial partai hampir tidak ada sama sekali. Seharusnya, basis sosial partai dilibatkan agar keputusan untuk koalisi dengan siapapun dan mengusung calon siapa bisa efektif karena didukung dan disetujui oleh kader partai sebagai basis sosial partai.

Dasar koalisi yang dibangun oleh elit partai lebih didasarkan pada kebutuhan pragmatis jangka pendek yaitu demi mencapai tujuan, bukan karena faktor kedekatan atau kesamaan partai. Sehingga sikap dan tindakan yang diambil oleh elit partai menimbulkan respon yang tidak baik bagi kalangan kader partai. Inilah yang menyebabkan banyak kader atau basis sosial Partai Demokrat kecewa dan menolak keputusan DPP. Kemudian melakukan perlawanan dengan mendukung calon lain yaitu pasangan Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad. Sehingga berdampak pada kalahnya pasangan calon yang di usung oleh Partai Demokrat.

²³ <http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/07/16/partai-kartel-dalam-negara-kartel>. Diakses tanggal 20 Juni 2011, pukul 18.43

Berikutnya, secara lebih jauh yang menjadikan koalisi pendukung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto kalah adalah koalisi yang mereka bangun hanya berdasarkan pada kesepakatan elit, tidak dibarengi dengan mobilisasi ditingkat kader. Kader Partai Demokrat justru membuat koalisi tandingan ditiap-tiap ranting yaitu “Relawan Mercy Bintang Tiga”, yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri mendukung calon pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idrisi Abdul Shomad serta menolak keputusan elit mereka yang mendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto. Boleh dibilang koalisi elit melawan koalisi basis sosial. Koalisi elit menginginkan pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto yang menjadi walikota dan wakil walikota, sebaliknya koalisi kader atau basis sosial Partai Demokrat menginginkan asalkan pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto yang menjadi walikota dan wakil walikota.

6.1.2 Teori Partisipasi

Partisipasi politik merupakan hak yang sangat istimewa bagi masyarakat. Pembangunan sebagai upaya untuk memaksimalkan partisipasi merupakan syarat mutlak bagi dipenuhinya hak-hak rakyat didalam bidang politik. Dalam regulasi pemilukada²⁴ mengatur bahwa proses penyaringan bakal calon oleh partai atau gabungan partai politik dilakukan secara demokratis dan transparan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa selain sesuai dengan mekanisme internal partai atau gabungan partai, yang dimaksud dengan proses demokratis dan transparan adalah terbukanya proses tersebut dari akses publik. Partisipasi politik rakyat menjadi elemen yang penting dalam proses demokrasi, tanpa partisipasi politik aktif rakyat, proses pemilihan umum hanya menjadi prosedur demokrasi saja, selain itu minimnya partisipasi politik rakyat, hasil pemilihan umum menjadi lemah atau kehilangan legitimasinya.

²⁴ Lihat UU No 12 tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 60

Oleh karena itu, pembangunan partisipasi diarahkan pada penguatan aspek - aspek²⁵ berikut: (1) melibatkan rakyat sebagai basis sosial partai politik dalam proses artikulasi kepentingan, sehingga keputusan yang diambil sebagai kebijakan politik dapat mencerminkan hak-hak politik rakyat dan terutama kebutuhan dan kepentingan mereka sehari-hari; (2) dalam hal agregasi kepentingan, rakyat perlu diberikan partisipasi dan keikutsertaan yang luas supaya agregasi kepentingan didasarkan kepada kebutuhan mendesak rakyat dan terhindar dari hidden agenda penguasa (elit); (3) dalam hubungannya dengan rekrutmen politik, partisipasi rakyat sangat penting mengingat rekrutmen merupakan ruang seleksi bagi individu yang berbakat untuk menjadi pemimpin; (4) kaitannya dengan sosialisasi politik, rakyat perlu dilibatkan dalam hal komunikasi politik, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan penting kepada pemimpin yang telah menerima mandatnya dalam pemilu atau pilukada.

Seymour Martin Lipset (1960) menjelaskan bahwa faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tingkat memilih ada empat: pertama, kepentingan mereka sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah (atau dalam konteks partai politik adalah kebijakan-kebijakan elit partai); kedua, masyarakat, basis sosial partai politik memiliki akses terhadap informasi tentang relevansi keputusan-keputusan politik dengan kepentingan mereka; ketiga, adanya tekanan sosial terhadap masyarakat atau basis sosial partai politik yang mendorong pemberian suara; empat, masyarakat atau basis sosial partai politik tidak ditekan untuk memilih partai-partai politik yang berbeda.

Pemilukada sebagai sarana demokratisasi pada dasarnya merupakan arena rekrutmen individu yang berbakat untuk menjadi pemimpin. Disinilah ruang khusus keterlibatan masyarakat dalam mengisi jabatan-jabatan politik dilakukan, sehingga pemilukada menjadi arena kompetisi yang diperebutkan secara damai dan wajar. Secara substansial, inti dari partisipasi sebagaimana disampaikan oleh Keith Faulks (2010), Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, Herbert McClosky, Norman H Nie dan Sidney Verba dan Michael Rush dan Philip Althoff adalah adanya keterlibatan masyarakat, kader maupun konstituen, baik perseorangan

²⁵ Yuliani Widiyaningsih, *Proses Penguatan Demokrasi Lokal (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Pasca Reformasi)* Tesis, FISIP UI, 2007

maupun kelompok, secara aktif maupun pasif dalam proses politik atau kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Baik sebagai anggota partai politik ataupun group penekan seperti LSM ataupun yang lainnya.

Sementara itu, Partai Demokrat dan partai politik lainnya dalam memberikan akses kepada kadernya untuk berpartisipasi dalam pemilukada, terutama pada saat penentuan calon walikota dan wakil walikota yang diusung dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 lalu terbilang sangat minim dan hanya sebatas prosedural saja. Kader, sebagai basis sosial partai politik hanya dilibatkan saat pendaftaran calon, dengan cara pimpinan partai dalam hal ini adalah ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok menginstruksikan kepada struktur yang ada dibawahnya yaitu PAC dan ranting, untuk memberitahu kepada masyarakat yang berada diwilayahnya masing-masing untuk mendaftarkan diri sebagai calon walikota dan wakil walikota Kota Depok melalui Partai Demokrat.

Setelah calon terdaftar kemudian diverifikasi oleh tim sembilan (9) yang dibentuk oleh dewan pimpinan pusat (DPP) yang unturnya terdiri dari DPP, DPD dan DPC. Tim sembilan (9) inilah yang kemudian mengajukan nama-nama yang sudah lolos verifikasi baik administrasi maupun survei (yang tingkat elektabilitasnya tinggi) ke DPP. Kemudian DPP membuat surat keputusan ke DPC yang memutuskan bahwa calon yang diusung dalam pemilukada Kota Depok adalah pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto. Kemudian kader dilibatkan kembali untuk mensosialisasikan calon yang sudah diputuskan oleh DPP kepada masyarakat.

Jadi, partisipasi kader sebagai basis sosial partai hanya pada tahap sosialisasi saja dan penilaian atas calon yang akan diusung saat survei. Sangat kecil dan hanya sebatas prosedural saja. Mereka tidak bisa menolak keputusan pusat. Bahkan ketika surat keputusan (SK) dari DPP turun dan memutuskan mendukung calon Badrul Kamal dan Agus Suprianto, hampir semua PAC Partai Demokrat Kota Depok menolak keputusan DPP, sampai mereka bertemu dengan ketua umumnya yaitu Anas Urbaningrum. Namun pertemuan itu tidak mampu mengubah keputusan yang sudah di buat oleh DPP dan harus dijalankan. PAC yang menolak secara terang-terangan adalah Sawangan, Bojongsari, Pancoran

Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Beji, Cinere sementara yang *silent* PAC Tapos dan Limo.

Kemudian yang terjadi adalah resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh struktur dan kader partai. Struktur partai, pembantu anak cabang (PAC) yang kecewa, melakukan mereka tidak bergerak *silent* atau istilahnya mati suri, karena keinginan mereka untuk memajukan sendiri kader partai dalam pemilukada tidak dipenuhi. Bahkan, dari sebelas (11) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat (PD) Kota Depok yang merupakan partai pengusung pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto ada sekitar delapan (8) PAC yang menyeberang dengan ikut dalam kampanye pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad²⁶. Tidak hanya ditingkat PAC, bahkan kader yang ada diranting pun demikian, mereka membuat paguyuban ranting demokrat (Parade) Kota Depok, dengan mendukung calon lain yaitu Nurmahmudi dan Idris Abdul Shomad yang diusung oleh PKS.

Jadi, konsep partisipasi yang disampaikan oleh para tokoh seperti Keith Faulks, Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, Herbert Mc Closky, Norman H Nie dan Sidney Verba dan Michael Rush dan Philip Althoff, bahwa partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat, kader maupun konstituen, baik perseorangan ataupun kelompok, secara aktif maupun pasif dalam proses politik atau kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Baik sebagai anggota partai politik ataupun group penekan seperti LSM ataupun yang lainnya, dalam kaitan penentuan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 yang dilakukan oleh Partai Demokrat ataupun parta-partai pendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Supriyanto bisa diterima, tetapi intensitas dan kualitas partisipasi yang harus ditingkatkan. Jangan hanya sebatas prosedural saja. Kader dan konstituen sebagai basis sosial partai politik harus diberi kewenangan lebih dalam pemilukada terutama dalam proses penentuan calon walikota dan wakil walikota yang akan di usung oleh partai politik, dan elit hanya sebatas memberikan penetapan secara formal atas usulan dan calon yang diajukan oleh kader.

²⁶ www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5377, diakses tanggal, 13 November 2011, pukul 21.48.

6.1.3 Teori Elit

Pemilukada langsung merupakan kemajuan penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia di era transisi yang sedang berlangsung. Makna penting dari pemilukada langsung tersebut antara lain pertama, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. kedua, pelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subjek hukum, dan ketiga, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya antara eksekutif dan legislatif .

Peranan elit partai ditingkat daerah dalam mendorong demokratisasi ditingkat lokal sebenarnya sangat signifikan, hal ini dikarenakan peran sosial yang mereka miliki, mempunyai pengaruh yang besar bagi anggotanya maupun masyarakat ditingkat lokal. Karena biasanya mereka adalah tokoh panutan bagi masyarakat yang didengar dan diikuti pendapatnya. Namun, elit lokal tidak bisa berdiri secara mandiri didalam kebijakan struktural partai, karena elit pusatlah sebagai yang menentukan.

Dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010, dalam pengamatan penulis, peran dari elit partai terutama pusat masih sangat dominan. Hal ini terbukti dari beberapa proses yang dilakukan dalam komunikasi politik untuk membangun koalisi serta penentuan calon yang akan diusung dalam pemilukada. Merekalah sekelompok kecil orang yang sangat berperan dan menentukan dalam kedua proses itu.

Hal ini sesuai dengan skema konseptual yang telah diuraikan oleh Pareto dan Mosca bahwa dalam setiap masyarakat ada dan harus ada suatu minoritas yang menguasai anggota masyarakat yang lain. Minoritas itu adalah kelas politik atau elit yang memerintah yang terdiri dari mereka yang menduki jabatan-jabatan komando politik dan secara lebih tersamar, mereka yang dapat langsung mempengaruhi keputusan-keputusan politik.

Dalam perspektif Pareto maupun Mosca, elit menunjuk kepada suatu kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan mewakili sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat. Merekalah para pemimpin partai serta para anggota dewan yang dalam sudut pandang Pareto maupun Mosca adalah minoritas yang menguasai atau elit yang memerintah. Jadi, teorisasi yang

disampaikan oleh Pareto dan Mosca masih relevan dengan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat maupun partai-partai politik lainnya dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Dimana, untuk menentukan calon pasangan yang akan diusung oleh partai-partai politik dalam pemilukada, ditentukan oleh “minoritas” yang menguasai yaitu mereka para elit atau pimpinan partai politik tersebut. Partai Demokrat, elit mereka adalah tim 9 dan dewan pimpinan pusat (DPP), PDIP diputuskan oleh DPP, pun demikian Golkar, diputuskan oleh DPP.

Namun baik Pareto maupun Mosca tidak menjelaskan lebih jauh implikasi peran dari minoritas yang menguasai atau elit yang memerintah tadi. Sebagaimana yang terjadi di Kota Depok, kader Partai Demokrat menolak atas keputusan elit partai dalam pencalonan walikota dan wakil walikota. Jadi, adanya perlawanan dari basis sosial partai atau dalam bahasa Pareto maupun Mosca kelas yang dikuasai yang secara jumlah mereka lebih banyak inilah yang belum tertangkap dari teori elit, baik dari Pareto maupun Mosca.

Seringkali yang terjadi, elit partai, “cenderung” mengabaikan konstituennya dan hanya “mengurus” cara mencari uang untuk pemilukada. Dampaknya elit partai lebih cenderung inklusif atau saling mengakomodasi antar elit partai dengan calon yang akan diusungnya sementara kader atau basis sosial partai malah diabaikan atau tereksklusi perannya.

6.1.4 Basis Sosial

Kota Depok, sebagai kota penyangga ibu kota Jakarta, memiliki peran yang strategis bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta. Laju migrasi ke Kota Depok menjadi salah satu penyebab mengapa kota ini memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada masyarakat yang tinggal di Kota Depok semakin beragam, baik dari suku, agama maupun kelompok masyarakat, sangat multi etnis dan multikultural.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi ke kota Jakarta menjadikan sebagian penduduknya memilih untuk tinggal di daerah *sub-urban* dengan tetap bekerja di kota Jakarta. Hal tersebut ternyata juga berdampak terhadap perkembangan kehidupan di kota Depok, sehingga kepadatan penduduk dan kebutuhan hidup di Kota Depok semakin meningkat pula. Kota Depok juga

dijadikan sebagai tempat tinggal *commuter*, yaitu orang yang melakukan perjalanan rutin pulang-pergi ke kota Jakarta.

Hal ini berdampak pada kehidupan berpolitik di Kota Depok. Sehingga partai politik tidak memiliki basis massa yang kuat di masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang berdasarkan etnis maupun afiliasi-afiliasi tertentu, tidak mau sepenuhnya diperalat oleh partai politik. Sehingga partai politik hanya mengandalkan kader-kadernya untuk bergerak memobilisasi massa. Sehingga partai tidak secara maksimal mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Walaupun sebenarnya secara pendidikan hal ini juga berpengaruh, bahwa masyarakat Kota Depok termasuk kelompok yang berpendidikan dan para pekerja yang memiliki latar pendidikan yang sangat beragam. Sehingga yang dijadikan bahan pertimbangan mereka dalam memilih calonnya dalam pemilu adalah pertimbangan yang rasional. Sehingga partai politik tidak bisa dengan semauanya bergerak tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dampak dari keputusannya.

Dalam pemilu Kota Depok, basis sosial Partai Demokrat tidak sepenuhnya tunduk atas kebijakan para elitnya yang mendukung calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto. Mereka melakukan perlawanan dengan membuat “Relawan Mercy Bintang Tiga”. Relawan Mercy Bintang Tiga diinisiasi oleh kader-kader yang berada ditingkat ranting yang sebenarnya juga didukung secara *hiden* oleh beberapa elit Partai Demokrat yang tidak setuju dengan keputusan itu. Relawan Mercy Bintang Tiga dibuat sebagai bentuk perlawanan atas dominasi elit yang telah mengabaikan aspirasi para kader ditingkat bawah. Dilapangan, koalisi Relawan Mercy Bintang Tiga secara terang-terangan mendeklarasikan diri mendukung calon pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad yang diusung oleh PKS dan PAN.

Dalam hal ini basis sosial Partai Demokrat merupakan kelompok masyarakat yang tidak berbasis pada agama, etnis maupun kelompok tertentu, tetapi mereka adalah kelompok masyarakat yang berangkat dari latarbelakang berbeda terutama kelompok menengah bawah yang selama ini menjadi kader dan pendukung Partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan pengelompokan basis sosial partai politik yang dilakukan oleh Seymour Martin Lipset (1960), dimana

menurutnya secara generalisir partai-partai politik pada prinsipnya berbasis pada dua kelompok kelas, yaitu kelas bawah atau kelas menengah dan kelas atas.

6.2 Implikasi atas Kebijakan

Secara politik, calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto sebenarnya memperoleh dukungan yang sangat kuat di DPRD yaitu sebanyak 34 kursi. Tidak akan kesulitan jika nanti menang ingin memutuskan kebijakan-kebijakan yang harus di konsultasikan dengan DPRD. Karena mereka menguasai lebih dari 50 persen + 1 kursi.

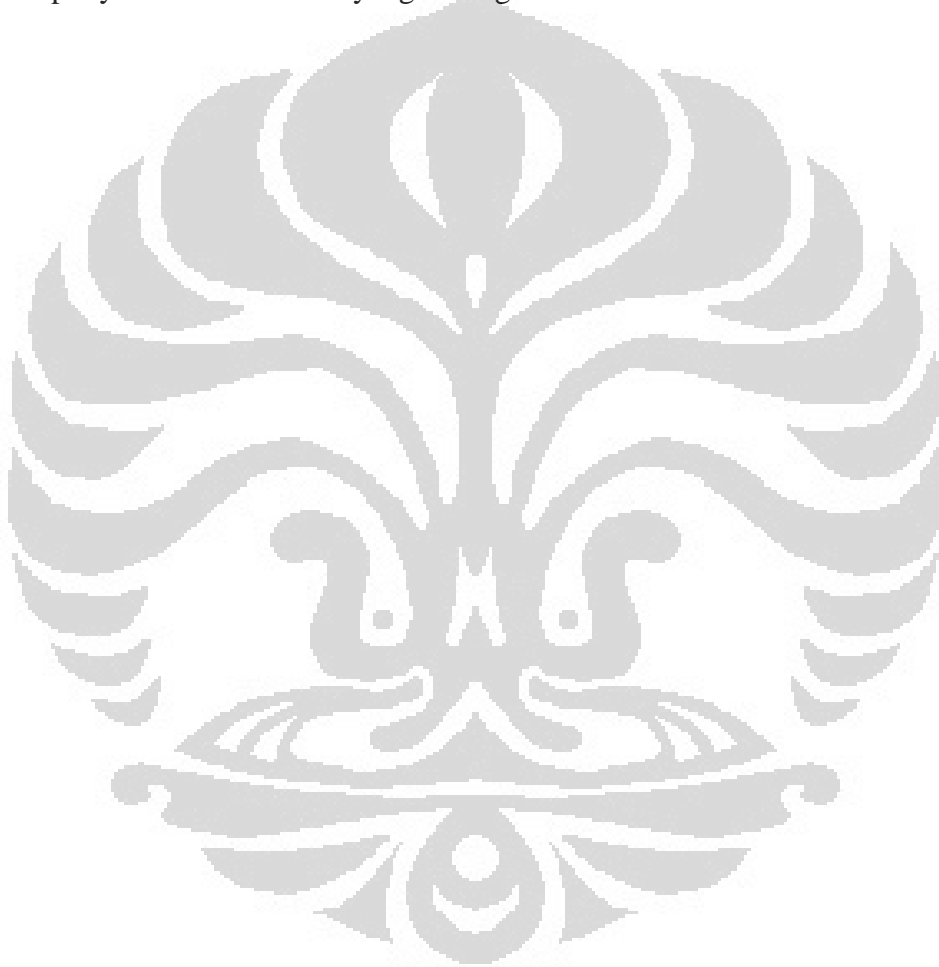
Namun, karena tidak solidnya koalisi partai-partai pendukung, karena terjadi konflik yang tidak termanajemen dan terselesaikan dengan baik, yang seharusnya pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto mampu memenangi pemilukada dengan mayoritas suara, hal itu tidak terjadi. Justru, pasangan ini mendapat penolakan dari hampir mayoritas kader Partai Demokrat dan beberapa kader pendukung lain seperti Golkar, karena merasa tidak dilibatkan atau merasa suara mereka diabaikan oleh elit mereka. Dampaknya, banyak kader partai membelot dengan mendukung calon yang diusung oleh koalisi partai lain yaitu pasangan Nurmahmudi Ismail dan Idrisi Abdul Shomad. Sehingga pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari para kader partai yang telah berkoalisi mendukungnya, akibatnya pasangan ini kalah dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010 yang lalu.

Kader dan konstituen, sebagai basis sosial partai politik yang selama ini hanya menerima keputusan “sepihak” dari elit-elit partai dalam memutuskan kebijakan strategis partai akhirnya mempunyai daya tawar yang sangat menentukan. Hal ini sebaiknya bisa menjadi pelajaran bagi elit atau para pemimpin partai politik agar kedepan tidak lagi mengabaikan peran dari kader dan konstituen sebagai basis sosial partai politik. Keterlibatan basis sosial partai politik tidak bisa diabaikan begitu saja. Partai harus lebih akomodatif atas masukan dan suara-suara kader.

Jadi, sangat jelas sekali bahwa kebijakan partai politik atas struktur dibawahnya untuk keputusan-keputusan strategis partai akan berimplikasi bagi partai itu sendiri. Seperti yang terjadi dalam pemilukada Kota Depok, karena

kebijakan elit partai tidak sejalan dengan keinginan kader dan konstituen, kader melakukan perlawanan dengan menolak atau tidak memilih calon yang diputuskan oleh DPP, bahkan mendukung calon yang diusung oleh partai lain.

Dalam beberapa kasus pemilukada yang sudah digelar, adanya konflik internal partai atas calon yang diusung kebanyakan disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara elit partai dengan basis sosialnya, elit terlalu memaksakan kehendak, sementara basis sosial partai yang berada di bawah mempunyai calon tersendiri yang dia inginkan.



BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kajian atas peran elit dan basis sosial Partai Demokrat dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

Pertama, pencalonan kepala daerah adalah salah satu tahap paling penting dalam penyelenggaraan pemilukada selain tahap pendaftaran pemilih, kampanye pasangan calon, pemberian suara dan penghitungan suara serta pengumuman hasil pemilukada. Melalui tahap pencalonan, tidak hanya terjadi interaksi antara partai-partai dan para kandidat yang berminat menjadi kepala dan wakil kepala daerah, melainkan juga tarik-menarik dan tawar-tawar di antara partai-partai politik. Oleh karena itu, calon yang diusung oleh partai politik hendaklah merupakan calon yang dipilih karena mendapat dukungan dan sesuai dengan usulan dan keinginan semua kader. Karena hal ini akan memudahkan mesin politik (struktur partai) berjalan. Sebab, partisipasi kader untuk menentukan calon yang akan diusung dalam pemilukada dijadikan sebagai elemen terpenting bagi partai politik. Dan juga, regulasi pemilukada mengatur bahwa proses penyaringan bakal calon yang diajukan melalui partai politik (selain calon perseorangan (*independent*) dilakukan oleh partai atau gabungan partai politik harus dilakukan secara “demokratis dan transparan”. Dalam penjelasan aturan tersebut ditegaskan bahwa selain sesuai dengan mekanisme internal partai atau gabungan partai serta calon perseorangan, yang dimaksud dengan proses pencalonan yang demokratis dan transparan adalah terbukanya proses tersebut dari akses publik, adanya partisipasi publik.

Karena, pada umumnya konstituen (basis sosial partai politik) di daerah pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai atau gabungan partai politik. Mengapa suatu partai tertentu memilih untuk mencalonkan tokoh tertentu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sebagaimana kecenderungan yang terjadi dalam pemilu legislatif 2009, masyarakat pada umumnya merasa di “abaikan” oleh partai atau gabungan partai dalam proses pencalonan pasangan kandidat dalam pemilukada. Dampak lebih

jauh dari kecenderungan pencalonan seperti ini adalah berlangsungnya proses seleksi calon yang elitis.

Hak politik masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pencalonan diabaikan karena segenap prosesnya cenderung berlangsung tertutup dan elitis. Hampir tidak ada akses bagi masyarakat untuk sekadar mengetahui, mengapa partai atau gabungan partai tertentu cenderung mencalonkan tokoh tertentu ketimbang yang lain. Meningkatnya kecenderungan golput dalam pemilukada – dibandingkan pemilu legislatif dan pilpres—bisa jadi juga berhubungan dengan kecenderungan ini. Proses pencalonan lazimnya dimulai dari lobi-lobi antara para kandidat yang berminat menjadi kepala daerah dengan partai yang dianggap potensial sebagai “perahu”, baik karena perolehan suaranya dalam pemilu legislatif cukup signifikan, maupun karena kandidat tersebut hanya mengenal dan memiliki hubungan dekat dengan partai tertentu saja.

Kedua, dinamika politik pemilukada berikutnya adalah tampak pada tahap koalisi antar partai tentang pasangan bakal calon yang akan diusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU). Tidak jarang terjadi konflik internal di dalam satu partai apabila tidak ada kesepakatan antara pimpinan partai di tingkat pusat dan propinsi, antara pengurus tingkat propinsi dan pengurus tingkat kabupaten atau kota, ataupun di antara sesama pengurus tingkat propinsi, kabupaten, dan kota serta antara pengurus tingkat kabupaten dan kota dengan pengurus tingkat kecamatan. Oleh karena itu, koalisi yang dibangun oleh partai politik ataupun calon tidak hanya berorientasi pada kuantitas atau jumlah partai politik ataupun dukungan di DPRD, menurut istilah Riker dalam teori MWC, dengan asumsi menguasai parlemen 50 persen + 1, tetapi idealnya koalisi dalam pemilukada harus dibangun berdasarkan preferensi kebijakan, orientasi ideologi atau platform partai politik. Sehingga diharapkan koalisi bisa berjalan dengan efektif, tidak hanya pragmatis untuk memenangkan calon saja.

Ketiga, hubungan antara elit partai dengan basis sosialnya harus berjalan dengan baik. Karena jika hal ini tidak terjadi bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari bagi partai politik itu sendiri. Volatilitas atau pergeseran kesetiaan pemilih dari satu partai ke partai yang lain hingga sekarang masih menjadi tren bagi pemilih (masyarakat). Jika komunikasi antara elit partai dengan basis

sosialnya tidak berjalan dengan baik, basis sosial akan menghukum elit partai saat pemilu dengan tidak lagi memilihnya atau melakukan gerakan tidak memilih (golput), yang dari pemilu ke pemilu atau pun pemilukada jumlahnya semakin meningkat.

Karena, realitas yang terjadi sekarang seringkali peran elit dan basis sosial partai politik dalam pemilukada tidak seimbang. Elit partai terlalu dominan dalam memutuskan kebijakan-kebijakan partai, sementara basis sosial partai politik hanya diposisikan sebatas pendukung saja. Hal ini sebenarnya hampir terjadi disemua partai politik. Keputusan elit partai tidak bisa dibatalkan atau digugurkan meskipun secara masif ditolak oleh para kader dan konstituen yang berada dibawah sebagai basis sosial partai.

Karena, pasca era orde baru, pemilukada merupakan “cara baru” bagi masyarakat ditingkat lokal untuk memilih atau menyeleksi calon pemimpinnya. Pemilukada bisa menjadi arena kontestasi yang berkualitas dan menentukan jika para pemain dan pemangku kebijakan mampu memberikan kontribusi yang berkualitas juga. Namun, jika pemilukada hanya diisi oleh para pemain yang oportunistik dan pragmatis jangka pendek, maka pemilukada tak lebih hanya sebatas ajang “hura-hura” yang mengatasnamakan demokrasi.

Keempat, calon yang diusung dalam pemilukada, akan memperoleh hasil yang maksimal jika didukung oleh tim atau struktur partai pendukung yang kuat. Tidak ada konflik ketika menentukan calon yang akan diusung, sehingga strategi elit dalam memenangkan pemilukada bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan strategi calon untuk memenangkan pemilukada bergantung pada dukungan maksimal dari kader dan konstituen partai politik pendukung, tidak bergantung pada banyaknya jumlah partai atau kursi DPRD. Seperti yang terjadi pada pemilukada Kota Depok, dimana pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto yang didukung oleh tujuh partai besar dan menguasai 34 kursi DPRD dari jumlah 50 kursi, mampu dikalahkan oleh calon lain yang didukung oleh dua partai politik yang hanya memiliki 16 kursi DPRD. Hal ini terjadi karena partai pendukung dari calon pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto terjadi konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga strategi elit untuk memenangkan pasangan ini tidak berjalan dengan maksimal.

7.2. Rekomendasi

Pertama, partai politik, sebagai institusi politik harus segera berbenah. Berbagai kasus yang terus menderanya selama ini harus segera diatasi, karena hal itu sangat rentan untuk menciptakan opini yang bisa mendelegitimasi fungsi dan peran partai politik. Dalam pemilu, partisipasi basis sosial partai politik dalam keputusan-keputusan strategis partai harus lebih diprioritaskan. Kader harus diberi ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam membesarkan partai, tidak hanya ditentukan oleh elit, karena kader merupakan elemen terpenting partai politik memenangkan partai. Partai politik harus lebih masif dan kontinyu dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat, tidak hanya pada saat pemilu maupun pemilu.

Kedua, partai politik harus kembali melakukan konsolidasi internal untuk memaksimalkan kaderisasi dengan melahirkan pemimpin-pemimpin baru, baik ditingkat lokal, daerah maupun nasional. Melakukan pembinaan dan rekrutmen calon kepala daerah melalui program yang mendidik bagi masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya defisit pemimpin bagi partai politik, sehingga partai politik siap mengajukan calon-calon terbaik dari internal mereka untuk diusung dalam pemilu tanpa harus mengambil kader dari luar partai. Partai politik tidak lagi hanya mengejar keuntungan pragmatisme jangka pendek saja dengan mengambil calon dari luar partai, tetapi tetap harus fokus pada kesolidan dan keutuhan partai.

Ketiga, dari banyak kasus pemilu langsung, yang menentukan kemenangan adalah rakyat. Rakyat yang berada dimasing-masing tempat pemungutan suara yang melakukan pemilihan adalah pemegang kebijakan sesungguhnya. Partai politik hanyalah sebagai *agency* atau tempat untuk melaksanakan seleksi calon kepala daerah yang seharusnya bergerak atas dasar kepentingan rakyat, bukan atas dasar kepentingan sekelompok elit. Oleh karena itu, sebisa mungkin keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh elit partai politik tidak bertentangan dengan keinginan mayoritas dari basis sosialnya. Karena hal ini akan memudahkan partai politik untuk memenangkan calon yang diusungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amal, Ichlasul (ed). (1988). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ambardi, Kuskrido. (2009). *Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. PT Gramedia Jakarta.
- Bottomore, T.B. (1996). *Elite dan Masyarakat*. Terj. Abdul Haris dan Sayid Umar. Akbar Tanjung Institute. Jakarta, 2006.
- Budiarjo, Miriam (1994). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.
- BPS. *Kota Depok Dalam Angka*. BPS Kota Depok, 2010.
- Byrne, David. (2005). *Social Exclusion, Second Edition*, Open University Press, England.
- Creswell, John. J. (1994) *Research Design, Quantitative & Qualitative Approaches*, Sage Publication. Inc
- Djadijono, M, Wiratma, I Made Leo, Legowo, T.A, (ed). (2006). *Membangun Indonesia dari Daerah*. CSIS. Jakarta
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Faulks, Keith (1999). *Sosiologi Politik, Pengantar Kritis*. Trans. Helmi Mahadi dan Shohifullah. Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010. Trans. *Political Sociology: A Critical Introduction*, Edinburgh University Press, 1999
- Huntington, Samuel P (1995). *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Terj. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Ismawan, Indra (1999). *Money Politics : Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Janoski, Thomas, et al., ed. (2005). *The Hand Book of Political Sociology*, Cambridge University Press, New York
- Lipset, Saymour Martin (2007). *Political Man, Basis Sosial Tentang Politik*. Trans. *Political Man, The Social Bases of Politics*. Feffer and Simons Inc 1960.
- Lijphart, Arend. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus*

- Government in Twenty One Countries*. New Haven : Yale University Press.
- Mahendra, A.A. Oka. (2005). *Pilkada Ditengah Konflik Horizontal*. PT. Dyatama Milenia
- Mariana, Dede (2006). *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Bandung
- Michels, Robert. (1911). *Partai politik : Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Terj. Jakarta : CV. Rajawali, 1984.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan keempat*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Oka Mahendra, AA. (2005). *Pilkada ditengah konflik horizontal*. Millennium Publisher, Jakarta.
- Pahlevi, Indra (ed). (2011). *Politik Pemilukada 2010, sebuah kajian terhadap penyelenggaraan pemilukada di Dumai dan Indragiri Hulu*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Buku Sumber untuk penelitian Kualitatif)*, Penerbit Tiara Wacana
- Sen, Amartya. (2000). *Social Exclusion : Concept, Application, and Scrutiny*. Philipines : Social Development Papers No.1, Asian Development Bank.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Universitas Indonesia (2008). *Pengantar penulisan ilmiah*
- Yusron. (2009). *Elite Lokal dan Civil Society : Kediri ditengah Demokratisasi*. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Tesis

- Alamsyah, Andi Rahman. *Bantenisasi Demokrasi*, Jurusan Sosiologi, Program Pasca Sarjana, FISIP UI, 2007
- Tawakkal, George Towar Iqbal. *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih (Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak tahun 2009)*, Jurusan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana Universitas

Diponegoro Semarang 2009.

- Hamidah, Luluk Nur. *Elit Politik Dan Konsolidasi Demokrasi (Studi Tentang Sirkulasi Kekuasaan Tiga Rezim-Pasca Soeharto)*, Jurusan Sosiologi, Program Pasca Sarjana, FISIP UI, 2004
- Pakpahan, Roy Tumpal. *Konflik Elit Pusat Dan Daerah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2003-2008)*, Jurusan Politik, Program Pasca Sarjana, FISIP UI, 2005
- Wardani, Sri Budi Eko. *Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung : Kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2006*, Jurusan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana, FISIP UI, 2005
- Tandisosang, Yohanis. *Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)*, Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2008.
- Widianingsih, Yuliani. *Proses Penguatan Demokrasi Lokal (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok Pasca Reformasi)*, Jurusan Sosiologi, Program Pasca Sarjana, FISIP UI, 2007.
- Susanti. *Konflik Politik Pada Pemilihan Bupati Banjarnegara tahun 2001*, Jurusan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana FISIP UI, 2003

Jurnal

- Craig Volden & Clifford J. Carrubba, *The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies*, dalam *American Journal of Science*, Vol. 48, No.3, Juli 2004
- Robin Peace. 2001. *Social exclusion : A Concept in need of Definition?*. New Zealand : *Social Policy Journal of New Zealand*. Issue 16 July 2002.
- Hillary Silver and S.M. Miller. *Social Exclusion : The European Approach to Social Disadvantage*. 2003
- Peter Mair dan Richard S. Katz. *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. Sage Journals Online. 1995.
- Peter Mair and Richard S. Katz. (1995). *Changing Models of Party Organization*

and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. Party Politics, Vol. 1, No. 1. (1 January 1995)

L.G. Seligman. “Elite Recruitment and Political Development”, *Journal of Politics*, Agustus 1964

Cornelis Lay. “Rekrutmen Elit Politik”, *Prisma No. 4*, April – Mei 1997

Makalah

Syamsuddin Haris. *Kecenderungan Pencalonan Dan Koalisi Partai Dalam Pilkada*, 2006. Makalah tidak diterbitkan.

Website

<http://inspirasitabloid.wordpress.com>

www.rakyatmerdeka.co.id

www.batavia.co.id

<http://wartapedia.com>

www.demokrat.co.id

<http://www.yipd.or.id>

Lain-lain

UU no 2 tahun 2011 tentang partai politik

UU no 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hendi Hendrar Prihadi. “Masa Depan Demokrasi Lokal”, dalam *Suara Merdeka*,

5 Januari 2005